



YAYASAN CILIWUNG MERDEKA

CILIWUNG
MERDEKA 2017

POLITIK HUKUM RUSUNAWA DALAM PENGEUSURAN PAKSA

WARGA BUKIT DURI



STUDI
KASUS

RUSUNAWA RAWA BEBEK

Politik Hukum Rusunawa dalam Penggusuran Paksa Warga Bukit Duri Studi Kasus Rusunawa Rawabebek

Penulis

Vera W. S. Soemarwi
Handika Febrian
Kristian Feran

ISBN

978-602-19548-0-5

Kontributor

Ade Parwastuti
Adi Alstar Siregar
Fx. Angga Fauzan S

Desain Cover

Divisi Tata Ruang Ciliwung Merdeka

Dokumentasi Foto

Divisi Media Sosial dan Audio Visual Ciliwung Merdeka

Diterbitkan oleh

Yayasan Ciliwung Merdeka
Jalan Matraman No. 19C
Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman
Jakarta Timur 13150

Cetakan Pertama

Juni 2017

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI.

Kata Pengantar.	i - iv
Pendahuluan.	v - xiii
Bab I Tinjauan Yuridis Relokasi Warga Bukit Duri ke Rumah Susun Sewa Rawa bebek.	
I. Pendahuluan.	1 - 2
II. Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.	2 - 9
III. Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Hak Sewa Rusunawa Rawa Bebek Kepada Korban Program Normalisasi Kali Ciliwung.	9 - 16
IV. Kesimpulan.	16 - 17
Bab II Proses Relokasi Warga Bukit Duri.	
I. Pendahuluan.	18 – 19
II. Persyaratan Formulir Pengajuan Rusunawa.	19 – 25
III. Bujuk Rayu Rusunawa Rawa Bebek.	25 – 31
IV. Perubahan Peruntukan Rusunawa Rawa Bebek.	31 – 32
V. Kesimpulan.	32
Bab III Data Penghuni Rusunawa Rawa Bebek dan Daftar Korban Normalisasi di Bukit Duri.	
I. Pendahuluan.	33
II. Klasifikasi Penerima Rusunawa Rawa Bebek.	33 – 35
III. Kesimpulan.	35 – 36
Bab IV Data Penghuni Rumah Susun Sewa Rawa Bebek.	
I. Pendahuluan.	37
II. Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek.	37 – 39
III. Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek Di Gedung Merpati.	
III.1. Pendahuluan.	39

	III.2. Klasifikasi penerima rusunawa Rawa bebek.	39 – 40
	III.3. Kesimpulan.	40 – 41
IV.	Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek Di Gedung Merak.	
	IV.1. Pendahuluan.	41
	IV.2. Klasifikasi penerima rusunawa Rawa bebek.	41 – 42
	IV.3. Kesimpulan.	42 – 43
V.	Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek Di Gedung Gelatik.	
	V.1. Pendahuluan.	43
	V.2. Klasifikasi penerima rusunawa Rawa bebek.	43 – 44
	V.3. Kesimpulan.	44 – 45
VI.	Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek Di Gedung Cendrawasih.	
	VI.1. Pendahuluan.	45
	VI.2. Klasifikasi penerima rusunawa Rawa bebek.	45 – 46
	VI.3. Kesimpulan.	46 – 47
VII.	Rekapitulasi Seluruh Penghuni Unit Sarusun di Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Merpati, Merak Gelatik, dan Cendrawasih.	47 - 49
Bab V	Kajian Jumlah Korban Normalisasi Kali Ciliwung Dengan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Rusunawa Rawa bebek.	50 - 51
Bab VI	Kerugian Keuangan Negara dari Peningkatan Jumlah Penerima Rusunawa Rawa Bebek.	
	I. Pendahuluan.	52
	II. Dasar Hukum Pemberian Subsidi Rusunawa.	52 – 53
	III. Perkiraan Kerugian Keuangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	53 – 55
	IV. Kesimpulan.	55

Bab VII	Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung.	
I.	Pendahuluan.	56 – 57
II.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Proyek Normalisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta untuk Pembebasan Lahan Tanah-Tanah Warga.	57 – 59
III.	Kesimpulan.	59
Bab VIII	Kesimpulan	60 - 63
	Daftar Pustaka	I – VI
Lampiran I:	Data Warga yang Ambil Rusunawa Rawa Bebek Menurut Laporan Lurah Bukit Duri Tertanggal 21 Oktober 2016	
Lampiran II.a.	Data Warga Menempati Rusunawa Rawa Bebek Blok Merpati	
Lampiran II.b.	Data Warga Menempati Rusunawa Rawa Bebek Blok Merak	
Lampiran II.c.	Data Warga Menempati Rusunawa Rawa Bebek Blok Gelatik	
Lampiran II.d.	Data Warga Menempati Rusunawa Rawa Bebek Blok Cendrawasih.	
Lampiran III.	Data Warga Ambil Rusunawa Rawa Bebek Per-Februari 2017.	

KATA PENGANTAR

MELAWAN PROPAGANDA MENJERNIHKAN FAKTA DAN DATA

Dalam kata pendahuluannya, diungkapkan secara jujur bahwa penelitian ini dilakukan karena akses informasi sangat minim mengenai persyaratan untuk mendapatkan satuan unit di rusunawa Rawa Bebek, termasuk bagaimana proses penempatan serta pemindahan warga dalam proses relokasi dalam rangka pelaksanaan program normalisasi Kali Ciliwung. Warga masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui jumlah warga yang dipindahkan ke rusunawa Rawa Bebek dan persyaratan bagi warga yang boleh tinggal di rusunawa Rawa Bebek. Pemerintah setempat tidak memberikan data dan menutup akses informasi terkait hal tersebut.

Ditengarai juga bahwa rusunawa Rawa Bebek ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai bentuk ganti rugi bagi warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Kelurahan Bukit Duri. Proses penetapan bentuk ganti rugi kepada warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung di lokasi Bukit Duri RW. 09, 10, 11, dan 12 tersebut berjalan tanpa memperhatikan aspek keterbukaan informasi publik. Proses ini melanggar keadilan bagi warga Bukit Duri serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kebijakan ganti rugi berupa pemberian unit satuan rumah susun (sarusun) di rusunawa Rawa Bebek tanpa landasan hukum yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan. Pemberian atau pendistribusian unit sarusun di rusunawa Rawa Bebek diberikan berdasarkan penilaian subyektif dari pelaksana kebijakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian jumlah unit rumah susun dan subyek para penerima sarusun di rusunawa Rawa Bebek.

Dalam konteks kebijakan publik negara, pengaburan, penggelapan dan manipulasi fakta dan data, biasanya dilakukan dalam rangka propaganda. Sebab Jacques Ellul dalam bukunya "Propaganda: The Formation of Men's Attitudes" (Ellul, 1951)

menyatakan bahwa propaganda politik senantiasa melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai atau golongan berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis dan taktis.

Propaganda sendiri mempunyai pengertian berupa rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Sedangkan menurut Garth S. Jowett and Victoria O'Donnell dalam bukunya "Propaganda And Persuasion", propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis, untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda.

Propaganda merupakan kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok tertentu untuk proses mempengaruhi pihak lain dengan tidak mengindahkan etika, moral, aturan, nilai, norma dan lain-lain guna memenangkan tujuan yang akan dicapai. Akibatnya, apapun akan dilakukan untuk memenangkan tujuan yang akan dicapai tersebut.

Untuk menghindari kecenderungan menggeneralisasikan permasalahan ke arah abstraksi, maka dalam usaha meninjau kesadaran dan pelaksanaan hak-hak asasi warga Bukit Duri sebagai pemangku kepentingan ("stake-holder") utama dalam hak-hak atas tanah, hak atas ruang, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas pekerjaan serta hak ekonomi, sosial dan budaya, penelitian ini sengaja bertitik-tolak dari suatu studi kasus konkret: Rusunawa Rawa Bebek.

Penelitian ini sengaja menggunakan metode yang cenderung bersifat empiris-sosiologis, karena ternyata para peneliti berkeyakinan bahwa hak-hak asasi warga Bukit Duri sebagai warga DKI Jakarta, warga negara Indonesia, tidak mungkin dapat ditangkap hanya berdasarkan pemikiran apriori belaka. Gambaran tentang perwujudan hak-hak asasi warga Bukit Duri sebagai korban penggusuran paksa, hanya dapat dipahami secara seksama berdasarkan suatu penyelidikan empiris tentang kesadaran dan praktek hak-hak asasi warga Bukit Duri itu sendiri dalam kehidupan nyata sehari-hari. Maka dengan metode analisa situasi negatif terhadap

kasus penempatan warga Bukit Duri ke rusunawa Rawa bebek sebelum dan sesudah pengusuran paksa tersebut para peneliti berkeyakinan bahwa berbagai kadar prasangka ideologis dan ikatan-ikatan doktrin atau keterlibatan sentimental terhadap mitos-mitos sehubungan dengan cara kita memandang masalah hak-hak asasi manusia pada umumnya serta citra hak-hak asasi warga Bukit Duri pada khususnya, akan lebih dapat dikurangi.

Namun rupanya para peneliti pun menyadari bahwa sebagai konsekuensi dari pendekatan kontekstual ini, mau tak mau sedapat mungkin para peneliti harus mempergunakan model wawasan trans-disiplin, yang tentu saja cenderung bersifat holistik. Maka dalam ketiga tahap analisa selanjutnya kami berusaha untuk mempergunakan beberapa disiplin ilmu yang menurut hemat para peneliti dapat lebih menunjang semakin jelasnya permasalahan tersebut.

Nampak sekali memang para peneliti menitik-beratkan pada pendekatan analisa yuridis formal dalam meninjau sejauh mana hak-hak asasi warga negara “economy survival”, khususnya warga Bukit Duri yang perikehidupannya secara garis besar telah cukup banyak diungkap melalui media massa, bahwa kehidupan mereka telah terjamin bila dilihat dari segi hukum, terbukti dengan peneguhan dari Majelis Hakim PTUN yang memenangkan gugatan warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Selatan, dan Kemen PUPR -BBWSCC secara mutlak.

Dalam analisa struktural, peneliti mencoba untuk memahami dan mengartikulasikan secara sederhana, bagaimana sebenarnya mekanisme struktur-struktur di dalam masyarakat kita dewasa ini, dan struktur kerja pemerintahan daerah, Pemprov DKI Jakarta dan Kemen PUPR-RI yang merupakan prakondisi operasionalisasi hak-hak asasi warga Bukit Duri. Tinjauan sosial-ekonomis juga menjadi penunjang penting pada bagian analisa ini, tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kultural-etisnya.

“Dialektika-negatif” merupakan metode pendekatan yang cukup mewarnai seluruh proses penelitian sederhana ini. Karena dengan demikian apa yang paling

didambakan dan oleh karena itu menjadi tolok-ukur utama, tidaklah dapat ditemukan begitu saja secara apriori langsung, apalagi melalui pendirian positif yang jelas. Sebaliknya justru dalam situasi negatif, apa yang harus dituju dan diusahakan menjadi lebih nampak secara dialektis. Karena penderitaan pada dirinya sendiri secara intrinsik mengandung tuntutan supaya segera diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung, spontan dan pasti, mendahului segala penalaran kita.

Memang penderitaan manusialah yang harus menjadi kriterium utama dalam menilai setiap proses pembangunan, dan bukan sekedar penjumlahan dari apa yang dibangun saja. Sebab manusialah yang merupakan realitas subyek pertama dan utama sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri.

Pada dasarnya setiap analisa situasi negatif pada dirinya senantiasa telah tercermin “analisa alternatif”. Maka pada bagian kesimpulan dari seluruh penelitian ini, para peneliti berusaha untuk memberikan tanggapan berupa beberapa alternatif yang menurut hemat para peneliti dapat menjadi jalan pembebasan struktural bagi warga urban “economy survival” Bukit Duri, demi semakin terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi warga negara di Indonesia.

Jakarta, 2 April 2017

I. Sandyawan Sumardi

PENDAHULUAN

Penelitian rumah susun sewa (rusunawa) Rawa Bebek ini dikerjakan oleh Para Peneliti yang tergabung dalam Yayasan Ciliwung Merdeka. Yayasan Ciliwung Merdeka bergerak dalam bidang kemanusiaan dan pemberdayaan warga dalam menghadapi problem ketidakadilan struktural-vertikal dalam bidang sosial-ekonomi-politik-budaya, lingkungan hidup, dan pendidikan warga miskin urban di Jakarta. Yayasan Ciliwung Merdeka didirikan pada tanggal 13 Agustus 2000 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 13 Mei tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan karena akses informasi sangat minim mengenai persyaratan untuk mendapatkan satuan unit di Rusunawa Rawa Bebek, termasuk bagaimana proses penempatan serta pemindahan warga dalam proses *resettlement* dalam rangka pelaksanaan program normalisasi Kali Ciliwung. Warga masyarakat mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui jumlah warga yang dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek dan persyaratan bagi warga yang boleh tinggal di Rusunawa Rawa Bebek. Pemerintah setempat tidak memberikan data dan menutup akses informasi terkait hal tersebut.

Rusunawa Rawa Bebek ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai bentuk ganti rugi bagi warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Kelurahan Bukit Duri. Proses penetapan bentuk ganti rugi kepada warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung di lokasi Bukit Duri RW. 09, 10, 11, dan 12 tersebut berjalan tanpa memperhatikan aspek keterbukaan informasi publik. Proses ini melanggar keadilan bagi warga Bukit Duri serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kebijakan ganti rugi berupa pemberian unit satuan rumah susun (sarusun) di Rusunawa Rawa Bebek tanpa landasan hukum yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan. Pemberian atau pendistribusian unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek diberikan berdasarkan penilaian subyektif dari pelaksana kebijakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian jumlah unit rumah susun dan subyek para penerima sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Selain pertimbangan tersebut di atas, apakah proses penggusuran paksa yang telah terjadi pada periode kedua, dan relokasi paksa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam proses penggusuran (*Basic Principle and Guidelines on Development Based Eviction and Displacement*)¹. Pada bagian kedua, kebijakan umum (*General Obligation*), bab III Sebelum Penggusuran (*Prior to Evictions*) Nomor:

37. Urban or rural planning and development processes should involve all those likely to be affected and should include the following elements: (a) appropriate notice to all potentially affected persons that eviction is being considered and that there will be public hearings on the proposed plans and alternatives; (b) effective dissemination by the authorities of relevant information in advance, including land records and proposed comprehensive resettlement plans specifically addressing efforts to protect vulnerable groups; (c) a reasonable time period for public review of, comment on, and/or objection to the proposed plan; (d) opportunities and efforts to facilitate the provision of legal, technical and other advice to affected persons about their rights and options; and (e) holding of public hearing(s) that provide(s) affected persons and their advocates with opportunities to challenge the eviction decision and/or to present alternative proposals and to articulate their demands and development priorities.

[Perencanaan di perkotaan atau pedesaan dan proses pembangunan harus melibatkan seluruh pihak yang mungkin akan terpengaruh dan harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (a) pemberitahuan yang layak atau tepat kepada seluruh pihak yang berpotensi terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dari penggusuran yang direncanakan dan akan dilaksanakan dengar pendapat publik dalam rangka perencanaan dan mencari alternative; (b) diseminasi yang efektif dari pejabat terkait informasi yang relevan disampaikan sebelumnya, termasuk pendataan mengenai status tanah, dan usulan rencana pemindahan yang komprehensi dan spesifik untuk melaksanakan upaya perlindungan pada grup yang rentan; (c) jangka waktu yang wajar bagi publik untuk mengevaluasi, memberikan komentar tentang dan atau keberatan publik tentang rencana itu; (d) memberikan kesempatan dan upaya untuk memfasilitasi kepada warga terdampak untuk mengetahui dasar hukum, teknik dan saran lainnya tentang hak-hak mereka dan memberikan opsi lainnya; (e) mengadakan dengar pendapat yang memberikan kesempatan kepada warga terdampak dan kuasa hukum warga terdampak untuk memberikan kesempatan menentang keputusan penggusuran dan atau memberikan alternatif proposal untuk menyampaikan usulan dan tuntutan mereka dan prioritas pembangunan].

38. States should explore fully all possible alternatives to evictions. All

¹ A/HRC/4/18, Basic Principle And Guidelines On Development-Based Evictions And Displacement, Annex 1 of the report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living.

potentially affected groups and persons, including women, indigenous peoples and persons with disabilities, as well as others working on behalf of the affected, have the right to relevant information, full consultation and participation throughout the entire process, and to propose alternatives that authorities should duly consider. In the event that agreement cannot be reached on a proposed alternative among concerned parties, an independent body having constitutional authority, such as a court of law, tribunal or ombudsperson should mediate, arbitrate or adjudicate as appropriate.

[Negara harus mengeksplorasi seluruh alternative yang mungkin untuk penggusuran. Seluruh kelompok dan warga yang berpotensi terkena dampak, termasuk perempuan, masyarakat adat dan penyandang cacat, serta orang lain yang bekerja atas nama warga terdampak, memiliki hak untuk informasi yang relevan, konsultasi yang lengkap dan mengajak partisipasi pada setiap proses dan mengusulkan alternative yang berwenang harus sepatutnya dipertimbangkan. Apabila proposal alternative belum dapat disepakati bersama antara pihak terkait, institusi yang mandiri yang mempunyai kewenangan konstitusi seperti pengadilan, atau ombudsman harus melakukan mediasi, arbitrase atau mengadili sebagaimana perlu].

41. Any decision relating to evictions should be announced in writing in the local language to all individuals concerned, sufficiently in advance. The eviction notice should contain a detailed justification for the decision, including on: (a) absence of reasonable alternatives; (b) the full details of the proposed alternative; and (c) where no alternatives exist, all measures taken and foreseen to minimize the adverse effects of evictions. All final decisions should be subject to administrative and judicial review. Affected parties must also be guaranteed timely access to legal counsel, without payment if necessary.

[Setiap keputusan yang berkaitan dengan penggusuran harus disampaikan diawal dengan tertulis dalam bahasa yang dipahami oleh warga terdampak. Pemberitahuan penggusuran harus menyampaikan dasar hukum dan alasan penggusuran yang lengkap termasuk (a) tidak ada alternative yang dapat diterima; (b) rincian lengkap dari alternatif yang diusulkan; dan (c) apabila tidak ada usulan alternative. Semua kebijakan diputuskan untuk mengurangi efek negatif dari penggusuran. Semua keputusan harus tunduk pada administrasi dan peradilan. Warga terdampak dijamin mendapatkan akses yang tepat terhadap penasehat hukum, tanpa pembayaran jika diperlukan].

Bab V, Setelah Penggusuran: Pertolongan Langsung dan Relokasi. Nomor 58:

Persons, groups or communities affected by an eviction should not suffer detriment to their human rights, including their right to the progressive realization of the right to adequate housing. This applies equally to host communities at relocation sites.

[Warga, kelompok atau masyarakat yang terkena dampak penggusuran tidak boleh dilanggar hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk merealisasikan hak progresif atas perumahan yang layak. Hal ini berlaku sama untuk seluruh komunitas di lokasi relokasi].

Bab VI Pemulihan Hak Terhadap Penggusuran Paksa, Nomor:

59. All persons threatened with or subject to forced evictions have the right of access to timely remedy. Appropriate remedies include a fair hearing, access to legal counsel, legal aid, return, restitution, resettlement, rehabilitation and compensation, and should comply, as applicable, with the Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.

[Semua warga yang terancam penggusuran paksa atau korban atas penggusuran paksa mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya pada waktu yang tidak terlalu lama. Pemulihan hak yang tepat termasuk dengar pendapat yang adil, mendapatkan akses ke penasehat hukum, bantuan hukum, pemukiman kembali, rehabilitasi dan kompensasi, dan harus mematuhi sebagaimana diatur dalam Prinsip Dasar dan Pedoman Hak untuk Pemulihan Hak dan Pengembalian Seperti Keadaan Semula untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional].

60. When eviction is unavoidable, and necessary for the promotion of the general welfare, the State must provide or ensure fair and just compensation for any losses of personal, real or other property or goods, including rights or interests in property. Compensation should be provided for any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, such as: loss of life or limb; physical or mental harm; lost opportunities, including employment, education and social benefits; material damages and loss of earnings, including loss of earning potential; moral damage; and costs required for legal or expert assistance, medicine and medical services, and psychological and social services. Cash compensation should under no circumstances replace real compensation in the form of land and common property resources. Where land has been taken, the evicted should be compensated with land commensurate in quality, size and value, or better.

[Ketika penggusuran tidak dapat dihindari, dan perlu untuk promosi kesejahteraan umum, negara harus menyediakan atau memastikan kompensasi yang adil dan hanya untuk kerugian pribadi, properti atau barang nyata atau lainnya, termasuk hak-hak lainnya terkait langsung dengan properti. Kompensasi harus disediakan untuk setiap kerusakan dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan sebanding dengan gravitasi

dari pelanggaran dan keadaan masing-masing kasus, seperti: hilangnya nyawa atau anggota badan; bahaya fisik atau mental; kehilangan kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan manfaat sosial; kerusakan material dan hilangnya pendapatan, termasuk hilangnya potensi penghasilan; kerusakan moral dan biaya yang dibutuhkan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan pelayanan medis, dan layanan psikologis dan sosial. kompensasi tunai harus dalam keadaan mengganti kompensasi nyata dalam bentuk tanah dan properti umum sumber daya. Di mana lahan yang sudah diambil, penggusuran harus dikompensasi dengan tanah yang sepadan dalam kualitas, ukuran dan nilai, atau lebih baik].

61. All those evicted, irrespective of whether they hold title to their property, should be entitled to compensation for the loss, salvage and transport of their properties affected, including the original dwelling and land lost or damaged in the process. Consideration of the circumstances of each case shall allow for the provision of compensation for losses related to informal property, such as slum dwellings.

[Semua orang yang digusur, terlepas dari apakah mereka mempunyai hak atas tanah dan hak atas properti, mereka harus berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian, penyelamatan dan bantuan transportasi atas barang-barang mereka yang terkena dampak, termasuk tempat kediaman asal dan tanah yang hilang atau rusak dalam proses. Menimbang pada setiap kasus untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang berhubungan dengan informal properti seperti tempat tinggal kumuh].

63. To the extent not covered by assistance for relocation, the assessment of economic damage should take into consideration losses and costs, for example, of land plots and house structures; contents; infrastructure; mortgage or other debt penalties; interim housing; bureaucratic and legal fees; alternative housing; lost wages and incomes; lost educational opportunities; health and medical care; resettlement and transportation costs (especially in the case of relocation far from the source of livelihood). Where the home and land also provide a source of livelihood for the evicted inhabitants, impact and loss assessment must account for the value of business losses, equipment/inventory, livestock, land, trees/crops, and lost/decreased wages/income.

[Sejauh tidak tercakup oleh bantuan untuk relokasi, penilaian kerugian ekonomi (kerugian materi) harus memperhitungkan nilai kerugian dan biaya, misalnya, dari lahan dan struktur rumah; isi rumah; infrastruktur; hipotek atau denda utang lainnya; perumahan sementara; biaya birokrasi dan biaya bantuan hukum; perumahan alternatif; kehilangan upah dan pendapatan; kehilangan kesempatan pendidikan; kesehatan dan perawatan medis; pemukiman kembali dan biaya transportasi (terutama dalam kasus relokasi jauh dari sumber mata pencaharian). Di

mana rumah dan tanah juga menyediakan sumber penghidupan bagi penduduk digusur, dampak dan kerugian penilaian harus memperhitungkan nilai kerugian bisnis, perlengkapan/inventaris, ternak, tanah, pohon/tanaman, dan kehilangan/penurunan upah/pendapatan].

Apakah pada penggusuran di RW. 10, 11, dan 12 Bukit Duri, Kemen PUPR, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Selatan telah melaksanakan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal terpaksa dilakukan penggusuran paksa?

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka Yayasan Ciliwung Merdeka mengadakan penelitian mengenai Politik Hukum Rusunawa dalam Penggusuran Paksa Warga Bukit Duri. Studi Kasus: Rusunawa Rawa Bebek. Tujuan Yayasan Ciliwung Merdeka dalam melakukan penelitian ini sebagai obyektivasi terhadap data-data yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian Politik Hukum Rusunawa dalam Penggusuran Paksa Warga Bukit Duri. Studi Kasus: Rusunawa Rawa Bebek dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan data, menganjurkannya, memecahkannya kepada unit-unit yang terkawal, mensintesiskannya, mencari pola, mencari apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang akan disampaikan dalam penelitian ini (Bogdan & Biklen, 1982). Dalam penyelidikan kualitatif, penganalisisan data dilakukan secara jujur dan terbuka sepanjang proses penyelidikan. Proses penganalisisan data meliputi 3 tahap yaitu: (1) penyaringan data; (2) persembahan data; (3) penulisan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penulisan kesimpulan dan verifikasi, penelitian ini melakukan proses beberapa tahap seperti (a) meneliti hubungan antara data, (b) mengamati kesatuan melalui bukti yang menyokong dapatan, (c) mencari bukti yang tidak selaras dengan dapatan, mempertimbangkan perspektif alternatif, yaitu pemahaman yang diperoleh daripada kajian, menyemak silang dengan perspektif responden dan/atau rekan peneliti lain.

Para Peneliti mendapatkan data primer dari penghuni dan pengelola Rusunawa Rawa Bebek, Kelurahan Bukit Duri, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan warga terdampak penggusuran di Bukit Duri. Para Peneliti juga melakukan pendataan kepada para penyewa di Rusunawa Rawa Bebek.

Para Peneliti kemudian membandingkan keterangan yang diberikan oleh Lurah Bukit Duri di persidangan pembuktian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, Pengadilan Jakarta Pusat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok No. 262/PDT.G/PN-JKT-PST, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peneliti juga melakukan kunjungan langsung ke Rusunawa Rawa Bebek pada tanggal 6 Oktober 2016.

Hasil penelitian ini akan digunakan oleh Yayasan Ciliwung Merdeka untuk proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Di samping itu hasil penelitian juga akan digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Ilmu Perencanaan Kota, dan Ilmu Administrasi Pemerintahan yang sedang menempuh tahap akhir masa studinya.

Bab I berjudul Tinjauan Yuridis Relokasi Warga Bukit Duri ke Rumah Susun Sewa Rawa Bebek. Pada bab ini, Penulis membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rusun yaitu UU No. 20 Tahun 2011. Peneliti melihat berdasarkan aspek yuridis, apakah kebijakan relokasi warga Bukit Duri sudah sesuai dengan UU Rusun dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Bab II berjudul Proses Relokasi Warga Bukit Duri. Pada bab ini, Penulis menceritakan proses perpindahan warga Bukit Duri dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi sebagai penghuni Rusunawa Rawa Bebek? Bagaimana isi dari perjanjian rusunawa di Rawa Bebek? Hak-hak apa saja yang sudah dilanggar oleh pengelola rusunawa?

Bab III berjudul Data Penghuni Rumah Susun Sewa Rawa Bebek dan Daftar Korban Normalisasi di Bukit Duri. Bab III akan dijelaskan mengenai apakah para penghuni Rumah Susun Sewa Rawa Bebek merupakan warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung? Apakah para penghuni Rumah Susun Sewa Rawa Bebek mempunyai peta bidang yang diterbitkan oleh bidang Tata Kota Provinsi DKI Jakarta? Apakah data yang tertera mengenai peta bidang dengan nama pemilik peta bidang sesuai dengan nama yang tertera dalam unit Rumah Susun Sewa Rawa Bebek? Peneliti menggunakan data primer dalam menyampaikan informasi mengenai penghuni Rumah Susun Sewa Rawa Bebek. Data primer dalam Bab III diperoleh dari pengelola Rumah Susun Sewa Rawa

Bebek. Peneliti mendapatkan data primer ini pada tanggal 6 Oktober 2016 di Rumah Susun Sewa Rawa Bebek, Jl. Inspeksi Kanal Timur, Pulo Gebang, Cakung, RT. 05/RW.01, Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur.

Bab IV berjudul Data Penghuni Rumah Susun Sewa Rawa Bebek dari Lurah Bukit Duri. Bab ini membandingkan apakah para penghuni Rusunawa Rawa Bebek merupakan warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung? Apakah para penghuni Rusunawa Rawa Bebek mempunyai peta bidang yang diterbitkan oleh Bidang Tata Kota Provinsi DKI Jakarta? Apakah data yang tertera mengenai peta bidang dengan nama pemilik peta bidang sesuai dengan nama yang tertera dalam unit Rusunawa Rawa Bebek? Namun dalam bab ini, Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat oleh Lurah Bukit Duri. Peneliti mendapatkan data ini dari surat Lurah Bukit Duri yang disampaikan kepada Walikota Jakarta Selatan.

Bab V berjudul Kajian Jumlah Korban Normalisasi Kali Ciliwung dengan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Rusunawa Rawa Bebek. Berangkat dari data yang disampaikan oleh pihak pemerintah daerah selalu berubah-ubah maka Yayasan Ciliwung Merdeka mengadakan penelitian.

Untuk membandingkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Yayasan Ciliwung Merdeka meneliti lebih lanjut data-data para penerima rumah susun. Data para penerima Rumah Susun Sewa Rawa Bebek ini disampaikan oleh Lurah Bukit Duri kepada Walikota Jakarta Selatan. Data para penerima rumah susun ini kemudian dilampirkan sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2017, dan bukti di PTTUN Jakarta pada tanggal 20 Februari 2017. Dari data ini, Yayasan Ciliwung Merdeka menyandingkan data lainnya yang diperoleh dari pengelola unit Rumah Susun Sewa Rawa Bebek dan tagihan air di tiap-tiap unit Rumah Susun Sewa Rawa Bebek.

Bab VI berjudul Kerugian Keuangan Negara dari Peningkatan Jumlah Penerima Rusunawa Rawa Bebek. Jumlah peningkatan penerima rusunawa Rawa Bebek berdampak pada pembiayaan dari keuangan daerah. Pemprov DKI Jakarta mensubsidi pembayaran uang sewa di triwulan pertama dan subsidi harga sewa 50% dari harga sewa sarusun rusunawa untuk umum.

Bab VII berjudul Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan selalu mengatakan tanah-tanah warga tidak mendapatkan ganti rugi. Alasan pemprov dan pemkot untuk tidak memberikan ganti rugi karena tanah warga tanah negara. Dalam bab ini diulas apakah pernyataan pemprov dan pemkot sudah sesuai dengan perencanaan proyek?

Bab VIII Kesimpulan. Setelah mengkaji dan menguraikan hasil penelitiannya pada Bab I sampai Bab V, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penggusuran warga Bukit Duri, Pemprov lebih melihat pada angka-angka yang disampaikan oleh bawahannya. Angka-angka itu merepresentasikan jumlah warga yang sudah mau secara sukarela direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek. Meskipun angka-angka yang disampaikan oleh Pemkot Jakarta Selatan tidak akurat. Pertimbangan pada angka yang kedua adalah penggunaan besaran anggaran APBN yang belum terserap atau belum digunakan sampai akhir di tahun 2016.

Dengan pertimbangan pada angka-angka tersebut di atas, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melupakan tanggungjawabnya sebagai pejabat publik untuk melaksanakan dan mematuhi isi peraturan perundang-undangan, menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mensejahterakan masyarakat, dan menghormati serta menjamin hak-hak asasi warganya.

Bab I

Tinjauan Yuridis Relokasi Warga Bukit Duri Ke Rumah Susun Sewa Rawa Bebek

I. Pendahuluan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk memindahkan secara paksa warga Bukit Duri RW. 10, 11, dan 12 di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ke rumah susun sewa (rusunawa) di Rawa Bebek dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Pindahan ini dilakukan beberapa tahap di Bulan Agustus, September, dan Oktober 2016. Keputusan pemindahan secara paksa tanpa ada dasar hukum jelas telah melanggar prinsip utama Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum¹. Prinsip ini memberikan makna bahwa setiap kewenangan pejabat pemerintah dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik² (AUPB)³. Prinsip Indonesia sebagai Negara hukum ditegaskan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Mengacu pada prinsip hukum konstitusi menurut Bryce (1901) menjelaskan mengenai konstitusi tertulis⁴:

“The instrument in which a constitution is embodied proceeds from a source different from that whence spring other laws, is regulated in a different way, and exerts a sovereign force it is enacted not by the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body. When any of its provisions conflict with the

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 ayat (2) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: (a) peraturan perundang-undangan; dan (b) AUPB, Pasal 10 ayat (1) a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.” LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601. Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. asas kepastian hukum; 2. asas tertib penyelenggaraan negara; 3. asas kepentingan umum; 4. asas keterbukaan; 5. asas proporsionalitas; 6. asas profesionalitas; dan 7. asas akuntabilitas. LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI 3851.

³ Vera Wheni S. Soemarwi, Seminar Nasional Riset Multidisiplin (SNRM), 24 – 25 Maret 2017, Universitas Tarumanagara.

⁴ J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol. 1, Clarendon Press, Oxford, 1901 hal. 151.

provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way.”

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. Atas dasar logika demikian itulah Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya mewakili kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislative (*judicial review*) terhadap materi konstitusi, meskipun Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung⁵.

Prinsip negara berdasarkan pada hukum menekankan pada setiap kebijakan pejabat negara atau pejabat administrasi pemerintahan harus berlandaskan pada hukum. Gubernur selaku kepala daerah Provinsi DKI Jakarta dan pejabat administrasi pemerintah terikat pada prinsip negara hukum. Prinsip ini harus dijalankan dalam membuat setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Setiap KTUN harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk memindahkan secara paksa warga Bukit Duri wajib diputus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Sayangnya keputusan Gubernur DKI Jakarta ini dilaksanakan tanpa acuan hukum yang jelas. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai rumah susun akan kita bahas sekilas dalam penelitian ini.

II. Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rusunawa yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun⁶ [selanjutnya disingkat dengan UU Rusun]. Definisi rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal atau rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

⁵ Lihat kasus *Marbury versus Madison* (1803) 5-US, 1 Cranch, 137, dalam Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press Ltd., London, 1997, hal. 3. Dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*.

⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembar Negara Nomor 5252.

Merujuk pada UU Rusun yang dimaksud dengan warga yang diklasifikasikan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah apabila warga mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh unit satuan rumah susun (sarusun). Sedangkan yang dimaksud dengan MBR berdasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana yaitu masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah adalah kelompok sasaran keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum memiliki satuan rumah susun sederhana, belum pernah menerima subsidi satuan rumah susun sederhana, dengan berpenghasilan sampai dengan Rp 4.500.000,- per bulan.

Ditinjau dari klasifikasi MBR berdasarkan UU Rusun, maka korban penggusuran di wilayah pinggir Kali Ciliwung, khususnya warga Kelurahan Bukit Duri, tidak termasuk dalam klaksifikasi MBR sebagai prasyarat menghuni rusun berdasarkan UU Rusun. Karena para korban penggusuran sudah memiliki tanah dan rumah di pinggir Kali Ciliwung. Tanah dan rumah yang dimiliki oleh warga di pinggir Kali Ciliwung, khususnya di Kelurahan Bukit Duri RW. 10, 11, dan 12 merupakan tanah warga yang dimiliki secara turun temurun.⁷ Merujuk pada UU Rusun, semua warga sejauh masuk dalam klasifikasi MBR bisa menghuni rusunawa. UU Rusun tidak mengkhususkan hanya korban penggusuran yang boleh tinggal di rusunawa.

Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, Jani Malau, dalam sosialisasi relokasi warga RW. 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 di Aula Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menyampaikan “Adapun persyaratan untuk masyarakat yang menempati rusunawa yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah.”⁸

UU Rusun Pasal 53 ayat (1) Negara Republik Indonesia memberikan kemudahan kepada setiap orang agar dapat menyewa sarusun. UU Rusun tidak mengkhususkan pemilikan dan penyewaan sarusun hanya untuk warga korban penggusuran. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru mengalihkan subyek hukum yang boleh menikmati atau menyewa sarusun di rusunawa. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengalihkan subyek hukum penerima sarusun ini

⁷ Analisis Dampak Lingkungan Hidup Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Maret 2015. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT.

⁸ <http://sda.pu.go.id/pages/posts/Sosialisasi-Relokasi-Warga-RW-12-Kelurahan-Bukit-Duri-Sekitar-Kali-Ciliwung>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 18.41 WIB.

tidak memiliki dasar hukum. Kebijakan ini tidak dituangkan dalam sebuah keputusan tertulis tata usaha negara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga bulan Mei 2016 telah membangun 23 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai wilayah ibu kota. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, dari 23 rusunawa tersebut, 11 Rusunawa diantaranya telah dijadikan tempat hunian bagi warga yang terkena program relokasi akibat normalisasi sungai atau waduk⁹. 11 Rusunawa yang digunakan untuk korban penggusuran adalah (1) Rusunawa Marunda untuk korban penggusuran di Teluk Jakarta, Jakarta Utara dan sebagian warga Kalijodo; (2) Rusunawa Pinus Elok; (3) Rusunawa Pulo Gebang; (4) Rusunawa Cipinang Besar Selatan untuk korban penggusuran di RT. 11, 12 dan 15/RW. 10 Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan dan 74 KK di RW. 04, 05, dan 14, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur¹⁰; (5) Rusunawa Cakung; (6) Rusunawa Komarudin; (7) Rusunawa Daan Mogot; (8) Rusunawa Muara Baru, (9) Rusunawa Jatinegara Kaum; (10) Rusunawa Jatinegara Barat untuk korban penggusuran di Kampung Pulo, Jakarta Timur; (11) Rusunawa Rawa Bebek untuk korban penggusuran di (sebagian) RW. 10, 11, dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Sampai saat ini sekitar 18 rusunawa telah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu:

I. Rusunawa di wilayah Jakarta Utara.



Sumber peta dari <http://www.jakarta.go.id/jakv1/application/public/img/images/peta.jpg> diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 09.45 WIB.

⁹ Lenny Tristia Tambun, Hingga Saat ini, Pemprov DKI Telah Membangun 23 Rusunawa, 6 Mei 2016, <http://www.beritasatu.com/megapolitan/363611-hingga-saat-ini-pemprov-dki-telah-membangun-23-rusunawa.html>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 10.50 WIB.

¹⁰ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/05/mulai-pekan-depan-74-kk-warga-bidara-cina-pindah-ke-rusunawa-cibese> diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 09.29 WIB.

1. **Rusun Waduk Pluit (Muara Baru)**, Jl. Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Jumlah blok: 4 dan jumlah unit: 400. Rusunawa Muara Baru ini dibangun pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012.
2. **Rusun Penjaringan**, Jl. Tanah pasir, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jumlah blok: 17 dan jumlah unit: 1694. Rusun Penjaringan dibangun pada tahun 1986 dan selesai pada tahun 2002.
3. **Rusun Kapuk Muara**, Jl. SMP 122, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Enjaringan, Jakarta Utara. Jumlah blok: 6 dan jumlah unit: 700. Rusunawa Kapuk Muara dibangun pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007.
4. **Rusun Marunda**, Jl. Raya Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jumlah blok: 26 dan Jumlah unit: 2580. Rusunawa Marunda dibangun pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009.
5. **Rusun Sukapura**, Jl. Manunggal Juang, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Jumlah blok: 1, Jumlah unit: 100. Rusunawa ini dibangun pada tahun 1996.

II. Rusunawa di wilayah Jakarta Barat.



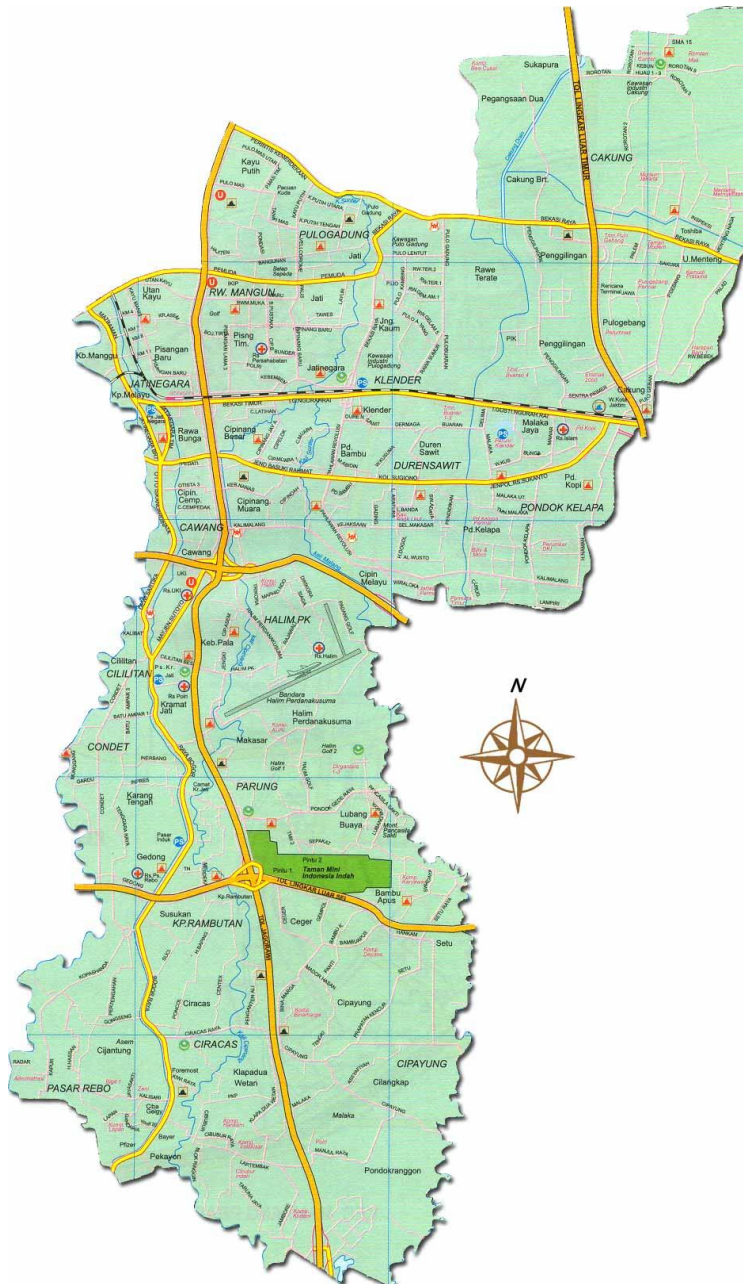
Sumber peta dari http://www.jakarta.go.id/web/uploads/files/Peta_Jakarta_Barat1.jpg, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 09 54 WIB.

6. **Rusun Tambora**, Jl. Angke Jaya, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat. Jumlah blok: 6 dan jumlah unit: 560. Rusunawa Tambora dibangun pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 2002.
7. **Rusun Flamboyan**, Jl. Flamboyan, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat. Jumlah blok: 6 dan jumlah unit: 560. Rusunawa Flamboyan dibangun pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 2002.
8. **Rusun Karang Anyar**, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat. Jumlah blok: 4 dan jumlah unit: 360. Rusunawa Karang Anyar dibangun pada tahun 1994.

III. Rusunawa di wilayah Jakarta Pusat.

9. **Rusun Jati Rawa Sari**, Jl. Mardani, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jumlah Blok: 2 dan jumlah unit: 180. Rusunawa Jati Rawa Sari dibangun pada tahun 2006.

IV. Rusunawa di wilayah Jakarta Timur.



Sumber peta dari http://www.jakarta.go.id/web/uploads/files/2_Jakarta_Timur_940x1614_167KB.jpg, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 09.57 WIB.

10. **Rusun Cipinang Besar Utara**, Jl. Swadaya Cipinang Pulo, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Jumlah blok: 4 dan Jumlah Unit: 152. Rusunawa Cipinang Besar Utara dibangun pada tahun 1986 dan selesai pada tahun 1987.

11. **Rusun Pondok Bambu**, Jl. Haji Dogol, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumlah blok: 3 dan jumlah unit: 200. Rusunawa Pondok Bambu dibangun pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006.
12. **Rusun Cipinang Muara**, Jl. Cipinang Muara II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumlah blok: 3 dan jumlah unit: 230. Rusunawa Cipinang Muara dibangun pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2003.
13. **Rusun Pulo Jahe**, Jl. Rawa Buntu, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Jumlah blok: 6 dan jumlah unit: 96. Rusunawa Pulo Jahe dibangun pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2006.
14. **Rusun Tipar Cakung**, Jl. Tipar, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Jumlah blok: 10 dan jumlah unit: 1000. Rusunawa Tipar Cakung dibangun pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004.
15. **Rusun Pinus Elok**, Jl. Kompleks Aneka Elok, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Jumlah blok: 8 dan jumlah unit: 800. Rusunawa Pinus Elok dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009.
16. **Rusun Cakung Barat**, Jl. Tipar, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Jumlah blok: 4 dan jumlah unit: 300. Rusunawa Cakung Barat dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009.
17. **Rusun Pulo Gebang**, Jl. Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Jumlah blok: 4 dan jumlah unit: 400. Rusunawa Pulo Gebang dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009.
18. **Rusun Jatinegara Barat**, Jl. Jatinegara Barat No.142, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Jumlah blok 2 dan jumlah unit : 1400. Rusunawa Jatinegara Barat dibangun pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2014¹¹.

Rusunawa Rawa Bebek yang berlokasi di Jl. Inspeksi Kanal Timur RT. 5/RW. 1, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Rusunawa ini dibangun di kawasan seluas 21 hektar dan akan dibangun 6 (enam) tower dengan ketinggian

¹¹ <http://dpgpjakarta.com/index.php/data/data-lokasi-rusunawa-dki-jakarta>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 10.12 WIB.

enam lantai. Setiap tower terdiri dari 125 unit sarusun. Rusunawa ini dibangun oleh Satuan Kerja Penyedia Rusun Ditjen Penyediaan Perumahan dan kontraktor pelaksana PT. Waskita Karya Persero (Tbk)¹². Sumber pembiayaan pembangunan Rusunawa Rawa Bebek diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 98 miliar.

Pada awal perencanaan rusunawa ini akan digunakan untuk para pekerja yang bekerja di wilayah kawasan industri Pulo Gadung dan disekitar wilayah Jakarta Timur dan sebagian lagi untuk MBR di wilayah Jakarta. Namun ditahap akhir penyelesaian pembangunan, yaitu pada akhir tahun 2015, terjadi perubahan kebijakan penggunaan Rusunawa Rawa Bebek. Pemprov DKI Jakarta mengubah peruntukan Rusunawa Rawa Bebek bagi warga korban penggusuran Normalisasi Kali Ciliwung di wilayah RW. 10, 11, dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Apakah pengalihan tujuan dibangunnya rusunawa merupakan penyimpangan hukum administrasi pemerintahan? Karena UU Rusun memberikan kesempatan kepada setiap orang khususnya yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki atau menyewa rusun.

III. Analisis Yuridis Kebijakan Pemberian Hak Sewa Rusunawa Rawa Bebek Kepada Korban Program Normalisasi Kali Ciliwung

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 5¹³, setiap pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan hukum dan kebijakan faktual diwajibkan berlandaskan pada (1) asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip utama dan fundamental karena setiap penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum dalam setiap keputusan dan tindakannya. Asas legalitas ini harus dikaitkan dengan bentuk kedaulatan Republik Indonesia yaitu negara hukum. Sehingga pedoman pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh Pemerintah Indonesia adalah hukum. (2) Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (3) AUPB¹⁴. AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah (1) asas

¹² Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, pada hari Rabu 16 Desember 2015, <http://pu.go.id/berita/10824/Kementerian-PUPR-Siapkan-Fasilitas-Lengkap-di-Rusunawa-Rawa-bebek/>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 10.23 WIB.

¹³ *Op cit* UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 5 “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: (1) asas legalitas; (2) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (3) asas-asas umum pemerintahan yang baik.

¹⁴ *Op cit* UU No. 20/2011, Pasal 5.

kepastian hukum¹⁵; (2) asas kemanfaatan¹⁶; (3) asas ketidakberpihakan¹⁷; (4) asas kecermatan¹⁸; (5) asas tidak menyalahgunakan kewenangan¹⁹; (6) asas keterbukaan²⁰; (7) asas kepentingan umum²¹; dan (8) asas pelayanan yang baik²². Di luar asas-asas tersebut bisa diterapkan oleh pejabat pemerintah bila penerapan asas tersebut dapat mendukung tujuan pelayanan yang baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. **Keputusan pejabat dapat dikatakan merupakan keputusan yang sah apabila (1) keputusan itu dibuat berdasarkan AUPB, (2) sesuai prosedur pembentukannya dan (3) antara substansi dalam keputusan harus sesuai dengan objek keputusan.**

Salah satu **ciri-ciri negara hukum, negara mengakui, melindungi, menjamin dan memberikan pemenuhan hak asasi warga negaranya.** Perlindungan dan jaminan hak-hak asasi warga Indonesia diatur dalam UUD NRI

¹⁵ *Op cit* UU No. 30/2014, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

¹⁶ *Ibid*, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, “manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

¹⁷ *Ibid*, huruf c, “asas yang mewajibkan badan/pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

¹⁸ *Ibid*, huruf d, “asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

¹⁹ *Ibid*, huruf e, “asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”

²⁰ *Ibid*, huruf f, “asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

²¹ *Ibid*, huruf g, “asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.”

²² *Ibid*, huruf h, “asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1945 Pasal 28 A²³, 28 D²⁴, 28 G²⁵, 28 H ayat (4)²⁶, 28 G ayat (1)²⁷ jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40²⁸. Penelitian ini akan mencermati hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, persamaan di hadapan hukum, dan berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Yang dimaksud oleh Peneliti dalam penelitian ini hak milik pribadi berupa tanah dan bangunan. Hak milik berupa tanah dan bangunan rumah masyarakat Indonesia tidak boleh diambil pejabat pemerintah secara sewenang-wenang misalnya melalui penggusuran paksa. Hak milik pribadi atas tanah dan bangunan masyarakat tidak boleh diputuskan secara sepihak untuk diganti dengan hak sewa atas sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Penjaminan dan pemenuhan hak-hak asasi warga merupakan tugas utama pejabat pemerintah. Bentuk nyata perlindungan hak asasi warga dalam *good governance* adalah meletakkan masyarakat sebagai subyek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian masyarakat sudah tidak boleh lagi diletakkan sebagai objek kebijakan. Bila masyarakat diletakkan sebagai objek kebijakan maka kecenderungan tindakan para pejabat pemerintah adalah memperlakukan masyarakat secara semena-mena dan melawan hukum.

Prinsip utama dan mendasar dalam penerapan *good governance* dalam pengelolaan kota adalah penerapan asas partisipasi warga kota. Cara penerapan asas partisipasi ini adalah dalam setiap perencanaan dan perumusan keputusan hukum dan faktual masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Masyarakat diwajibkan untuk ikut bersama dalam perumusan dan perencanaan. Pelibatan

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

²⁴ *Ibid*, Pasal 28 D “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.”

²⁵ *Ibid*, Pasal 28 G “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

²⁶ *Ibid*, Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

²⁷ *Ibid*, Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Pasal 40 “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

masyarakat dilakukan sejak awal sampai pada pelaksanaan dan pemantauan keputusan hukum dan faktual²⁹.

The United Nations Commission on Human Rights merumuskan *good governance* adalah

“proses di mana lembaga-lembaga publik melakukan urusan publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia dengan cara yang pada dasarnya bebas dari penyalahgunaan dan korupsi dan dengan memperhatikan aturan hukum”³⁰.

Tolok ukur dalam penilaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sejauh mana keputusan penyelenggara pemerintah dapat memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak manusia: hak sipil, hak budaya, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak atas kesehatan, hak atas perumahan yang layak, makanan yang cukup, kualitas pendidikan, peradilan yang adil, keamanan pribadi dan jaminan kepastian atas hak milik.

Apakah keputusan Pemprov DKI Jakarta sudah memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur dalam pengelolaan pemerintahan yang baik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini akan mengkaji tindakan faktual Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria *good governance* berdasarkan *The United Nations Commission on Human Rights*.

Keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan warga Bukit Duri sebagai korban penggusuran ke Rusunawa Rawa Bebek merupakan kebijakan publik. Kebijakan ini disampaikan oleh pejabat publik, Gubernur DKI Jakarta, yang mendapatkan mandat dari masyarakat Jakarta selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2012 – 2017. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta ini dijalankan oleh pejabat administrasi negara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keputusan ini mengikat bagi korban penggusuran Normalisasi Kali Ciliwung khususnya di sebagian warga RW. 10, 11, dan 12 Kelurahan Bukit Duri, Jakarta

²⁹ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) UU No. 30/2014, “warga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.”

³⁰ United Nations Commission on Human Rights, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx>, diunduh pada 6 Februari 2017, mendefinisikan “*good governance is the process whereby public institutions conduct public affairs, manage public resources and guarantee the realization of human rights in a manner essentially free of abuse and corruption, and with due regard for the rule of law*”.

Selatan. Kebijakan publik menurut James E. Anderson³¹ merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan itu harus diikuti dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara lainnya. Kebijakan itu dibuat untuk memecahkan suatu masalah publik. Anderson³² mengklasifikasikan kebijakan dalam 2 kategori. Kategori pertama, kebijakan bersifat negatif. Kategori kebijakan ini merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kategori kedua, kebijakan bersifat positif. Persyaratan kebijakan positif diatur lebih detail seperti: (1) kebijakan berorientasi pada *problem solving* (memecahkan masalah); (2) kebijakan ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan (3) kebijakan ini harus memaksa (*otoritatif*).

Merujuk pada pendapat Anderson, keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memindahkan warga Bukit Duri ke rusunawa mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah mengalihkan bentuk ganti rugi warga korban penggusuran normalisasi Kali Ciliwung, dari bentuk ganti rugi berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum³³ (UU Pengadaan Tanah) jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum³⁴ (Perpres No. 71/ 2012), menjadi bentuk ganti rugi hunian sementara yaitu hak sewa di unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Meskipun kebijakan ini menuai banyak kritikan dari masyarakat dan penolakan keras dari warga Bukit Duri, tetapi Pemprov DKI Jakarta seakan tidak peduli dengan penolakan dan kritik tersebut.

Keputusan pemberian hak sewa atas sarusun di Rusunawa Rawa Bebek disampaikan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada warga pada saat sosialisasi tanggal 14 Maret 2016³⁵, 19 April 2016³⁶, 25 April 2016³⁷.

³¹ James E. Anderson, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, cet: ke-3 hal. 12.

³² *Ibid.* hal 12 – 13.

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara No. 5280, disahkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 14 Januari 2012, diundangkan tanggal 14 Januari 2012.

³⁴ Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, ditetapkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 7 Agustus 2012, diundangkan tanggal 8 Agustus 2012.

³⁵ Surat tertanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor: 341/-1.796.2, hal: undangan, lampiran: Daftar Undangan, yang ditandatangani oleh Walikota Administrasi Jakarta Selatan, "Sosialisasi relokasi warga Bukit Duri RW. 10, 11, 12. Pada sosialisasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bahwa warga tidak akan mendapatkan ganti rugi. Warga diminta untuk segera menghancurkan rumah-rumah mereka dan segera pindah ke rumah

Pada kedua sosialisasi tanggal 19 April 2016 dan 25 April 2016, Peneliti hadir dalam acara sosialisasi tersebut. Pada saat sosialisasi seluruh warga menolak keputusan: 1) tanah warga dikatakan tanah negara; 2) terhadap tanah dan bangunan warga tidak diberikan ganti rugi; dan 3) sebagai gantinya warga diberikan hak sewa atas sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Penolakan warga saat itu tidak dihiraukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemerintah tetap memindahkan warga ke Rusunawa Rawa Bebek. Meskipun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah pernah bersepakat dengan warga Bukit Duri yang terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung untuk memberikan ganti kerugian bahkan ganti untung dalam bentuk semacam kampung susun/kampung deret untuk warga setempat.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2016/PTUN-JKT dikatakan bahwa:

Janji Ganti Untung untuk membangun Kampung Susun tidak dapat ditarik secara sepihak (vide Putusan PTUN halaman 124 dan 125)

“...Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ... pernah menjanjikan akan memberikan ganti kerugian bahkan ganti untung kepada warga Kelurahan Bukit Duri terhadap tanah dan bangunan tempat tinggal mereka terkait adanya proyek normalisasi Kali Ciliwung, dan masyarakat Bukit Duri sebelumnya pada saat kampanye calon Gubernur DKI Jakarta atau 2 hari setelah pelantikan Gubernur DKI

susun sewa di Rawa bebek. Warga tidak berhak mendapatkan ganti rugi karena dikatakan tanah-tanah warga merupakan tanah negara.”

³⁶ Surat tertanggal 19 April 2016 dengan Nomor: 571/-1.796.2, hal: undangan, lampiran: -, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, “Surat ini pada pokoknya menyatakan mengundang warga untuk mengikuti acara sosialisasi relokasi warga Kelurahan Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung. Isi sosialisasi adalah meminta warga segera menghancurkan bangunan rumahnya dan segera pindah ke Rumah Susun Sewa di Rawa bebek. Meskipun warga tidak menyetujui kebijakan KemenPUPR-BBWSCC, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang meminta warga menghancurkan rumah mereka, pemerintah mengatakan tidak ada ganti rugi karena tanah warga tanah negara, warga diminta segera pindah ke Rawa bebek. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mengindahkan aspirasi warga terdampak dalam hal ini warga Bukit Duri sebagai korban langsung dari pengusuran Normalisasi Kali Ciliwung.”

³⁷ Surat tertanggal 25 April 2016 dengan Nomor: 597/-1.796.2, hal: undangan, lampiran: - , kepada: Sandiawan Sumardi (salah satu korban pengusuran), yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, “mengundang Sandiawan Sumardi (salah satu korban pengusuran) untuk mengikuti acara sosialisasi Relokasi warga kelurahan Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung ke Rusunawa Rawa bebek.”

Jakarta yang menjabat pada saat itu datang ke kelurahan Bukit Duri dengan memberikan harapan akan dibangun semacam kampung susun/kampung deret untuk warga setempat.”

*“... menanggapi pengharapan yang wajar dimana jika **suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah oleh karenanya kepada Para Penggugat layak untuk diberikan tuntutannya dan gugatannya haruslah dikabulkan.**”*

Keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan warga korban penggusuran ke rusunawa pun bukan dalam rangka memecahkan persoalan tata kota tetapi justru menimbulkan persoalan baru yaitu persoalan meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya daya kemampuan ekonomi warga rusunawa. Dari hasil penelitian IDEAS yang disampaikan pada Diskusi Publik “Memaknai Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Menjamin Hak-Hak Warga Kota” di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta³⁸,

“... peningkatan pengeluaran yang signifikan ini justru berhadapan dengan kenyataan pahit turunnya penghasilan warga di rusun. Bila pra penggusuran 35% responden mampu mendapat penghasilan diatas Rp 3 juta per bulan, maka pasca tinggal di rusun hanya tersisa 24% responden yang penghasilannya diatas Rp 3 juta per bulan. Temuan ini konsisten dengan perubahan status pekerjaan responden yang semula 29% memiliki usaha mandiri, kini menurun menjadi 21%. Di saat yang sama, responden yang menjadi buruh meningkat dari 27% menjadi 30%, dan bahkan pengangguran meningkat 8%.

Hilangnya sumber penghidupan menjadikan warga korban penggusuran hilang kemandiriannya dan menjadi lebih bergantung pada bantuan. Namun pasca tergusur justru semakin sedikit warga yang memiliki jaminan sosial. Sebanyak 74% responden tidak memiliki Kartu Jakarta Sehat dan 65% responden tidak memiliki Kartu Jakarta Pintar padahal mempunyai anak usia sekolah. Bila semula 52% responden menerima raskin di lokasi awal, di rusun hanya tersisa 6% responden yang menerima raskin.”

³⁸ Nuri Ikawati, IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies), Diskusi Publik, “Memaknai Indonesia sebagai Negara Hukum Dalam Menjamin Hak-hak Warga Kota” Jumat, 10 Februari 2017 di LBH Jakarta.

Bila kita melihat pada klasifikasi kebijakan bersifat positif, maka keputusan Pemprov DKI Jakarta bukan termasuk klasifikasi positif yang baik. Karena kebijakan itu bukan berorientasi pada pemecahan masalah justru menimbulkan masalah baru. Kebijakan ini tidak diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dipaksakan untuk dijalankan oleh seluruh perangkat Pemprov DKI Jakarta.

Kesimpulan tinjauan yuridis atas kebijakan pemberian hak sewa Rusunawa Rawa Bebek kepada warga Bukit Duri adalah (1) kebijakan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan positif karena tidak berdasarkan pada hukum dan menimbulkan masalah sosial ekonomi baru bagi warga korban penggusuran; (2) kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan; (3) kebijakan ini bertentangan dengan hak-hak asasi warga Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28A, 28D, 28G, 28H ayat (4), 28G ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40.

IV. Kesimpulan

Tindakan pejabat pemerintah yang tidak menghiraukan aspirasi warga yang tidak mau dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek telah melanggar prinsip utama dalam pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu asas partisipasi.



Sumber foto: Vera, pada saat hadir dalam pertemuan sosialisasi tanggal 14 Maret 2016 di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Bukit Duri.

Kebijakan pengalihan bentuk ganti rugi yang menyimpang dari UU No. 2 Tahun 2012 jo Perpres No. 71 Tahun 2012 dan Amdal Proyek Normalisasi Kali Ciliwung merupakan sebuah kebijakan yang melanggar hukum dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pejabat pemerintah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dalam *good governance* dengan alasan demi kemanfaatan umum. Karena pertimbangan kemanfaatan umum atas suatu keputusan dan/atau tindakan tidak boleh melanggar norma-norma agama, sosial dan kesusilaan³⁹. Kemanfaatan umum harus dijalankan dan memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan seluruh warga⁴⁰.

³⁹ Vera Wheni S. Soemarwi, S.H., LL.M., Seminar Nasional Riset Multidisiplin (SNRM), 24 – 25 Maret 2017, Universitas Tarumanagara.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 9 ayat (4) UU No. 30/2014.

Bab II

Proses Relokasi Warga Bukit Duri

I. Pendahuluan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta memindahkan korban penggusuran paksa di Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik khususnya asas partisipasi⁴¹ dan asas kepastian hukum. Proses pemindahan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan yang tidak transparan mengenai berapa jumlah korban penggusuran yang sudah bersedia dan tinggal di Rusunawa Rawa Bebek. Perbuatan Pemkot Jakarta Selatan telah melanggar asas keterbukaan. Sejak sosialisasi terakhir tanggal 7 Juni 2016, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta mengatakan “begitu Rusunawa Rawa Bebek selesai dibangun, warga akan segera dipindahkan ke rusunawa. “

Keputusan Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga Bukit Duri ke rusunawa tidak populis dan banyak warga yang tidak menyetujuinya. Sehingga Pemkot Jakarta Selatan harus bekerja keras untuk membujuk warga Bukit Duri agar mau segera direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek. Upaya bujuk rayu dengan berbagai cara dilakukan oleh pihak Kelurahan Bukit Duri. Beberapa pegawai Kelurahan, salah satunya Bapak Umar, secara aktif membujuk, mendatangi dan menghubungi warga Bukit Duri agar mau segera mengisi formulir pendaftaran rusunawa. Upaya pihak-pihak kelurahan ini seperti seorang marketing rusunawa. Melihat gencarnya karyawan kelurahan dan ‘kaki-tangan’ kelurahan, timbul anekdot dikalangan masyarakat terhadap bujuk rayu mereka. Para penjaja rusunawa disebut sebagai ‘broker rusunawa’.

Bujuk rayu pihak kelurahan dilakukan tanpa disertai informasi yang jelas dan transparan terhadap hak dan kewajiban para warga. Hak dan kewajiban sebagai penghuni rusunawa wajib disampaikan sebelum mereka mengisi formulir rusunawa. Sehingga mereka mengetahui akibat hukum bila mereka tinggal di Rusunawa Rawa Bebek. Apakah ada hak-hak keperdataan lainnya yang akan hilang bila warga menerima rusunawa dan pindah ke Rusunawa Rawa Bebek? Warga yang tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dialami oleh warga bila warga menyetujui pindah ke rusunawa? Warga hanya diminta untuk segera mengisi formulir permohonan rusunawa. Warga didesak dan dibujuk oleh karyawan kelurahan dan Ketua RT setempat. Ketua RT yang berperan aktif dalam menggiring warga agar mau pindah ke rusunawa adalah Ketua RT. 05, Jack;

⁴¹ Putusan PTUN Perkara No. 205/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 5 Januari 2017.

Ketua RT. 07, Husen; Ketua RT. 09, Dadat; dan Ketua RT. 10, Embek di RW. 12. Ketua RW. 12, Muhammad-pun berperan aktif membujuk para warganya untuk segera pindah ke Rusunawa Rawa Bebek. Saran ketua RW. 12 “percuma lawan pemerintah tidak mungkin menang. Dari pada tidak dapat apa-apa lebih baik ambil rusunawa.” Bahkan mereka membawa data-data warganya ke Kelurahan Bukit Duri dan mendaftarkan warganya untuk mendapatkan rusunawa. Hampir 85% dari total korban atau sebanyak 4.387 warga tidak mengetahui dampak positif dan negatif dari menerima rusunawa.

II. Persyaratan Formulir Pengajuan Rusunawa

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membuat sebuah formulir pengajuan rusunawa. Formulir ini merupakan formulir yang baku digunakan oleh setiap orang yang hendak tinggal di rusunawa milik pemerintah. Dinas Perumahan membuat persyaratan yang cukup ketat bagi orang yang hendak tinggal di rusunawa. Persyaratan ini harus dipenuhi sebelum warga mengisi formulir. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Warga Negara Indonesia. Untuk menunjukkan warga bisa masuk atau tidak sebagai penghuni rusunawa di Jakarta, warga harus memiliki:
 - a. KTP DKI Jakarta;
 - b. Surat keterangan penghasilan;
 - c. Kartu keluarga;
 - d. Pas foto 3x4 (2 lembar);
 - e. Surat keterangan belum memiliki rumah (PM1);
 - f. Surat nikah;
2. Bersedia membuka rekening tabungan di Bank DKI di capem Jatibaru;
3. Membuat surat permohonan mendapatkan hak sewa rusunawa;
4. Membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa; dan
5. Membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan melaksanakan tata tertib penghunian/penyewaan rusunawa⁴².

⁴² Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Formulir rusunawa ini baku digunakan untuk seluruh warga Jakarta yang akan menempati rusun milik pemerintah. Formulir ini juga digunakan di Kampung Pulo dan Bukit Duri.



FORMULIR PERMOHONAN UNIT HUNIAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA)

NO. REG	
PARAF	

Kepada Yth. :

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
Komplek Dinas Teknis, Jl. Taman Jati Baru No.1 Tanah Abang
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal lahir :
3. No. KTP :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Nomor Telepon/HP :
7. Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan sewa Unit Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Dan untuk melengkapi permohonan ini Saya lampirkan syarat-syarat permohonan antara lain :

1. Foto copy KTP DKI Jakarta (yang masih berlaku);
2. Foto copy KK;
3. Pas photo berwarna 3 X 4 (4 lembar);
4. Pas photo berwarna 4 X 6 (1 lembar);
5. Surat keterangan belum memiliki rumah dari Kelurahan (PM1);
6. Surat keterangan penghasilan/slip gaji;
7. Materai Rp. 6.000,- 6 buah;
8. Surat Keterangan belum menikah dari RT dan RW setempat;
9. Surat Keterangan dari atasan langsung tempat bertugas/bekerja;
10. Membuka rekening di Bank DKI Cabang Jatibaru dan menyetorkan uang jaminan sewa sebesar 3 kali uang sewa perbulan (apabila permohonan disetujui);
11. Bersedia mengikuti persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.

Mengetahui
Penanggung Jawab Lokasi
Rusunawa.....

Jakarta,
Pemohon

Sumber foto: Vera dari pengelola rusunawa.

Persyaratan pada Nomor 1 huruf (b) dalam kondisi umum, Pemohon wajib melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah bekerja dan berapa penghasilan perbulannya. Persyaratan tersebut seharusnya wajib diikuti oleh warga Bukit Duri. Namun persyaratan pada Nomor 1 huruf (b)

diabaikan oleh pengelola rusunawa. 10% korban penggusuran yang mau direlokasi bekerja sebagai karyawan sehingga ia bisa menyerahkan persyaratan surat keterangan penghasilan.

Persyaratan pada Nomor 1 huruf (e) dalam kondisi umum dibuat oleh kelurahan setempat dimana Pemohon rusunawa berada. Atas permintaan Pemohon, kelurahan akan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon belum memiliki rumah tinggal. Dalam keterangan itu pula Lurah setempat memberikan keterangan apakah Pemohon sudah berkeluarga atau belum.

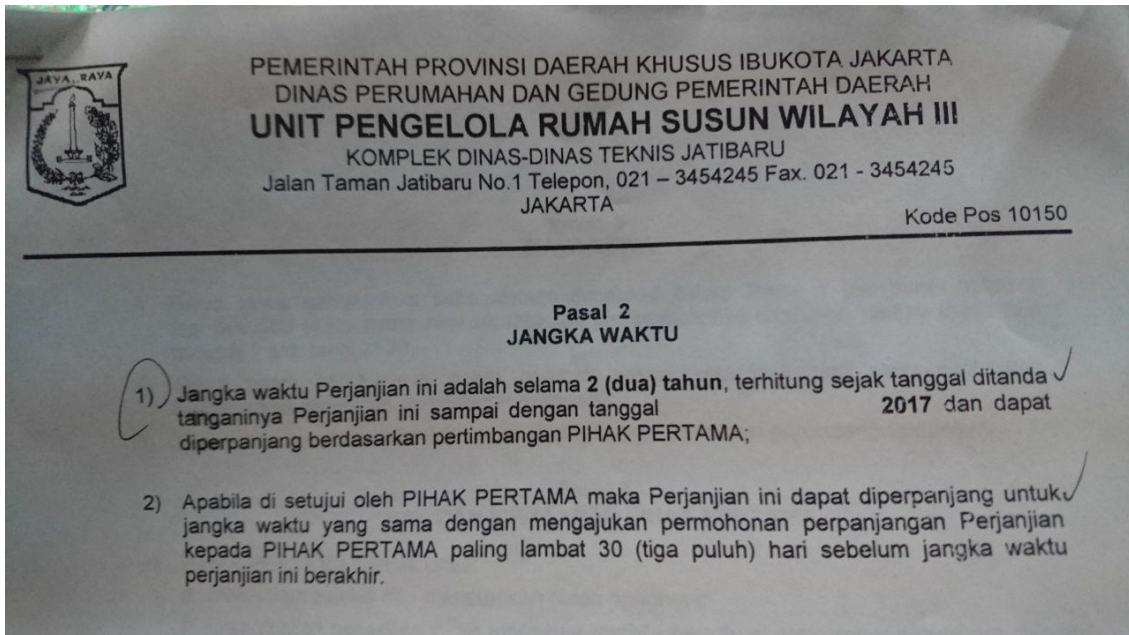
Persyaratan surat PM 1 dari kelurahan tidak bisa diterapkan di lingkungan korban penggusuran di Bukit Duri. Karena para korban penggusuran sudah memiliki rumah dan tanah. Rumah dan tanah mereka wajib diberikan ganti rugi yang memadai. Ganti rugi yang wajib diberikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 adalah (1) ganti rugi berupa uang; (2) ganti rugi berupa lahan baru; (3) ganti rugi berupa pemukiman baru; (4) ganti rugi berupa saham; dan (5) ganti rugi lainnya sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak. Lurah Bukit Duri, Mardi Younce dalam keterangannya ketika bersaksi di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa ia tidak mengeluarkan surat keterangan PM 1. Mardi Younce tidak mengetahui mengenai formulir, pengisian formulir, dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh warga Bukit Duri.

Formulir permohonan yang diisi oleh warga Kampung Pulo hampir sama dengan syarat-syarat di atas. Namun persyaratan dalam formulir yang diisi oleh warga Kampung Pulo mencantumkan surat pernyataan bahwa warga Kampung Pulo tidak pernah memiliki rumah. Dampak dari surat pernyataan ini adalah hilangnya hak keperdataan warga Kampung Pulo untuk menuntut ganti rugi atas tanah dan bangunan miliknya yang telah digunakan untuk Program Normalisasi Kali Ciliwung.

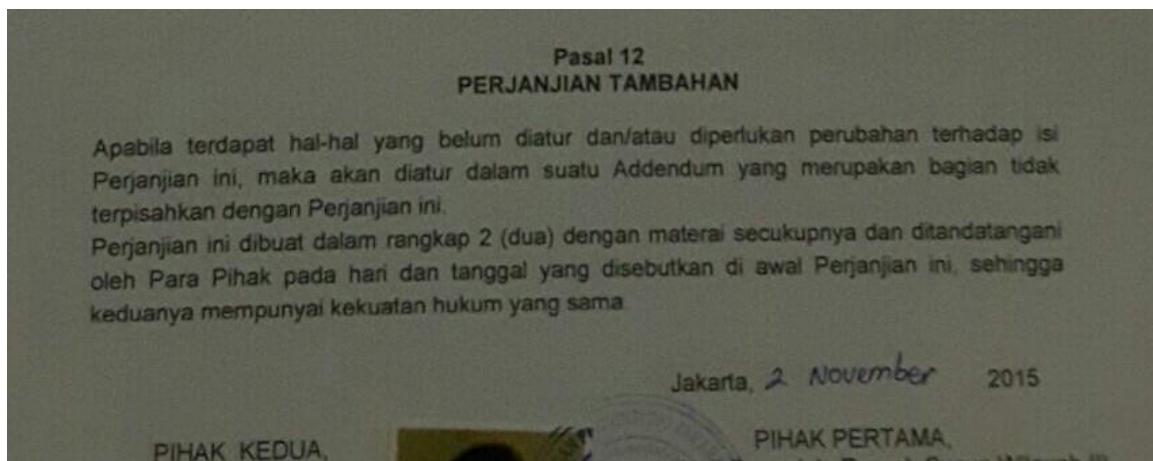
Persyaratan lainnya yang sangat memberatkan dan menghilangkan hak-hak keperdataan warga Bukit Duri adalah persyaratan pada Nomor 4. Persyaratan ini berupa kesediaan dan keharusan menandatangani surat perjanjian sewa bagi warga Bukit Duri dengan pihak pengelola rusunawa. Setelah warga korban penggusuran pindah ke rusunawa, mereka akan dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Bagi Penghuni Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (perjanjian rusunawa). Narasumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa isi dari perjanjian rusunawa Pasal 2⁴³ mengatur mengenai Jangka Waktu Sewa hanya dalam waktu 2 tahun. Perjanjian ini bisa diperpanjang bila disetujui oleh pengelola. Perpanjangan hanya dapat dilakukan untuk waktu 2 (dua) tahun.

⁴³ Jangka waktu perjanjian ini 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian (1 November 2016) ini sampai dengan tanggal 1 November 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama (pengelola rusunawa).

Artinya warga Bukit Duri, korban pengusuran normalisasi Kali Ciliwung hanya boleh tinggal di Rusunawa Rawa Bebek selama 4 tahun. Itupun kalau warga mampu membayar biaya bulanan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak. Warga juga diminta untuk menempatkan 3 bulan dimuka biaya sewa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Uang ini dianggap sebagai uang deposit. Uang ini akan digunakan untuk pembayaran tunggakan bila warga menunggak membayar sewa. Uang ini wajib disetorkan ke rekening Bank DKI setelah mereka masuk ke rusunawa.



Sumber Foto: Yayasan Ciliwung Merdeka.

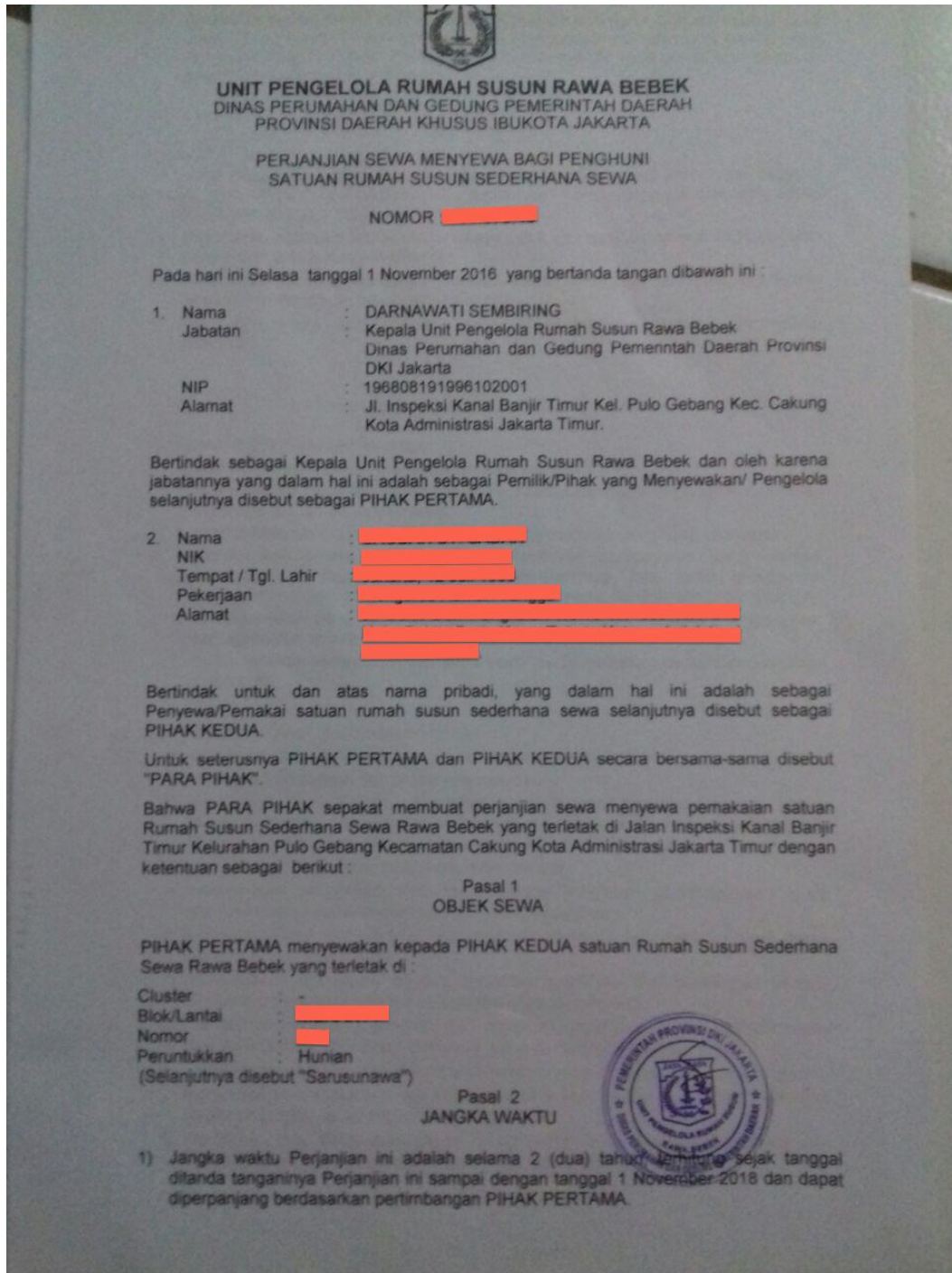


Sumber Foto: Yayasan Ciliwung Merdeka.

Narasumber yang kami temui mengatakan memang warga Bukit Duri diberi keringanan untuk tidak membayar sewa selama 3 bulan. Sedangkan tagihan air, listrik, dan tagihan-tagihan lainnya tetap harus dibayarkan setiap bulannya.

Setelah 3 bulan warga harus membayar sewa Rusunawa Rawa Bebek sebesar Rp. 300.000,-. Warga harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pengelola rusunawa. Beberapa peraturan dirasa memberatkan warga seperti warga yang tidak mampu membayar selama 3 bulan maka unit sarusun warga akan disegel dan warga tidak bisa tinggal di unit itu.

Perjanjian rusunawa dibuat dua rangkap. Satu rangkap seharusnya untuk pengelola Rusunawa Rawa Bebek dan rangkap kedua seharusnya untuk penyewa sarusun Rusunawa Rawa Bebek. Narasumber kami menuturkan bahwa seluruh penghuni Rusunawa Rawa Bebek yang berasal dari Bukit Duri korban penggusuran Normalisasi Kali Ciliwung tidak diberikan rangkap yang kedua. Bahkan para penghuni tidak mengetahui apa isi perjanjian sewa itu. Apa hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian sewa itu?



Sumber foto: Vera.

Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip asas keterbukaan pada pejabat pemerintah. Tindakan pengelola yang tidak transparan itu melanggar prinsip kesamaan hak dihadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak konstitusi yang sama dan dilindungi oleh negara. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Perbedaan perlakuan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta selaku dinas teknis yang bertanggungjawab untuk mengelola rusunawa di Jakarta. Warga Kampung Pulo yang merupakan korban penggusuran normalisasi Kali Ciliwung saat ini tinggal di Rusunawa Jatinegara Barat, mendapatkan rangkap kedua dari perjanjian rusunawa. Para penghuni Rusunawa Jatinegara Barat seluruhnya memiliki perjanjian sewanya. Mereka mengetahui hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian rusunawa. Berbeda dengan warga Bukit Duri yang tinggal di Rusunawa Rawa Bebek. Meskipun kedua rusunawa itu dibawah pengelolaan Dinas Perumahan dan Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MEKANISME PENGHUNIAN



Sumber data dari <http://dpggjakarta.com/index.php/pelayanan/proses-penghunian-rusunawa>, diunduh tanggal 30 Maret 2017 jam 15.03 WIB.

III. Bujuk Rayu Rusunawa Rawa Bebek

Demi menarik warga Bukit Duri agar mau mendaftar ke Rusunawa Rawa Bebek, Pemkot Jakarta Selatan bersama-sama dengan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta melakukan promosi dan pengenalan wilayah Rusunawa Rawa Bebek. Salah satu cara promosi dan pengenalan dilakukan dengan mengundang perwakilan warga Bukit Duri yang mau dibawa ke lokasi. Warga dijemput oleh Lurah Bukit Duri pada tanggal 24 Mei 2016 dan diajak menuju ke lokasi.



Sumber foto: [https://www.dpgpjakarta.com%25252Findex.php%25252Fberita%25252F370-orientasi warga Bukit Duri-unit-di-rusunawa-rawa-bebek&source=iu&pf=m&fir=69vZtwZPi4y](https://www.dpgpjakarta.com%25252Findex.php%25252Fberita%25252F370-orientasi%25252Fwarga%25252Fbukit%25252Fduri-unit-di-rusunawa-rawa-bebek&source=iu&pf=m&fir=69vZtwZPi4y), diunduh tanggal 30 Maret 2017 jam 16.21 WIB.



Sumber foto: [https://www.dpgpjakarta.com%25252Findex.php%25252Fberita%25252F370-orientasi warga Bukit Duri-unit-di-rusunawa-rawa-bebek&source=iu&pf=m&fir=69vZtwZPi4y](https://www.dpgpjakarta.com%25252Findex.php%25252Fberita%25252F370-orientasi%25252Fwarga%25252Fbukit%25252Fduri-unit-di-rusunawa-rawa-bebek&source=iu&pf=m&fir=69vZtwZPi4y), diunduh tanggal 30 Maret 2017 jam 16.21 WIB.

Warga disiapkan kendaraan untuk menuju ke Rusunawa Rawa Bebek. Sekitar 50 warga Bukit Duri ikut pergi melihat ke lokasi⁴⁴. Tanggapan warga setelah melihat Rusunawa Rawa Bebek sangat beragam. Almarhum Ibu Mimih

⁴⁴ <http://dpgpjakarta.com/index.php/berita/354-orientasi-warga-bukit-duri-untuk-pindah-ke-rusunawa-rawa-bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 17.32 WIB.

yang ikut ke rusunawa berpendapat “Rawa Bebek memang bagus, tapi lokasinya jauh. Tempatnya masih sepi. Kalau mau belanja jauh dari pasar dan tempat keramaian. Terpencil tempatnya. Susah cari duit”. Ibu Mimih berkesimpulan ia tidak akan pindah ke Rusunawa Rawa Bebek. Ada juga yang mengatakan bagus seperti apartemen, namun hampir seluruh warga yang ikut mengeluhkan lokasi yang jauh dan sepi untuk usaha atau berdagang.

Menyadari gerakan ini kurang berhasil, Kelurahan Bukit Duri menggunakan perangkat RT dan RW untuk membujuk para warganya agar mau segera pindah ke rusunawa. Berbagai cara dan bujuk rayu dilakukan oleh perangkat Kelurahan Bukit Duri tapi jumlah warga yang bersedia secara sukarela untuk pindah ke Rusunawa Rawa Bebek masih belum memenuhi target yang diharapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan kemudian melakukan pengundian unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dari pengundian ini menurut Walikota Jakarta Selatan tercatat 102 KK yang sudah mendaftar sebagai penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.



Sumber foto: http://www.beritajakarta.com/potret_wilayah/album/3236/sosialisasi-relokasi-dan-pengundian-warga-bukit-duri-ke-rusunawa-rawabebek, diunduh tanggal 29 Maret 2017.

Pengundian kedua dilakukan pada tanggal 6 September 2016 di Rusunawa Rawa Bebek. Dari data yang disampaikan oleh Pengelola Rusunawa Rawa

Bebek, Darnawati Sembiring mengatakan “72 warga mengikuti pengundian dan sudah menerima kunci unit hunian Rusunawa Rawa Bebek.”⁴⁵



Sumber foto: <http://dpgpjakarta.com/index.php/berita/370-pengundian-unit-di-rusunawa-rawa-bebek>, diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 16.26 WIB.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan agar seluruh korban pengusuran yang berjumlah 363 bidang mau segera pindah ke Rusunawa Rawa Bebek. Karena target belum juga dipenuhi sampai bulan Agustus 2016, strategi jemput bola diterapkan oleh Pemkot Jakarta Selatan. Strategi menjemput langsung warga yang mau dipindahkan. Membantu warga dengan mengangkat barang-barang milik warga dengan kendaraan Kementerian PUPR.

Bantuan pemindahan warga dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama pada tanggal 14 Agustus 2016 sebagian warga di RT. 10 RW. 12 Bukit Duri bersedia dipindah. Pada tahap ini, Pemkot Jakarta Selatan mengatakan di berbagai media online, sekitar 42 KK sudah mau dipindahkan.⁴⁶ Pemindahan pada periode ini dipimpin langsung oleh Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi.

⁴⁵ <http://dpgpjakarta.com/index.php/berita/370-pengundian-unit-di-rusunawa-rawa-bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 17.20 WIB.

⁴⁶ Egi Adyatama, 42 Keluarga Pindah dari Bukit Duri ke Rusunawa Rawa bebek, Minggu 14 Agustus 2016, “Tri mengatakan pemerintah daerah masih akan memberikan waktu bagi warga Bukit Duri untuk bergabung di rusunawa Rawa Bebek. Saat ini, baru 87 keluarga yang sudah pindah ke rusunawa. Mereka pindah pada Februari lalu.” <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/14/083795819/42-keluarga-pindah-dari-bukit-duri-ke-rusunawa-rawa-bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2016, jam 16.45 WIB; Robertus Belarminus, “Sudah 42 KK Warga Bukit Duri Pindah Ke Rusun Rawa bebek”, Minggu 14 Agustus 2016,



Sumber foto: Tempo/Egi Adyatama, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/14/083795819/42-keluarga-pindah-dari-bukit-duri-ke-rusunawa-rawa-bebek>

Tahap kedua dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2016, warga yang mau direlokasi sejumlah 60 KK dari Bukit Duri⁴⁷. Data yang disampaikan oleh Ibu Darnawati Sembiring, mengatakan sampai hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 jumlah warga Bukit Duri yang sudah pindah ke Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 126 KK dari jumlah 142 KK yang mengikuti proses pengundian Rusunawa Rawa Bebek⁴⁸.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/14/14194921/sudah.42.kk.warga.bukit.duri.pindah.ke.rusun.rawa.bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 11.15 WIB.

⁴⁷ Garry Andrew Lotulung, Minggu 21 Agustus, 60 KK Warga Bukit Duri Direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, Sabtu 20 Agustus 2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/20/20345001/minggu.21.agustus.60.kk.warga.bukit.duri.direlokasi.ke.rusun.rawa.bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 17.00 WIB.

⁴⁸ <http://dpgpjakarta.com/index.php/berita/366-126-kk-bukit-duri-huni-rusun-rawa-bebek>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 17.43 WIB.



Sumber foto: Yayasan Ciliwung Merdeka, lokasi di depan Pos RT. 08/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Proses pindahan di RT. 10/RW. 12.

Pemberitaan di berbagai media masa yang mengutip data yang berbeda mengenai jumlah perpindahan warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek⁴⁹

⁴⁹ Reno Esnir, Pengundian Rusun Rawa bebek, Jumat 7 Oktober 2016, “27 KK di Bukit Duri yang mengikuti pengundian di Rusunawa Rawa bebek pada Kamis 6 Oktober 2016. Hingga kini 338 KK Bukit Duri yang mengikuti pengundian untuk masuk dan menetap di rusun sebanyak 227 KK. Jumlah unit Rusun Rawa bebek yang disediakan untuk 363 KK”, <http://foto.viva.co.id/read/16806-pengundian-rusun-rawa-bebek> diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 11.35 WIB; Robertus Belarminus, Sudah 126 KK dari Bukit Duri yang Masuk Rusun Rawa bebek, Senin 22 Agustus 2016, “Kalau warga [Bukit Duri](#) sampai saat ini sudah 126 KK yang menempati rusun,” kata Darnawati, saat ditemui di Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Senin (22/8/2016),” <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/22/17282911/sudah.126.kk.dari.bukit.duri.yang.masuk.rusun.rawa.bebek>, diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 11.45 WIB; Achmad Fardiansyah, 50% Warga Bukit Duri Sudah Pindah ke Rusun Rawa bebek, “Camat Tebet, Mahludin, mengatakan dari total 230 KK sudah 50% warga menempati rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur, <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://news.okezone.com/read/2016/08/22/338/1469746/50-warga-bukit-duri-sudah-pindah-ke-rusun-rawa-bebek>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 11.50 WIB; Achmad Fardiansyah, Pemkot Jaksel Siap Ganti Rugi Warga Bukit Duri, Senin 22 Agustus 2016, Camat Tebet menyampaikan 60 KK di RW. 10 dan 12 sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://news.okezone.com/read/2016/08/22/338/1469743/pemkot-jaksel-siap-ganti-rugi-warga-bukit-duri>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 11.55 WIB; Achmad Sholeh, Puluhan Warga Bukit Duri Pindah Ke Rusun, Rabu 21 September 2016, “hari ini ada 60 KK atau bidang yang pindah ke Rusun Rawa Bebek. Mereka warga RT. 05 dan 10 RW. 12 serta RT 03 RW 10”, <http://megapolitanpos.com/detail/2250/puluhan-warga-bukit-duri-pindah-ke-rusun>, diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 12.02 WIB; Warta Kota, Relokasi Warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek dilaksanakan Minggu, “Walikota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan 102 KK warga Bukit Duri sudah mendapatkan kunci dan 41 KK sudah

memicu banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Pesan ini memberikan kesan bahwa Pemkot Jakarta Selatan tidak transparan dalam menyampaikan data sesungguhnya warga yang bersedia direlokasi secara sukarela. Sikap yang terkesan tidak transparan ini menimbulkan keingintahuan lebih dalam lagi para Peneliti untuk melakukan penelitian ini.

IV. Perubahan Peruntukan Rusunawa Rawa Bebek

Rusunawa Rawa Bebek akan dibangun di atas lahan dengan luas 178.334 M², lahan yang telah dibebaskan 138.300 M². Rusunawa Rawa Bebek direncanakan akan dibangun di atas lahan 95.000 M². Pembangunan rusunawa Rawa Bebek direncanakan akan terdiri dari 17 Blok dengan tipe unit hunian 36 M² dan jumlah unit 1.700 unit sarusun. Rusunawa Rawa Bebek dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta diperuntukkan bagi warga yang terkena program Banjir Kanal Timur (BKT) dan masyarakat umum⁵⁰. Pada saat awal perencanaan Rusunawa Rawa Bebek diperuntukkan bagi para pekerja buruh di sekitar Pulogebang dan sekitarnya. Para pekerja akan menghuni sarusun yang dirancang untuk 2 orang dengan biaya sebesar Rp 150.000,- – Rp. 280.000,-. Rusunawa Rawa Bebek juga diperuntukkan bagi masyarakat umum, di luar program yang direncanakan dengan biaya perbulan Rp 300.000,- – Rp. 380.000,-.

Perencanaan pembangunan yang disusun oleh Dinas Perumahan pada bulan Februari 2008 dengan perencanaan yang dibuat oleh Kemen PUPR berubah. Perubahan yang awalnya akan dibangun 17 tower menjadi 6 tower.

Pembangunan Rusunawa Rawa Bebek dibiayai dari APBN dengan biaya sebesar Rp 98 Miliar atau 16,3 Miliar per tower.⁵¹ Pembangunan Rawa Bebek dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Menurut Pangihutan Marpaung, Rusunawa Rawa Bebek akan dibangun 6 (enam) tower dan tiap tower terdiri dari 154 unit di atas lahan seluas 3 ha⁵². Direncanakan pembangunan akan dilakukan *groundbreaking* pada Selasa 2 Juli 2013. Proyek pembangunan ini sempat berhenti kemudian dilanjutkan kembali dengan menunjuk kontraktor baru di tahun

mendaftar ke rusunawa”, <http://wartakota.tribunnews.com/2016/08/12/relokasi-warga-bukit-duri-ke-rusunawa-rawa-bebek-dilaksanakan-minggu-148>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 16.10 WIB.

⁵⁰ Dinas Perumahan DKI Jakarta, Pembangunan Rusunawa dan Rusunami di DKI Jakarta, Februari 2008.

⁵¹ Nur Januarita Benu, Rusunawa Rawa Bebek Habiskan Biaya Pembangunan Rp. 98 M, Selasa 2 Juli 2013, <http://economy.okezone.com/read/2013/07/02/471/830906/rusunawa-rawa-bebek-habiskan-biaya-pembangunan-rp98-m> diunduh pada tanggal 29 Maret 2017, jam 13.15 WIB.

⁵² <http://kabar24.bisnis.com/read/20130702/77/148316/rusunawa-rawa-bebek-telan-rp98-miliar>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 11.03 WIB.

2014. Sumber pembiayaan pembangunan rusunawa dipastikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuko Hadimuljono bahwa pembangunan sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang terdiri dari enam tower⁵³. Kontrak kerja baru yang ditandatangani harus diselesaikan pada bulan Desember 2016⁵⁴.

Dalam publikasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Smart City, Pemprov DKI akan mengucurkan dana Rp 3 Triliun untuk membangun rusun baru dan melanjutkan pembangunan rusunawa yang sedang dalam proses tahun 2015. 8 titik rusunawa direncanakan selesai dibangun tahun ini yakni di KS Tubun; Lokasi Binaan Rawa Buaya di Jakarta Barat; Rawa Bebek; Cakung Barat; Jatinegara Kaum; Jalan Bekasi Km 2; Pinus Elok di Jakarta Timur; dan Marunda, Jakarta Utara⁵⁵.

V. Kesimpulan

Amanah UU Rusun bahwa rusun umum digunakan untuk MBR harus dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Amanah ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Pembangunan Rusunawa Rawa Bebek dibiayai oleh APBN. Dalam rencana awal pembangunan Rusunawa Rawa Bebek telah ditentukan bahwa tujuan pembangunan Rusunawa Rawa Bebek adalah untuk pekerja kasar di Pulogebang dan sekitarnya, serta MBR pada umumnya yang berdomisili hukum di Jakarta. Tujuan pembangunan ini tidak boleh diselewengkan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun oleh Kemen PUPR. Bila ada perubahan peruntukan dan tujuan penggunaan rusunawa, perubahan ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR-RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pengalihan bentuk ganti rugi yang sudah ditetapkan dalam perencanaan awal Program Normalisasi Kali Ciliwung tidak boleh diubah begitu saja. Karena perubahan itu berdampak pada pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak warga korban terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung.

⁵³ Dana Aditiasari, Dibangun Jokowi Akhir 2014, Rusun Rawa bebek Siap Huni Desember 2015, Senin 27 Juni 2015, <https://finance.detik.com/properti/2976416/dibangun-jokowi-akhir-2014-rusun-rawa-bebek-siap-huni-desember-2015>, diunduh pada 29 Maret 2017 jam 14.35 WIB.

⁵⁴ <http://news.metrotvnews.com/metro/aNrLmAVk-data-kk-eks-warga-bukit-duri-di-rusun-rawa-bebek-akan-dievaluasi>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017, jam 14.23 WIB.

⁵⁵ <http://smartcity.jakarta.go.id/blog/56/pemprov-dki-siap-membangun-2394-unit-rusun-di-jakarta> diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 14.08 WIB.

Bab III

Data Penghuni Rusunawa Rawa Bebek dan Daftar Korban Normalisasi di Bukit Duri

I. Pendahuluan

Pejabat daerah setempat, Lurah Bukit Duri pada tanggal 21 Oktober 2016 mengeluarkan laporan kepada Walikota Jakarta Selatan yang tertuang dalam Surat bernomor 306.a/-073.6. Laporan ini mengenai jumlah korban penggusuran di Bukit Duri yang telah bersedia direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek sejumlah 346 bidang. Berpedoman pada data tersebut, Peneliti mulai melakukan penelitian. Peneliti meneliti apakah benar 346 bidang tersebut merupakan korban penggusuran Program Normalisasi Kali Ciliwung?

Pada bab ini, Peneliti akan mencocokkan apakah data 346 bidang penerima Rusunawa Rawa Bebek merupakan korban penggusuran Program Normalisasi Kali Ciliwung di Bukit Duri? Guna memastikan validitas jumlah dan subyek penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang, Peneliti membandingkan data 346 bidang dengan Data Inventarisasi Rencana Pembebasan Tanah Untuk Normalisasi Kali Ciliwung di wilayah RW. 10, 11, dan 12 Kelurahan Bukit Duri [selanjutnya disingkat dengan Data Induk Korban Normalisasi]. Data Induk Korban Normalisasi ini dibuat oleh Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Selatan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, dan Kelurahan Bukit Duri.

II. Klasifikasi Penerima Rusunawa Rawabebek

Dalam meneliti validitas 346 daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek dari Lurah Bukit Duri, Peneliti mencocokkan antara nama-nama dan nomor peta bidang yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi. Dari hasil penelitian ini, kita akan melihat validitas 346 bidang. Dari penelitian terhadap jumlah 346 penerima rusunawa, Peneliti mendapatkan 5 (lima) klasifikasi.

Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang. Peta bidang ini dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan pendataan warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung dan Data Induk Korban Normalisasi. Peta bidang adalah peta lokasi dimana objek tanah dan rumah milik warga yang terkena dampak Program Normalisasi Kali

Ciliwung. Setiap peta bidang memiliki nomor urut. Nomor urut dalam peta bidang dibuat berdasarkan urutan wilayah terkena dampak Program Normalisasi Kali Ciliwung. Nomor peta bidang dibuat berdasarkan nama pemilik, jenis kepemilikan tanah, lokasi tanah dan rumah serta luas tanah dan bangunan terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung. Peta bidang ini dibuat dalam rangka pendataan objek tanah, rumah milik warga di wilayah RW. 10, 11, dan 12, Bukit Duri yang terkena pembebasan lahan untuk Program Normalisasi Kali Ciliwung. Peta bidang ini menjadi penting untuk menunjukkan apakah rumah dan tanah milik warga terkena dampak Program Normalisasi Kali Ciliwung atau tidak? Warga yang tidak mempunyai peta bidang bisa dikategorikan sebagai bukan warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung. Klasifikasi bukan warga terdampak adalah warga yang tinggal disekitar pinggir Kali Ciliwung tetapi rumah dan tanahnya tidak tergusur serta tidak digunakan untuk Program Normalisasi Kali Ciliwung.

Dalam daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek yang tidak mempunyai peta bidang mayoritas masuk dalam klasifikasi penerima rusunawa bukan korban penggusuran. Para penerima rusunawa klasifikasi ini tinggal di wilayah Bukit Duri dan mempunyai identitas atau keterangan domisili yang menunjukkan sebagai warga Bukit Duri di wilayah RT. 09/RW. 9; RT. 03, 08/RW. 10; RT. 04, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15/RW. 12, para warga tersebut tidak mempunyai rumah dan tanah yang terkena dampak Program Normalisasi Kali Ciliwung.

Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Pada saat sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Bukit Duri pada Bulan Maret 2016 dan sosialisasi di Kecamatan Tebet pada bulan April 2016, dikatakan bahwa setiap keluarga yang tergusur akan mendapatkan hak sewa 1 unit di rusunawa Rawabebek. Apa yang terjadi di lapangan? Ternyata ditemukan dalam laporan Lurah Bukit Duri terdapat beberapa nomor peta bidang mendapatkan hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi. Meskipun nama penghuni rusunawa memiliki peta bidang namun nama dalam peta bidang dengan nama penghuni rusunawa berbeda.

Klasifikasi keempat, nama warga terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung tercantum dalam daftar ke-346 penerima Rusunawa Rawa Bebek yang dibuat oleh Lurah Bukit Duri, meskipun nama yang sama tidak masuk dalam daftar penghuni Rusunawa Rawa Bebek. Pencantuman nama dalam daftar ke 346 sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek tidak disertai dengan perpindahan fisik si penerima Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi kelima, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penerima Rusunawa Rawa Bebek yang dilaporkan oleh Lurah Bukit Duri sebagai 346 warga penerima Rusunawa Rawa Bebek.

Dalam menyajikan informasi di bab ini, Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari Lurah Bukit Duri pada saat pengukuran dan persidangan. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran pertama penelitian ini.



III. Kesimpulan

Dari jumlah 346 bidang penerima Rusunawa Rawa Bebek sebagaimana laporan Lurah Bukit Duri pertanggal 21 Oktober 2016, disimpulkan:

1. Klasifikasi pertama, warga yang tidak mempunyai peta bidang namun menerima Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 81 bidang atau 23,41% dari 346 daftar penerima.
2. Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 11 bidang atau 3,18% dari 346 daftar penerima.
3. Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk

Korban Normalisasi berjumlah 117 bidang atau 33,82% dari 346 daftar penerima.

4. Klasifikasi keempat, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung tercantum dalam daftar ke-346 penerima rusunawa tapi nama yang sama tidak masuk dalam daftar penghuni Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 16 bidang atau 4,62% dari 346 daftar penerima.
5. Klasifikasi kelima, nama korban dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penerima Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 121 bidang atau 34,97% dari 346 daftar penerima.

Bab IV

Data Penghuni Rumah Susun Sewa Rawa Bebek

I. Pendahuluan

Penelusuran daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek yang disampaikan oleh Peneliti pada Bab III di atas, dilanjutkan dengan penelusuran apakah ke 346 para penerima Rusunawa Rawa Bebek sudah pindah seluruhnya ke sarusun di Rusunawa Rawa Bebek?

Dalam penelusuran ini, Peneliti menggunakan daftar para penghuni rusunawa yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada saat pembuktian di persidangan PTUN Jakarta, PTTUN Jakarta, dan sidang perdata dalam Gugatan Perwakilan Kelompok No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

II. Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek

Berdasarkan hasil penelusuran ini, ditemukan perbedaan jumlah penghuni Rusunawa Rawa Bebek dan nama-nama para penghuni sarusun. Dalam laporan Lurah Bukit Duri disampaikan jumlah warga Bukit Duri yang telah menerima rusunawa berjumlah 346 bidang. Tetapi dalam daftar penghuni Rusunawa Rawa Bebek terdapat 388 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek yang terisi oleh warga Bukit Duri. Pertanyaan yang mendasar dari mana peningkatan jumlah penghuni dari 346 bidang menjadi 388 unit?

Dari data 388 unit yang sudah terisi dengan data 346 bidang laporan Lurah ada selisih 42 unit yang terisi tetapi tidak dilaporkan oleh Lurah Bukit Duri. Data para penerima Rusunawa Rawa Bebek yang tidak konsisten menimbulkan pertanyaan bagi banyak warga Jakarta. Kedua data tersebut di atas perlu pula dibandingkan dengan data induk yaitu Data Induk Korban Normalisasi.

Dalam Data Induk Korban Normalisasi Kali Ciliwung terdapat 460 bidang tanah yang digunakan untuk Program Normalisasi Kali Ciliwung. 460 bidang ini berlokasi di pinggir Kali Ciliwung tepatnya di wilayah RW. 10, 11, dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Dari jumlah 460 bidang tanah telah digusur pada bulan Januari 2016 di RT. 11, 12 dan 15/RW. 10 berjumlah 97 bidang. Sedangkan sisanya berjumlah 363

bidang⁵⁶ (dari 460 – 97 = 363 bidang) berlokasi di RW. 10 (sisanya), RW. 11, dan RW. 12 yang digusur pada tanggal 28, 29, 30 September, 1 dan 3 Oktober 2016. Jumlah peta bidang 363 yang digusur pada periode kedua juga digunakan oleh Dinas Perumahan dan Walikota Jakarta Selatan⁵⁷.

Pengakuan Lurah Bukit Duri yang disampaikan kepada Robertus Belarminus di Kompas.com pada tanggal 14 Agustus 2016 bahwa warga yang “mengikuti pengundian kunci rusun sudah sebanyak 102 pemilik peta bidang. Artinya, masih 161 peta bidang lagi yang mesti direlokasi.”⁵⁸

Data Korban Normalisasi Kali Ciliwung yang mempunyai peta bidang berjumlah 363 bidang. Data warga yang membutuhkan tempat tinggal adalah 363 bidang.

Perbedaan data ini menarik untuk diteliti lebih dalam lagi. Apakah data-data yang disajikan dalam proses pembuktian di persidangan merupakan data yang akurat? Apakah data ini data yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan?

Untuk memperdalam penelitian, Peneliti membutuhkan data jumlah penerima Rusunawa Rawa Bebek dan nama penghuni rusunawa tersebut. Peneliti meminta data secara resmi kepada Pemkot Jakarta Selatan mengenai jumlah penerima Rusunawa Rawa Bebek dan nama-nama para penghuni Rusunawa Rawa Bebek. Permintaan resmi ini ditolak oleh Pemkot Jakarta Selatan. Meskipun permintaan ini disampaikan dihadapan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemkot tetap tidak memberikan data tersebut. Permintaan secara resmi tetap diajukan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, dan Kelurahan Bukit Duri melalui surat, namun tetap tidak diberikan.

Pada tanggal 26 Oktober 2016, digelar sidang pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan acara pengajuan bukti tertulis dari pihak Tergugat. Dalam hal ini pihak Tergugat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong

⁵⁶ Jumlah 363 bidang yang akan direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan yang disampaikan oleh Lurah Bukit Duri, Mardi Younce, ketika diwawancara oleh Kompas. Berita disampaikan oleh Robertus Belarminus, “Sudah 42 KK Warga Bukit Duri Pindah Ke Rusun Rawa bebek”, Minggu 14 Agustus 2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/14/14194921/sudah.42.kk.warga.bukit.duri.pindah.ke.rusun.rawa.bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 11.15 WIB.; data 363 rumah yang ditertibkan juga disampaikan oleh <http://www.viva.co.id/tvone/video/59157-aparat-tertibkan-363-rumah-warga-bukit-duri> diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 11.35 WIB.

⁵⁷ Riyan Ferdianto, Data Eks Warga Bukit Duri di Rusun Rawa Bebek akan Dievaluasi, Selasa, 20 September 2016 <http://news.metrotvnews.com/metro/aNrLmAVk-data-kk-eks-warga-bukit-duri-di-rusun-rawa-bebek-akan-dievaluasi>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 15.20 WIB.

⁵⁸ *Ibid*, Robertus Belarminus.

Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kasatpol PP). Kasatpol PP telah mengajukan bukti tertulis berupa keterangan warga yang sudah terima Rusunawa Rawa Bebek. Kasatpol PP mengajukan 4 bukti terkait dengan nama-nama para penghuni Rusunawa Rawa Bebek. Bukti T-10 menjelaskan mengenai daftar nama-nama warga yang sudah masuk dan tinggal di Rusunawa Rawa Bebek. Dari data ini Peneliti mendapatkan ada 383 penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Kemudian pada bukti yang disampaikan dalam Memori Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) diperoleh data penghuni Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 388 unit. Dari daftar penghuni ini, Peneliti mengkaji dan membuat daftar nama-nama pada peta bidang, nama warga yang tinggal di Rusunawa Rawa Bebek, nomor unit di Rusunawa Rawa Bebek, nomor bidang, lokasi asal, dan nama-nama yang tertera dalam laporan Lurah Bukit Duri serta nomor urut dalam laporan Lurah Bukit Duri. Data secara detail dapat dilihat pada laporan penelitian ini di lampiran 2.

III. Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Merpati

III.1. Pendahuluan

Laporan pengelola Rusunawa Rawa Bebek menyampaikan jumlah penghuni yang sudah menempati Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Merpati berjumlah 100 unit. Dari laporan ini, Peneliti membuat 6 (enam) klasifikasi.

III.2. Klasifikasi penerima rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang. Dalam daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek yang tidak mempunyai peta bidang mayoritas masuk dalam klasifikasi penerima rusunawa bukan korban penggusuran. Para penerima rusunawa dengan klasifikasi ini tinggal di wilayah Bukit Duri dan mempunyai identitas atau keterangan domisili yang menunjukkan sebagai warga Bukit Duri di wilayah RT. 09/RW. 9; RT. 03, 08/RW. 10; RT. 04, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15/RW. 12, para warga tersebut tidak mempunyai rumah dan tanah yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung.

Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi. Meskipun nama penghuni rusunawa memiliki peta bidang namun nama dalam peta bidang dengan nama penghuni rusunawa berbeda.

Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri. Namanya tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek meskipun si penerima berasal dari wilayah luar Bukit Duri.

Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek.

Diluar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri.

III.3. Kesimpulan

Dari 100 unit sarusun yang tersedia di Gedung Merpati dapat disimpulkan:

1. Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang berjumlah 18 unit atau 18% dari 100 unit yang tersedia.
2. Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 6 unit atau 6% dari 100 unit yang tersedia.
3. Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi berjumlah 31 unit atau 31% dari 100 unit yang tersedia.
4. Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri, berjumlah 0 unit atau 0% dari 100 unit yang tersedia.

5. Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Seluruh unit sudah diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Unit kosong berjumlah 0 unit atau 0% dari 100 unit yang tersedia.
6. Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek, **berjumlah 45 unit atau 45%** dari 100 unit yang tersedia.

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri yang berjumlah 5 unit.

IV. Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Merak

IV.1. Pendahuluan

Laporan pengelola Rusunawa Rawa Bebek menyampaikan jumlah penghuni yang sudah menempati Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Merak berjumlah 100 unit. Dari 100 unit yang dilaporkan terisi ada 4 unit yang kosong dan belum diisi oleh penghuni. Dari laporan ini, Peneliti membuat 6 (enam) klasifikasi.

IV.2. Klasifikasi penerima Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang. Dalam daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek yang tidak mempunyai peta bidang mayoritas masuk dalam klasifikasi penerima rusunawa bukan korban penggusuran. Para penerima rusunawa dengan klasifikasi ini tinggal di wilayah Bukit Duri dan mempunyai identitas atau keterangan domisili yang menunjukkan sebagai warga Bukit Duri di wilayah RT. 09/RW. 9; RT. 03, 08/RW. 10; RT. 04, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15/RW. 12, para warga tersebut tidak mempunyai rumah dan tanah yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung.

Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi. Meskipun nama penghuni rusunawa memiliki peta bidang namun nama dalam peta bidang dengan nama penghuni rusunawa berbeda.

Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri. Namanya tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek meskipun si penerima berasal dari wilayah Luar Bukit Duri.

Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri.

IV.3. Kesimpulan

Dari 100 unit sarusun yang tersedia di Gedung Merak dapat disimpulkan :

1. Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang berjumlah 46 unit atau 46% dari 100 unit yang tersedia.
2. Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 1 unit atau 1% dari 100 unit yang tersedia.
3. Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi berjumlah 18 unit atau 18% dari 100 unit yang tersedia.
4. Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri, berjumlah 12 unit atau 12% dari 100 unit yang tersedia.

5. Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit yang belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek, berjumlah 4 unit atau 4% dari 100 unit yang tersedia.
6. Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek, **berjumlah 19 unit atau 19%** dari 100 unit yang tersedia.

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri berjumlah 28 unit.

V. Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Gelatik

V.1. Pendahuluan

Laporan pengelola Rusunawa Rawa Bebek menyampaikan jumlah penghuni yang sudah menempati Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Gelatik berjumlah 100 unit. Dari laporan ini, Peneliti membuat 6 (enam) klasifikasi.

V.2. Klasifikasi penerima Rusunawa Rawa Bebek

Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang. Dalam daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek yang tidak mempunyai peta bidang mayoritas masuk dalam klasifikasi penerima rusunawa bukan korban penggusuran. Para penerima rusunawa dengan klasifikasi ini tinggal di wilayah Bukit Duri dan mempunyai identitas atau keterangan domisili yang menunjukkan sebagai warga Bukit Duri di wilayah RT. 09/RW. 9; RT. 03, 08/RW. 10; RT. 04, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15/RW. 12, para warga tersebut tidak mempunyai rumah dan tanah yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung.

Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi. Meskipun nama penghuni rusunawa memiliki peta bidang namun nama dalam peta bidang dengan nama penghuni rusunawa berbeda.

Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri. Namanya tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek meskipun si penerima berasal dari wilayah luar Bukit Duri.

Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri.

V.3. Kesimpulan

Dari 100 unit sarusun yang tersedia di Gedung Gelatik dapat disimpulkan:

1. Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang berjumlah 34 unit atau 34% dari 100 unit yang tersedia.
2. Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 3 unit atau 3% dari 100 unit yang tersedia.
3. Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi berjumlah 32 unit atau 32% dari 100 unit yang tersedia.
4. Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri, berjumlah 5 unit atau 5% dari 100 unit yang tersedia.

5. Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Seluruh unit sudah diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Unit kosong berjumlah 0 unit atau 0% dari 100 unit yang tersedia.
6. Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek, **berjumlah 26 unit atau 26%** dari 100 unit yang tersedia.

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri berjumlah 13 unit.

VI. Analisa Daftar Penghuni Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Cendrawasih

VI.1. Pendahuluan

Laporan pengelola Rusunawa Rawa Bebek menyampaikan jumlah penghuni yang sudah menempati Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Cendrawasih berjumlah 100 unit. Dari 100 unit yang dilaporkan ada 8 unit yang kosong dan belum diisi oleh penghuni. Dari laporan ini, Peneliti membuat 6 (enam) klasifikasi.

VI.2. Klasifikasi penerima Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang. Dalam daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek yang tidak mempunyai peta bidang mayoritas masuk dalam klasifikasi penerima rusunawa bukan korban penggusuran. Para penerima rusunawa dengan klasifikasi ini tinggal di wilayah Bukit Duri dan mempunyai identitas atau keterangan domisili yang menunjukkan sebagai warga Bukit Duri di wilayah RT. 09/RW. 9; RT. 03, 08/RW. 10; RT. 04, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15/RW. 12, para warga tersebut tidak mempunyai rumah dan tanah yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung.

Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi. Meskipun nama penghuni rusunawa memiliki peta bidang namun nama dalam peta bidang dengan nama penghuni rusunawa berbeda.

Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri. Namanya tercatat sebagai penerima rusunawa Rawabebek meskipun si penerima berasal dari wilayah luar Bukit Duri.

Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.

Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri.

VI.3. Kesimpulan

Dari 100 unit sarusun yang tersedia di Gedung Cendrawasih dapat disimpulkan:

1. Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang berjumlah 21 unit atau 21% dari 100 unit yang tersedia.
2. Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 1 unit atau 1% dari 100 unit yang tersedia.
3. Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi berjumlah 36 unit atau 36% dari 100 unit yang tersedia.
4. Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri, berjumlah 3 unit atau 3% dari 100 unit yang tersedia.

5. Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit yang belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek, berjumlah 8 unit atau 8% dari 100 unit yang tersedia.
6. Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek, **berjumlah 31 unit atau 31%** dari 100 unit yang tersedia.

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di rusunawa Rawabebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima rusunawa Rawabebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri berjumlah 12 unit.

VII. Rekapitulasi Seluruh Penghuni Unit Sarusun di Rusunawa Rawa Bebek di Gedung Merpati, Merak, Gelatik, dan Cendrawasih

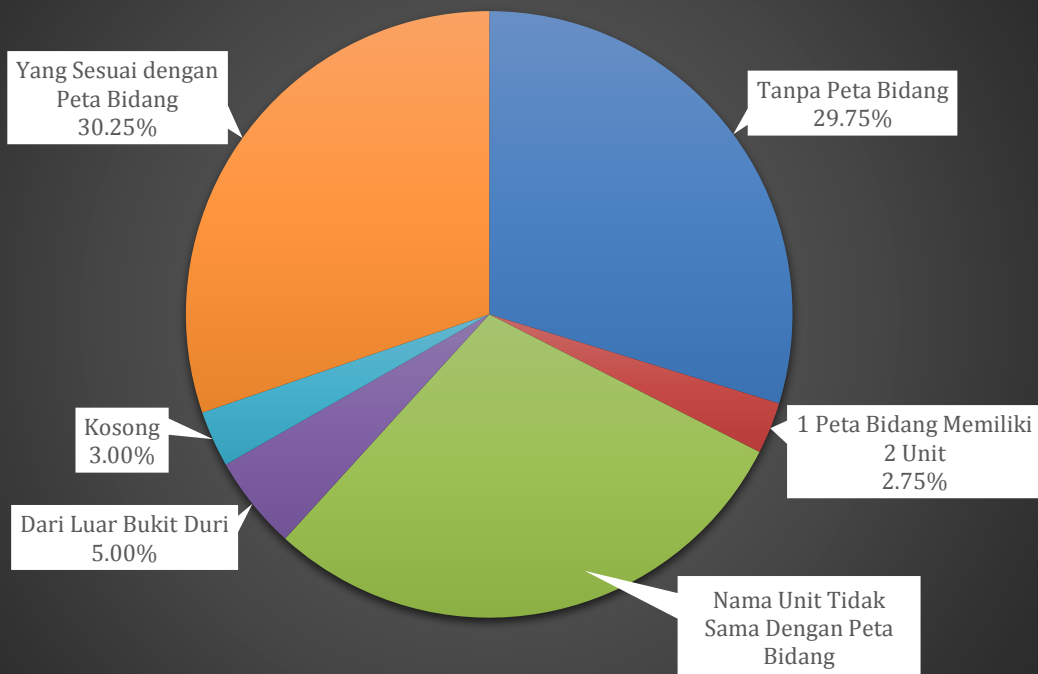
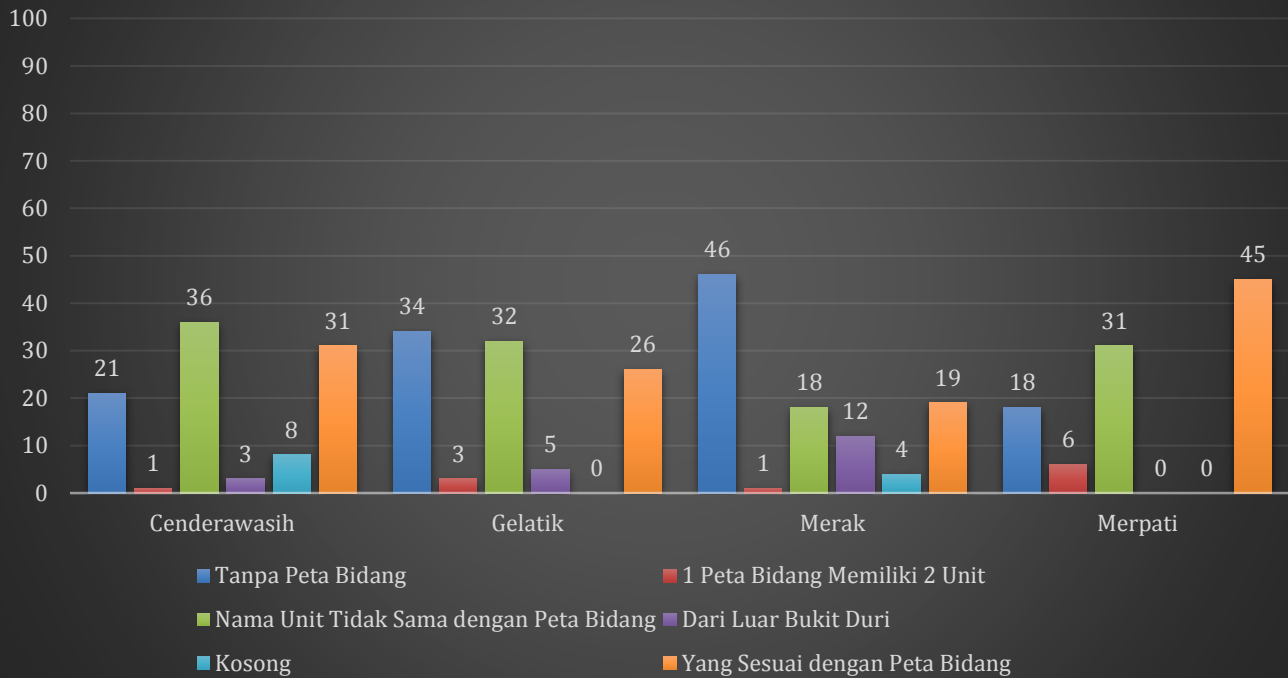
Dari 400 penghuni yang telah mengisi di Gedung Merpati, Merak, Gelatik, dan Cendrawasih dapat disimpulkan:

1. Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang berjumlah 119 unit atau 29,75% dari 400 unit yang tersedia.
2. Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 11 unit atau 2.75% dari 400 unit yang tersedia.
3. Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi berjumlah 117 unit atau 29,25% dari 400 unit yang tersedia.
4. Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri, berjumlah 20 unit atau 5% dari 400 unit yang tersedia.
5. Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit yang belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek, berjumlah 12 unit atau 3% dari 400 unit yang tersedia.

6. Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek, **berjumlah 121 unit atau 30.25%** dari 400 unit yang tersedia.

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri berjumlah 58 unit.

Data Warga Yang Ambil Rusunawa Rawabebek per Februari 2017



Bab V

Kajian Jumlah Korban Normalisasi Kali Ciliwung Dengan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Rusunawa Rawa Bebek

Pada bab ini, Peneliti akan mengkaji mengenai jumlah korban berdasarkan Data Induk Korban Normalisasi berjumlah 363 bidang. Berdasarkan sosialisasi di Kelurahan Bukit Duri bulan Maret 2016 dan di Kecamatan Tebet bulan April 2016 satu bidang akan mendapatkan hak sewa 1 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek.



Sumber foto: <http://sda.pu.go.id/pages/posts/Sosialisasi-Relokasi-Warga-RW-12-Kelurahan-Bukit-Duri-Sekitar-Kali-Ciliwung#>, diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 18.34 WIB.

Meskipun seluruh warga menolak keputusan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun keputusan itu tetap dijalankan. Seharusnya data kebutuhan akan sarusun di Rusunawa Rawa Bebek adalah 363 unit. Jumlah 363 unit diambil dari Data Induk Korban Normalisasi yang belum digusur di wilayah RW. 10, 11 dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Pemerintah daerah setempat membuat laporan dengan menggunakan data yang beragam. Keragaman data-data tersebut sebagai berikut:

1. Tercatat ada 26 pemilik bangunan yang tidak mempunyai peta bidang dan ke 26 pemilik ini menyatakan tidak ambil hak sewa di Rusunawa Rawa Bebek;

2. Tercatat ada 45 pemilik bangunan yang mempunyai peta bidang tetapi mereka menolak untuk menerima hak sewa di Rusunawa Rawa Bebek;
3. Tercatat ada 13 pemilik bangunan dengan tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat. Seluruhnya menolak menerima hak sewa di Rusunawa Rawa Bebek.
4. Tercatat 49 pemilik bangunan yang mempunyai peta bidang tetapi mereka menolak untuk menerima hak sewa di Rusunawa Rawa Bebek.

Dari data-data di atas khususnya data yang memiliki peta bidang namun menolak hak sewa di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 45 ditambah 13 ditambah 49 bangunan sehingga total 107 bidang tanah dan bangunan yang tercatat sebagai korban terdampak Program Normalisasi Kali Ciliwung dan ke 107 warga memiliki peta bidang.

Dari Data Induk Korban Normalisasi tercatat ada 363 bidang dikurangi dengan warga yang jelas-jelas menolak hak sewa di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 107 bidang tanah dan rumah. Seharusnya warga yang mau dipindah ke Rusunawa Rawa Bebek berjumlah $363 - 107$ menjadi 256 bidang.

Laporan Lurah Bukit Duri menyampaikan warga yang telah menerima hak sewa dan sudah pindah ke Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 346 bidang. Dari mana data 346 bidang ini? Apakah ke 346 bidang merupakan warga yang termasuk dalam 256 bidang yang belum jelas statusnya apakah menerima hak sewa Rusunawa di Rawa Bebek atau tidak?

Dari data 346 bidang yang menerima hak sewa dan sudah bersedia pindah ke Rusunawa Rawa Bebek hanya 121 keluarga atau sekitar 34.97% yang memiliki peta bidang dan sebagai korban Normalisasi Kali Ciliwung yang sudah tergusur.

Dari 256 sisa bidang yang belum dilaporkan tercatat 121 bidang yang sudah pindah ke Rusunawa Rawa Bebek. Sehingga $256 - 121$ bidang sekitar 135 bidang yang tidak diketahui dan tidak terdata oleh pemerintah setempat dimana mereka berada?

Dari laporan pemerintah daerah setempat menjelaskan satu peta bidang mendapatkan 2 (dua) unit rumah susun sewa Rawabebek. Dari keterangan ini membuktikan bahwa Lurah Bukit Duri dalam memberikan rekomendasi agar warga-warga tersebut bisa mendapatkan unit rusunawa tanpa acuan atau tanpa petunjuk yang jelas. Pemkot Jakarta Selatan tidak mempunyai pedoman teknis dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan Program Normalisasi Kali Ciliwung dan pemberian unit-unit satuan rumah susun di Rusunawa Rawa Bebek.

Bab VI

Kerugian Keuangan Negara dari Peningkatan Jumlah Penerima Rusunawa Rawa Bebek

I. Pendahuluan

Pada bab II, III, dan IV telah diuraikan beberapa jumlah warga Bukit Duri yang sudah pindah ke Rusunawa Rawa bebek. Pada bab ini, Peneliti akan mengkaji kaitan antara jumlah penerima Rusunawa Rawa Bebek dengan kerugian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Para warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran dan mempunyai peta bidang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disubsidi harga sewa dan dibebaskan biaya sewaselama 3 bulan pertama. Subsidi harga sewa dan biaya sewa selama 3 bulan dibiayai oleh negara. Biaya sewa disubsidi sebesar 50% dari harga sewa rusunawa untuk umum.

Sumber biaya yang digunakan untuk kedua subsidi ini dari APBD. Maka setiap data penerima rusunawa harus tepat sasaran sesuai dengan alokasi pembiayaan dan belanja daerah. Apakah pembiayaan dan subsidi ini sudah diberikan kepada subjek yang tepat sasaran? Berapa kerugian negara akibat dari peningkatan jumlah penerima Rusunawa Rawa Bebek?

II. Dasar Hukum Pemberian Subsidi Rusunawa.

Penetapan harga di setiap rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta telah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah⁵⁹ (Perda Retribusi). Perda Retribusi Pasal 76 menetapkan tarif sewa perbulan untuk *targeted group* diberikan pemotongan tarif sebesar 50% dari harga tarif sewa umum. Harga sewa di Rusunawa Rawa bebek beragam. Biaya sewa ditentukan dari lokasi unit sarusun. Lokasi di lantai satu lebih mahal. Semakin tinggi lantai harga sewa akan semakin murah. Penetapan harga ini untuk rusunawa yang tidak mempunyai fasilitas *lift*. Para penyewa harus menggunakan tangga untuk naik dan turun ke lantai yang dituju.

⁵⁹ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Lembar Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi DKI Jakarta No 31.

Untuk pemberian subsidi biaya sewa triwulan pertama ditanggung oleh **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai dasar hukum tertulis**. Kebijakan pemberian biaya gratis sewa selama triwulan pertama merupakan kebijakan tidak tertulis dari Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh korban penggusuran di wilayah Jakarta untuk periode 2014 – 2017.

Diluar kedua subsidi tersebut di atas, biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan rusunawa ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Setiap kerusakan pada fasilitas umum rusunawa menjadi tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta.

III. Perkiraan Kerugian Keuangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Narasumber yang ditemui oleh Peneliti menyampaikan harga sewa perbulan Rp 300,000,-. Dari biaya perbulan itu negara mensubsidi sebesar Rp 300.000,- untuk biaya sewa. Lokasi rusunawa yang disewanya di lantai 1.

Kesimpulan yang telah disampaikan pada bab III penelitian ini, dari 346 bidang yang sudah pindah dan tinggal di unit rusunawa Rawa bebek, hanya 121 unit atau sekitar 34,97% dari 346 daftar penerima rusunawa merupakan korban penggusuran normalisasi di Bukit Duri. Sedangkan sisanya 225 unit bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang.

Kelebihan angka sebesar 225 unit yang digunakan oleh bukan korban langsung menjadi beban Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan subsidi. Pemprov DKI Jakarta harus membiayai ke 225 unit untuk masa sewa selama 3 bulan sejak mereka tinggal di rusunawa. Bila uang sewa perbulan unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek sebesar Rp 300.000,- dan Pemprov DKI Jakarta harus membiayai masa sewa 3 bulan untuk 225 unit maka Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Pembiayaan ini diambil dari APBD untuk periode masa sewa dari bulan November 2016 sampai Februari 2017.

Pembiayaan dimulai pada bulan November 2016 karena penggusuran pertama di Bukit Duri RW. 10, 11 dan 12 terjadi pada 28, 29, 30 September, 1 dan 3 Oktober 2016. Para korban yang bersedia masuk ke rusunawa rata-rata dimulai pada periode akhir September 2016. Seluruh penghuni di Gedung Merpati, Merak, Gelatik, dan Cendrawasih yang dikhususkan untuk penggusuran warga Bukit Duri membuat perjanjian sewa rusunawa dimulai pada 1 November 2016. Sejak November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017 para korban dibebaskan untuk membayar biaya sewa selama 3 bulan. Selain biaya-biaya tersebut di atas masih ada biaya lainnya yang ditanggung oleh APBD DKI Jakarta.

Kesimpulan pada bab IV dalam penelitian ini menyampaikan dari jumlah penghuni unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek, tercatat ada 400 unit di Gedung

Merak, Merpati, Gelatik, Cendrawasih hanya 121 unit atau 30.25% merupakan korban langsung dan mempunyai peta bidang. Sedangkan sisanya 279 unit atau 69.75% dari 400 unit bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang di wilayah itu. Dari 279 unit terdapat unit yang masih kosong berjumlah 12 atau 3%. Sehingga unit yang terisi 267 unit. Dari 267 unit atau 66.75% diberikan kepada bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang tetapi mereka berdomisili di wilayah sekitar penggusuran berjumlah 247 unit atau 61.75%. Sedangkan unit lainnya diberikan kepada warga di luar Bukit Duri berjumlah 20 atau 5.% dari 400 unit.

Pemberian unit di Rusunawa Rawa Bebek kepada warga lain yang bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang telah berdampak kerugian pada keuangan negara. Pemprov DKI Jakarta harus membiayai 3 bulan uang sewa pada triwulan pertama dari 267 unit. Bila harga sewa perunit Rp 300.000 di lantai 1 maka kerugian negara mencapai Rp 240.300.000,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Periode pembayaran ini untuk bulan Februari 2017 sampai Mei 2017. Peningkatan data sejumlah 388 unit diperoleh Peneliti pada tanggal 20 Februari 2017.

Jumlah 121 penerima Rusunawa Rawa Bebek yang merupakan korban langsung yang mempunyai peta bidang tidak berubah dari laporan Lurah Bukit Duri tertanggal 21 Oktober 2016 dengan laporan pengelola Rusunawa Rawa Bebek periode 20 Februari 2017.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi penghuni di Gedung Merak, Merpati, Gelatik, Cendrawasih, Rusunawa Rawa Bebek, karena keempat gedung tersebut digunakan untuk korban penggusuran normalisasi Kali Ciliwung.

Subsidi lainnya yang diberikan kepada penghuni unit sarusun di empat blok tersebut adalah biaya keringanan sewa sebesar 50% dari harga sewa unit untuk umum. Biaya sewa yang ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta untuk keempat blok tersebut bila harga perunit di lantai 1 Rp 300.000 perbulan. Maka beban biaya Pemprov DKI Jakarta menjadi Rp 442.800.000,- (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Rincian detail jumlah tersebut diperoleh dari harga perbulan Rp 300.000,- dikali 3 bulan subsidi sewa dikali 225 jumlah unit bukan untuk korban penggusuran di Bukit Duri. Perkalian jumlah tersebut diperoleh nilai Rp 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus rupiah). Ditambahkan dengan harga perbulan Rp 300.000,- dikali 3 bulan subsidi sewa dikali 267 jumlah unit bukan untuk korban penggusuran. Perkalian ini menghasilkan nilai sebesar Rp 240.300.000,- (dua ratus empat puluh tiga ratus ribu rupiah).

Peningkatan jumlah penerima Rusunawa Rawa Bebek dari periode 21 Oktober 2016 yang bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang

berjumlah 225 unit. Pada periode bulan Februari 2017 terdapat peningkatan penerima Rusunawa Rawa Bebek yang bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang berjumlah 267 unit. Dua periode peningkatan itu telah menimbulkan kerugian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 885.600.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Kerugian ini berasal dari perhitungan Rp 442.800.000,- (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan Rp 442.800.000,- (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

IV. Kesimpulan

Sebuah kebijakan yang tidak tertulis dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta beserta Pemkot Jakarta Selatan untuk merelokasi paksa warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek dimulai dengan tidak transparan dan melanggar prinsip partisipasi warga terdampak. Kebijakan ini telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 885.600.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pemprov DKI Jakarta selalu mengatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk memanusiakan warga pinggir kali. Apakah kebijakan ini merupakan kebijakan yang memanusiakan warga atau kebijakan yang melanggar hak-hak warga? Khususnya hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk berpartisipasi dalam menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan hak untuk mempertahankan hak miliknya atas tanah dan bangunan.

Kebijakan ini telah berdampak negatif pada para penghuni rusunawa. Dampak negatif yang sangat dirasakan oleh para penghuni adalah beban biaya hidup semakin meningkat karena ditempat awal, sebelum direlokasi, mereka tidak perlu membayar uang sewa. Tetapi setelah di rusunawa mereka harus membayar uang sewa. Dampak negatif lainnya adalah menurunnya kemampuan ekonomi para penerima. Kedua dampak negatif ini juga dirasakan oleh warga Kampung Pulo yang telah digusur karena Program Normalisasi Kali Ciliwung pada tanggal 20 Agustus 2015. Narasumber yang kami temui, Bapak Warji, Ibu Evi para penghuni Rusunawa Jatinegara Barat mengeluhkan hal yang sama.

Kebijakan ini menimbulkan beban pembiayaan bagi warga korban pengusuran dan beban pembiayaan bagi Pemprov DKI Jakarta. Sehingga kebijakan ini perlu dievaluasi agar kedepan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat korban pengusuran dan tidak menimbulkan beban bagi pemerintah.

Peningkatkan jumlah penerima rusunawa telah berdampak pada beban pembiayaan yang cukup besar bagi DKI Jakarta.

Bab VII

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung

I. Pendahuluan

Program Normalisasi Kali Ciliwung direncanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) – Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)⁶⁰ dimulai pada 2013 dan direncanakan akan berakhir pada akhir 2016. Namun sampai saat penelitian ini ditulis pelaksanaan proyek normalisasi belum juga selesai. Merujuk pada penjelasan Kepala BBWSCC, Iskandar, ketika diwawancarai Berita Satu.com, normalisasi baru dilaksanakan 60%.

Proyek ini termasuk proyek pengerukan 13 kali di Jakarta. Biaya untuk pengerukan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 1 Triliun dari bantuan Bank Dunia melalui program *Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JEDI)⁶¹.

Pada saat perencanaan BBWSCC mengakui dalam dokumen AMDAL Normalisasi Kali Ciliwung tanah untuk proyek ini merupakan tanah masyarakat⁶² yang dimiliki dengan keragaman bukti kepemilikan tanahnya⁶³. Di atas tanah-tanah warga sudah didirikan rumah-rumah milik warga pinggir Kali Ciliwung⁶⁴.

⁶⁰ Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Jembatan Tol TB. Simatupang di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Maret 2015, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

⁶¹ Arimbi Bimoseno, Jokowi Rapopo Jadi Presiden, Kata Media, Cetakan 1, Jakarta, hal. 26.

⁶² *Ibid.* Lahan yang digunakan untuk kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung adalah lahan (tanah milik masyarakat yang digunakan untuk pemukiman dan perdagangan dan pekarangan. ... terkait dengan pembebasan lahan akan terjadi pemindahan bangunan atau okupasi bangunan/rumah penduduk, pemindahan fasilitas publik serta utilitas. [hal. I-32].

⁶³ *Ibid.* Lahan di sekitar bantaran Kali Ciliwung yang akan dibebaskan, sebagian adalah lahan yang telah dimiliki masyarakat, dan malah telah dibangun sebagai tempat tinggal. Status kepemilikan ada yang telah mempunyai sertifikat, tetapi ada pula yang masih girik, dan di beberapa kasus hanya ada surat jual beli, dan ada pula yang tidak jelas (tidak mempunyai legalitas). [hal. III-7].

⁶⁴ *Ibid.* Mengenai Kepemilikan Rumah. Di dalam dokumen Amdal dikatakan “rumah yang mereka (warga pinggir kali Ciliwung dan secara khusus warga Bukit Duri) tempati sekarang adalah milik sendiri (94%). Hanya 2% saja menyatakan menyewa rumah dan sisanya menyebutkan bahwa tempat tinggal mereka saat ini menumpang di rumah saudara (tidak bayar). [hal. II – 54].

Tanah-tanah milik warga itu akan dilakukan pembebasan lahan dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012 jo. Perpres No. 71 Tahun 2012⁶⁵ dan ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Pengukuran, pemetaan dan pendataan status tanah milik warga telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan. Janji untuk memberikan ganti untung yang layak atas semua harta milik warga telah disampaikan pada periode pertama sosialisasi proyek di tahun 2014. Warga menanggapi janji itu dan membantu proses pengukuran, pemetaan dan pendataan dengan antusias karena berharap harta milik warga akan diberikan ganti untung yang sesuai. Di luar dugaan warga, pada sosialisasi bulan Maret 2016 di Kelurahan Bukit Duri, Pemkot Jakarta Selatan mengatakan bahwa tidak ada ganti untung. Karena tanah warga tanah negara. Warga diminta untuk segera menghancurkan rumah-rumah miliknya dan segera pindah ke Rusunawa Rawa Bebek.

II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Proyek Normalisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta untuk Pembebasan Lahan Tanah-Tanah Warga

Sebagaimana telah dirancang sejak awal perencanaan proyek bahwa tanah milik warga akan diberikan ganti rugi. Namun pada saat pelaksanaan proyek normalisasi telah terjadi penyimpangan. Penyimpangan pelaksanaan proyek terjadi khususnya pada tahap pembebasan lahan untuk proyek normalisasi di seluruh wilayah pinggir Kali Ciliwung. Pelaksana proyek Kemen PUPR-BBWSCC

⁶⁵ *Ibid.* Menurut UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Normalisasi Kali Ciliwung tergolong untuk kepentingan umum. [hal. 1-32]. Pada Pasal 6 UU ini disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 2 UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan, keadilan kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Selain itu pada Pasal 27 ayat (2) UU tersebut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah, tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (2) penilaian ganti kerugian; (3) musyawarah penetapan ganti kerugian; (4) pemberian ganti kerugian; dan (5) pelepasan tanah instansi. Adapun penilaian besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU tersebut, dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: (1) tanah; (2) ruang atas tanah dan bawah tanah; (3) bangunan; (4) tanaman; (5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau (6) kerugian lain yang dapat dinilai.

memiliki anggaran untuk pelaksanaan Program Normalisasi Kali Ciliwung sebesar Rp 1.18 Triliun. Direktur Jenderal Sumberdaya Air (SDA) Kemen PUPR, Mudjadi⁶⁶, mengatakan Anggaran APBN sebesar Rp 1.18 Triliun termasuk untuk pelaksanaan proyek seluas 99 hektar. Ketersediaan anggaran sebesar Rp 1,18 Triliun untuk proyek normalisasi kali Ciliwung seluruhnya untuk 19 km Kali Ciliwung di benarkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), T Iskandar⁶⁷.

Pembebasan lahan untuk seluruh kebutuhan lahan proyek normalisasi menjadi tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta. Kepala Bidang Prasarana Jaringan Utilitas Dinas PU DKI Jakarta, Edy Sudrajat mengatakan pembebasan lahan ini telah dianggarkan oleh negara Rp 50 Miliar dari APBD 2013 dan 2014⁶⁸. Kepala Dinas Tata Air Jakarta, Teguh Hendarwan, mengakui “pembebasan lahan di bantaran Ciliwung terdiri dari ribuan bidang tanah di Jaksel dan Jaktim”. Oleh karenanya pada “APBD Perubahan DKI Jakarta 2016, pihak Dinas Tata Air Jakarta mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp. 50 Miliar untuk pembebasan lahan normalisasi kali dan sungai”⁶⁹. Pemprov DKI Jakarta mendapatkan anggaran tambahan dengan nilai Rp 250 Miliar untuk pengadaan tanah proyek normalisasi Kali Ciliwung dari Bank Dunia melalui program *Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)*⁷⁰.

Fakta yang terjadi pada korban penggusuran Program Normalisasi Kali Ciliwung di wilayah RW. 10, 11, dan 12, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sampai saat ini tidak mendapatkan hak atas pembebasan lahan milik mereka dan penghancuran bangunan rumah miliknya. Warga keberatan terhadap perlakuan pemerintah daerah dan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap BBWSCC, Pemerintah

⁶⁶ Dana Aditiasari, Normalisasi Ciliwung, Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp. 1.18 Triliun, <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3042642/normalisasi-ciliwung-pemerintah-sudah-gelontorkan-rp-118-triliun>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 12.47 WIB.

⁶⁷ Heldania Puri Lubis, Proses Normalisasi Kali Ciliwung Masih 42 Persen, Selasa 21 Februari 2017, <http://news.detik.com/berita/d-3428447/proses-normalisasi-kali-ciliwung-masih-42-persen>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 13.03 WIB.

⁶⁸ Nurita, Warga Diminta Dukung Normalisasi Kali Ciliwung, Kamis 26 Juni 2014, http://www.beritajakarta.com/read/3143/Warga_Diminta_Dukung_Normalisasi_Kali_Ciliwung, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 13.03 WIB.

⁶⁹ <http://www.beritasatu.com/megapolitan/393435-ciliwung-tak-lagi-sumber-petaka.html>, diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 14.47 WIB.

⁷⁰ Op. Cit Arimbi, hal 26-27, https://books.google.co.id/books?id=Upy4CgAAQBAJ&pg=PA27&lpg=PA27&dq=anggaran+pen+gadaan+lahan+proyek+normalisasi+kali+ciliwung&source=bl&ots=uT_L5kzTnQ&sig=EgzAQOY1YVYdyAq3bn_ZdKg-mew&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=anggaran%20pengadaan%20lahan%20proyek%20normalisasi%20kali%20ciliwung&f=false, diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 14.40 WIB.

Provinsi DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Selatan serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Pemkot Jakarta Selatan. Pihak pemerintah tidak mengakui ada dana pembebasan lahan untuk tanah warga. Pengakuan ini disampaikan dalam persidangan di kedua pengadilan tersebut. Pengakuan ini dikatakan oleh kuasa hukum Pemkot Jakarta Selatan.

III. Kesimpulan

Dari uraian fakta-fakta di atas, terhadap tindakan pemerintah daerah yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi yang sesungguhnya telah merenggut hak-hak warganya. Hak-hak warga yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dihargai justru dilanggar oleh pejabat pemerintahnya.

Dimulai dari sebuah kebijakan yang melanggar prinsip asas keterbukaan dan prinsip utama dalam negara hukum yaitu asas partisipasi dan asas kepastian hukum maka dapat diduga kebijakan tersebut berpotensi melanggar hukum.

Mereka tidak transparan dalam hal (1) pengakuan akan hak atas tanah milik warga; (2) pengakuan bahwa Program Normalisasi Kali Ciliwung merupakan proyek pembangunan nasional untuk kepentingan umum; (3) pengakuan bahwa pembebasan lahan untuk proyek normalisasi dilakukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 jo. Perpres No. 71 Tahun 2012; (4) pengakuan bahwa tanah warga mendapatkan ganti rugi; (5) pengakuan bahwa Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan mendapatkan dana APBD untuk melakukan memberikan ganti rugi atas tanah milik warga; dan (6) pengakuan jumlah sesungguhnya warga Bukit Duri yang merupakan korban penggusuran normalisasi Kali Ciliwung menerima hak sewa dan pindah ke Rusunawa Rawa Bebek.

Bab VIII

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Normalisasi Sungai Ciliwung memerlukan pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Tebet, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan dengan luas 4.46 Ha⁷¹ yang berada di wilayah RW. 09, 10, 11, dan 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Lokasi itu telah dipetakan dan dibuat peta bidang terhadap wilayah-wilayah terdampak oleh Suku Dinas Tata Kota. Dari luas 4.46 Ha terdapat 460 bidang. Dari 460 bidang sekitar 97 bidang telah digusur pada bulan Januari 2016. Sedangkan sisanya 363 bidang digusur pada tanggal 28, 29, 30 September, 1 dan 3 Oktober 2016. Alasan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melakukan penggusuran di wilayah Bukit Duri karena seluruh warga telah terima rusunawa dan sudah pindah ke Rusunawa Rawa Bebek.

Justifikasi Pemprov DKI Jakarta dalam menggusur warga Bukit Duri lebih ditekankan pada 2 alasan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Alasan pertama, mayoritas warga sekitar 293 bidang dari 363 bidang atau 80.71% dari 363 bidang sudah pindah ke Rusunawa Rawa Bebek. Alasan kedua, penekanan pada penyerapan atau penggunaan APBN harus dilaksanakan sampai akhir tahun 2016. Kedua alasan ini dapat dilihat pada wawancara Gubernur DKI di CNN Indonesia:

“masih terdapat sekitar 70 KK yang menolak pindah ke Rumah Susun Rawa Bebek dari sekitar 363 KK. Ahok juga menjelaskan alasan lain yang membuatnya harus segera menggusur Bukit Duri. Proyek normalisasi Ciliwung di Bukit Duri itu menggunakan dana APBN yang harus segera diserap sebelum akhir tahun ini. Menurut Ahok, jika dana itu tak digunakan, Menteri Keuangan akan memotong dana untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekarang kalau ditunda, duit APBN pergi lagi. Apalagi Menkeu sekarang begitu ketat. Kalo serapan kurang, langsung tahun depan dia potong, enggak mau kasih lagi.”⁷²

⁷¹ Dokumen Amdal Normalisasi Kali Ciliwung, hal. I-33.

⁷² Keterangan Ahok dalam wawancara yang dilakukan oleh Puput Tripeni Juniman, CNN Indonesia, “Ahok Klaim Bukit Duri Akan Bebas Banjir Usai Digusur”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160928105706-20-161718/ahok-klaim-bukit-duri-akan-bebas-banjir-usai-digusur/>, diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 19.09 WIB.

Namun pada kenyataannya hanya 121 bidang atau 34.97% yang menerima Rumah Susun Sewa Rawa Bebek. Jumlah 121 ini diperoleh dari perbandingan data antara 346 laporan Lurah Bukit Duri dengan Data Induk Korban Normalisasi.

Lurah Bukit Duri dalam laporannya menjelaskan bahwa terdapat 364 warga penerima Rusunawa Rawa Bebek (berdasarkan bukti T-56 Pembanding/Tergugat dalam lampiran daftar bukti Memori Banding tanggal 20 Februari 2017). Data ini sudah berubah lagi dari 346 pada tanggal 21 Oktober 2016 menjadi 364 pada bulan 20 Februari 2017 hanya dalam waktu 4 bulan berlalu.

Namun Lurah Bukit Duri dalam pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara melaporkan ada 346 warga korban gusuran di wilayah Bukit Duri telah menerima Rusunawa Rawa Bebek. Jumlah ini diperoleh dari laporan Lurah Bukit Duri di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan bahwa sudah seluruh warga Bukit Duri masuk ke Rusunawa Rawa Bebek, tidak benar. Seluruhnya artinya 363 bidang atau sekitar 100% warga masuk ke Rusunawa Rawa Bebek.

Hasil penelitian Yayasan Ciliwung Merdeka dari laporan Pengelola Rusunawa Rawa Bebek, penerima Rusunawa Rawa Bebek sejumlah 400 unit/KK terdapat:

1. Klasifikasi pertama, warga yang tercatat sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek namun penerima Rusunawa Rawa Bebek itu tidak mempunyai peta bidang berjumlah 118 unit atau 29,5% dari 400 unit yang tersedia.
2. Klasifikasi kedua, warga terdampak yang memiliki 1 peta bidang namun mendapatkan pembagian hak sewa 2 unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek berjumlah 11 unit atau 2.75% dari 400 unit yang tersedia.
3. Klasifikasi ketiga, nama yang tertera sebagai penghuni di Rusunawa Rawa Bebek bukan nama yang sama dengan nama yang tertera dalam Data Induk Korban Normalisasi berjumlah 117 unit atau 29,25% dari 400 unit yang tersedia.
4. Klasifikasi keempat, warga yang berasal dari luar wilayah Bukit Duri, berjumlah 21 unit atau 5.25% dari 400 unit yang tersedia.
5. Klasifikasi kelima, unit yang masih kosong. Unit yang belum diisi oleh penghuni sarusun di Rusunawa Rawa Bebek, berjumlah 12 unit atau 3% dari 400 unit yang tersedia.
6. Klasifikasi keenam, nama korban Program Normalisasi Kali Ciliwung yang tercantum dalam Data Induk Korban Normalisasi sesuai dengan nama penghuni Rusunawa Rawa Bebek, **berjumlah 121 unit atau 30.25%** dari 400 unit yang tersedia.

Di luar keenam klasifikasi tersebut di atas, ternyata ada nama-nama yang dicantumkan sebagai penghuni dalam sarusun di Rusunawa Rawa Bebek. Tapi nama tersebut tidak punya peta bidang. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Induk Korban Normalisasi. Nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Laporan Lurah sebagai penerima Rusunawa Rawa Bebek yang berjumlah 346 bidang. Serta nama tersebut bukan warga Bukit Duri atau mereka berasal dari luar Bukit Duri berjumlah 58 unit.

Dari dua sumber data, dapat disimpulkan bahwa:

1. Data penerima rumah susun tidak akurat atau tidak sesuai dengan fakta terhadap penerima Rusunawa Rawa Bebek. Kesimpulan ini diambil dari data total bidang berjumlah 363 bidang dan yang tercatat resmi menolak seluruhnya berjumlah 107 rumah yang memiliki peta bidang resmi. Menerima dan sudah pindah ke rusunawa berjumlah 121 memiliki peta bidang. Sedangkan 135 bidang rumah dan tanah belum diketahui keberadaannya. Pejabat setempat tidak mampu mencatat dimana mereka berada dan dimana mereka tinggal.
2. 242 keluarga atau pemilik bidang tanah dan bangunan tidak dapat dijelaskan kemana mereka berada. Bagaimana kondisi mereka saat ini?
3. 388 penerima unit sarusun di Rusunawa Rawa Bebek bukan seluruhnya korban Program Normalisasi Kali Ciliwung.
4. Bila data yang digunakan adalah data dari pengelola Rusunawa Rawa Bebek, hanya 121 bidang yang sungguh-sungguh korban Program Normalisasi Kali Ciliwung. Sementara itu, data dari Kelurahan Bukit Duri menunjukkan terdapat 121 unit yang sungguh-sungguh korban Program Normalisasi Kali Ciliwung di wilayah Bukit Duri.
5. Sedangkan sisanya yang berjumlah 225 (346-121) dari daftar penerima Rusunawa Rawa Bebek dari Lurah Bukit Duri merupakan penghuni yang bukan korban Program Normalisasi Sungai Ciliwung.
6. Persyaratan penerima unit rumah susun sewa dan peruntukan rumah susun bagi warga korban penggusuran diterapkan dengan tidak konsisten. Kriteria pemberian tidak jelas.
7. Keputusan kepala daerah setempat untuk memindahkan korban Program Normalisasi Kali Ciliwung tidak ada dasar hukum yang tepat. Keputusan ini diduga melanggar hukum.
8. Keputusan kepala daerah ini telah melanggar hukum administrasi pemerintahan yang baik khusus asas partisipasi, asas keterbukaan, asas kepastian hukum dan asas kepatutan.

9. Data penerima Rusunawa Rawa Bebek tidak pasti dan berubah-ubah.
10. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak melaksanakan prinsip dasar dan petunjuk dalam pembangunan yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana tertuang dalam Dokumen A/HRC/4/18. Pelanggaran itu berupa: (1) tidak mengakomodasi usulan warga terdampak yang menolak pemberian hak sewa atas unit di Rusunawa Rawa Bebek; (2) Tidak memberikan hak berupa kompensasi yang layak; (3) tidak memberikan waktu untuk mengajukan keberatan atas keputusan dalam penggusuran paksa; (4) menggusur pada saat proses persidangan dilakukan di dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usahan Negara; (5) tidak memberikan kesempatan untuk mengadakan dengar pendapat yang memberikan kesempatan kepada warga terdampak dan kuasa hukum warga terdampak untuk memberikan kesempatan menentang keputusan penggusuran dan atau memberikan alternatif proposal untuk menyampaikan usulan dan tuntutan mereka dan prioritas pembangunan; (6) tidak memberikan perumahan yang layak kepada warga yang terdampak langsung yang mempunyai peta bidang yang berjumlah 242 korban langsung yang mempunyai peta bidang (angka itu diperoleh dari $460-97-121=242$); (7) tidak mendapatkan pemulihan atas kehilangan hak-haknya akibat dari penggusuran paksa; (8) melakukan diskriminasi kepada warga Bukit Duri selaku korban penggusuran akibat Program Normalisasi Kali Ciliwung.

Jakarta, 30 Maret 2017

Peneliti Yayasan Ciliwung Merdeka

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor Pasal ⁴⁰ "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. "
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara No. 5280, disahkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 14 Januari 2012, diundangkan tanggal 14 Januari 2012.
7. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, ditetapkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 7 Agustus 2012, diundangkan tanggal 8 Agustus 2012.
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Lembar Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi DKI Jakarta No 31.

Hukum internasional

9. United Nations Commission on Human Rights, <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx>, diunduh pada 6 Februari 2017, mendefinisikan “*good governance is the process whereby public institutions conduct public affairs, manage public resources and guarantee the realization of human rights in a manner essentially free of abuse and corruption, and with due regard for the rule of law*”.

Buku

10. J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol. 1, Clarendon Press, Oxford, 1901.
11. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*.
12. James E. Anderson, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984, cet: ke-3.
13. Arimbi Bimoseno, *Jokowi Rapopo Jadi Presiden*, Kata Media, Cetakan 1, Jakarta.

Jurnal

14. Vera Wheni S. Soemarwi, Seminar Nasional Riset Multidisiplin (SNRM), 24 – 25 Maret 2017, Universitas Tarumanagara.
15. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Jembatan Tol TB. Simatupang di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Maret 2015, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.
16. Nuri Ikawati, IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies), Diskusi Publik, “**Memaknai Indonesia sebagai Negara Hukum Dalam Menjamin Hak-hak Warga Kota**” Jumat, 10 Februari 2017 di LBH Jakarta.

Kasus

17. Kasus *Marbury versus Madison* (1803) 5-US, 1 Cranch, 137, dalam Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press Ltd., London, 1997.
18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT.

Media

19. <http://sda.pu.go.id/pages/posts/Sosialisasi-Relokasi-Warga-RW-12-Kelurahan-Bukit-Duri-Sekitar-Kali-Ciliwung>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 18.41 WIB.
20. Lenny Tristia Tambun, <http://www.beritasatu.com/megapolitan/363611-hingga-saat-ini-pemprov-dki-telah-membangun-23-rusunawa.html>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 10.50 WIB.
21. <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/05/mulai-pekan-depan-74-kk-warga-bidara-cina-pindah-ke-rusunawa-cibesel> diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 09.29 WIB.
22. <http://dpggjakarta.com/index.php/data/data-lokasi-rusunawa-dki-jakarta>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 10.12 WIB.
23. Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, pada hari Rabu 16 Desember 2015, <http://pu.go.id/berita/10824/Kementerian-PUPR-Siapkan-Fasilitas-Lengkap-di-Rusunawa-Rawa-bebek/>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 10.23 WIB.
24. <http://dpggjakarta.com/index.php/berita/354-orientasi-warga-bukit-duri-untuk-pindah-ke-rusunawa-rawa-bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 17.32 WIB.
25. <http://dpggjakarta.com/index.php/berita/370-pengundian-unit-di-rusunawa-rawa-bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 17.20 WIB.
26. Egi Adyatama, 42 Keluarga Pindah dari Bukit Duri ke Rusunawa Rawa bebek, Minggu 14 Agustus 2016, <https://m.tempco.co/read/news/2016/08/14/083795819/42-keluarga-pindah-dari-bukit-duri-ke-rusunawa-rawa-bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2016, jam 16.45 WIB;
27. Robertus Belarminus, “Sudah 42 KK Warga Bukit Duri Pindah Ke Rusun Rawa bebek”, Minggu 14 Agustus 2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/14/14194921/sudah.42.kk.warga.bukit.duri.pindah.ke.rusun.rawa.bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 11.15 WIB.
28. Garry Andrew Lotulung, Minggu 21 Agustus, 60 KK Warga Bukit Duri Direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, Sabtu 20 Agustus 2016, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/20/20345001/minggu.21.agustus.60.kk.warga.bukit.duri.direlokasi.ke.rusun.rawa.bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 17.00 WIB.
29. <http://dpggjakarta.com/index.php/berita/366-126-kk-bukit-duri-huni-rusun-rawa-bebek>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 17.43 WIB.

30. Reno Esnir, Pengundian Rusun Rawa bebek, Jumat 7 Oktober 2016, <http://foto.viva.co.id/read/16806-pengundian-rusun-rawa-bebek> diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 11.35 WIB.
31. Robertus Belarminus, Sudah 126 KK dari Bukit Duri yang Masuk Rusun Rawa bebek, Senin 22 Agustus 2016, <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/22/17282911/sudah.126.kk.dari.bukit.duri.yang.masuk.rusun.rawa.bebek>, diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 11.45 WIB.
32. Achmad Fardiansyah, 50% Warga Bukit Duri Sudah Pindah ke Rusun Rawa bebek, <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://news.okezone.com/read/2016/08/22/338/1469746/50-warga-bukit-duri-sudah-pindah-ke-rusun-rawa-bebek>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 11.50 WIB.
33. Achmad Fardiansyah, Pemkot Jaksel Siap Ganti Rugi Warga Bukit Duri, Senin 22 Agustus 2016, <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://news.okezone.com/read/2016/08/22/338/1469743/pemkot-jaksel-siap-ganti-rugi-warga-bukit-duri>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 11.55 WIB.
34. Achmad Sholeh, Puluhan Warga Bukit Duri Pindah Ke Rusun, Rabu 21 September 2016, <http://megapolitanpos.com/detail/2250/puluhan-warga-bukit-duri-pindah-ke-rusun>, diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 12.02 WIB.
35. Warta Kota, Relokasi Warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek dilaksanakan Minggu, <http://wartakota.tribunnews.com/2016/08/12/relokasi-warga-bukit-duri-ke-rusunawa-rawa-bebek-dilaksanakan-minggu-148>, diunduh tanggal 29 Maret 2017, jam 16.10 WIB.
36. Nur Januarita Benu, Rusunawa Rawa Bebek Habiskan Biaya Pembangunan Rp. 98 M, Selasa 2 Juli 2013, <http://economy.okezone.com/read/2013/07/02/471/830906/rusunawa-rawa-bebek-habiskan-biaya-pembangunan-rp98-m> diunduh pada tanggal 29 Maret 2017, jam 13.15 WIB.
37. <http://kabar24.bisnis.com/read/20130702/77/148316/rusunawa-rawa-bebek-telan-rp98-miliar>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017 jam 11.03 WIB.
38. Dana Aditiasari, Dibangun Jokowi Akhir 2014, Rusun Rawa bebek Siap Huni Desember 2015, Senin 27 Juni 2015, <https://finance.detik.com/properti/2976416/dibangun-jokowi-akhir-2014-rusun-rawa-bebek-siap-huni-desember-2015>, diunduh pada 29 Maret 2017 jam 14.35 WIB.

39. <http://news.metrotvnews.com/metro/aNrLmAVk-data-kk-eks-warga-bukit-duri-di-rusun-rawa-bebek-akan-dievaluasi>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017, jam 14.23 WIB.
40. <http://smartcity.jakarta.go.id/blog/56/pemprov-dki-siap-membangun-2394-unit-rusun-di-jakarta> diunduh tanggal 29 Maret 2017 jam 14.08 WIB.
41. <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/14/14194921/sudah.42.kk.warga.bukit.duri.pindah.ke.rusun.rawa.bebek>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 11.15 WIB.
42. <http://www.viva.co.id/tvone/video/59157-aparat-tertibkan-363-rumah-warga-bukit-duri> diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 11.35 WIB.
43. Riyan Ferdianto, Data Eks Warga Bukit Duri di Rusun Rawa Bebek akan Dievaluasi, Selasa, 20 September 2016 <http://news.metrotvnews.com/metro/aNrLmAVk-data-kk-eks-warga-bukit-duri-di-rusun-rawa-bebek-akan-dievaluasi>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2017 jam 15.20 WIB.
44. Dana Aditiasari, Normalisasi Ciliwung, Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp. 1.18 Triliun, <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3042642/normalisasi-ciliwung-pemerintah-sudah-gelontorkan-rp-118-triliun>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 12.47 WIB.
45. Heldania Puri Lubis, Proses Normalisasi Kali Ciliwung Masih 42 Persen, Selasa 21 Februari 2017, <http://news.detik.com/berita/d-3428447/proses-normalisasi-kali-ciliwung-masih-42-persen>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 13.03 WIB.
46. Nurita, Warga Diminta Dukung Normalisasi Kali Ciliwung, Kamis 26 Juni 2014, http://www.beritajakarta.com/read/3143/Warga_Diminta_Dukung_Normalisasi_Kali_Ciliwung, diunduh pada tanggal 30 Maret 2017, jam 13.03 WIB.
47. <http://www.beritasatu.com/megapolitan/393435-ciliwung-tak-lagi-sumber-petaka.html>, diunduh tanggal 30 Maret 2017, jam 14.47 WIB.
48. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160928105706-20-161718/ahok-klaim-bukit-duri-akan-bebas-banjir-usai-digusur/>, diunduh tanggal 30

Surat

49. Surat tertanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor: 341/-1.796.2, hal: undangan, lampiran: Daftar Undangan, yang ditandatangani oleh Walikota Administrasi Jakarta Selatan, “Sosialisasi relokasi warga Bukit Duri RW. 10, 11, 12.”
50. Surat tertanggal 19 April 2016 dengan Nomor: 571/-1.796.2, hal: undangan, lampiran: -, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan.
51. Surat tertanggal 25 April 2016 dengan Nomor: 597/-1.796.2, hal: undangan, lampiran: - , kepada: Sandiawan Sumardi (salah satu korban penggusuran), yang ditandatangani oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, “mengundang Sandiawan Sumardi (salah satu korban penggusuran) untuk mengikuti acara sosialisasi Relokasi warga kelurahan Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung ke Rusunawa Rawa bebek.”
52. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Formulir rusunawa ini baku digunakan untuk seluruh warga Jakarta yang akan menempati rusun milik pemerintah.
53. Dinas Perumahan DKI Jakarta, Pembangunan Rusunawa dan Rusunami di DKI Jakarta, Februari 2008.

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN				
								TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAM PAK YG SESUAI DG PB
1	56	1	Sulaiman/Makah	m. makah	M. Makah	Merpati 114	BD 010/012		1			
2	151	1	Makah/Sulaiman	usnawati	Usnawati	Cendrawasih 108	BD 010/012			1		
3	57	2	Mansyur	mansur	Mansur	Merpati 512	BD 010/012					1
4	28	3	Muhajirin	Muhajirin	Muhajirin	Merpati 410	BD 010 / 012					1
5	16	4	Nining	Sumardiningsih	Sumardiningsih	Merpati 502	BD 009 /012			1		
6	46	5	Jefri	Jeff Henry	Jeef Henry	Merpati 320	BD 010/012					1
7	31	6	Sukirno	Sukimo	Sukirno	Merpati 115	BD 010 / 012					1
8	49	7	Sumarni	waris	Waris	Merpati 419	BD 015 /012			1		
9	47	8	Saamah	Abdul Rozak	Abdul Rojak	Merpati 203	BD 015 /012			1		
10	58	9	A.M. Suyatin	a.m. suyatin	A. M. Suyatin	Merpati 105	BD 015 /012					1
11	102	10	Sumitra	sumirta	Sumirta	Gelatik 119	BD 015/012					1
12	50	11	Enah	jumingan	Jumingan	Merpati 318	BD 015 /012			1		
13	135	12	Sujak	akhwan rifqi	Akhwan Rifqi	Gelatik 305	BD 010/012			1		
14	101	13	Andang	andang	Andang	Gelatik 110	BD 015/012					1
15	95	14	Ella	usman	Usman	Merpati 412	BD 015/012			1		
16	48	15	Kartikah	Kartikah	Kartikah	Merpati 416	BD 015 /012					1
17	97	16	Apendi	apendi	Apendi	Merpati 404	BD 015/012					1
18	144	17	Darlis	darlis	Darlis	Gelatik 210	BD 015/012					1
19	175	18	Abduilah	somsia	Samsia/ Khuriah	Cendrawasih 115	BD 015/012			1		
20	268	19	Djasmeli	andri kurniawan	Andri Kurniawan	Cendrawasih 511	BD 015/012			1		
21	259	20	Purnama Petra	purnama petra tambun	Purnama Petra Tambunan	Merak 312	BD 015/012					1
22	258	22	Thamrin	m. thamrin	M. Thamrin	Merak 212	BD 015/012					1
23	335	24	Teti Emawati	agus jauhari	Agus Jauhari	Merak 409	BD 015/012			1		
24	94	25	Halimah	rusli	Rusli	Merpati 302	BD 015/012			1		
25	195	32	H. Munir	siti zubaedah	Siti Zubaedah	Cendrawasih 208	BD 003/011			1		
26	342	33	Rajwat	warno	Warno	Gelatik 501	BD 003/011			1		
27	266	34	Mukmin	mu'min	Mu Min	Merak 408	BD 003/011					1
28	143	40	Patimah	fatimah	Fatimah	Merak 210	BD 003/011					1
29	292	44	Kurnain	susiana	Susiana	Merak 320	BD 003/011			1		
30	298	47	Hj. Djah/Dayat	siti jamilah	Siti Jamilah	Merak 316	BD 004/011			1		
31	59	48	Husen	nana	Nana	Merpati 415	BD 004 /011			1		
32	324	49	Encang S	tirta jaya anggara	Tirta Jaya Anggara	Cendrawasih 312	BD 004/011			1		
33	171	50	Ida Mufida	ida hafidah	Ida Hafidah	Cendrawasih 110	BD 004/011			1		
34	114	147	Rojali	agus suprianto	Agus Supriyanto	Gelatik 217	BD 009/010			1		
35	147	149	Muhani	muhani	Siti Hadijah	Cendrawasih 109	BD 009/010			1		
36	80	150	Asnah	asnah thahar	Asnah Thahar	Merpati 207	BD 009/010		1			
37	221	150	Asnah	daemi tanjaya	Daemy Tanjung	Cendrawasih 407	BD 009/010			1		
38	90	152	Darmi	hj. Sudarmi	Hj. Sudarmi	Gelatik 112	BD 009/010					1
39	79	153	Sunarno	sunarno	Sunarno	Merpati 314	BD 009/010					1
40	92	154	Mulyanto	suwarno	Suwarno	Merpati 201	BD 009/010			1		
41	78	155	Titin Suherni	riyanto	Riyanto	Merpati 312	BD 009/010			1		
42	81	157	Ahmad Mustakim	ahmad mustakim	Ahmad Mustakim	Merpati 409	BD 009/010					1
43	163	158	MCK/Mulyani	eko mardiyanto	Eko Mardiyanto	Cendrawasih 116	BD 009/012			1		
44	77	159	Bawon Sutijah	bawon sutidjah	Bawon Sutidjah	Merpati 211	BD 008/010					1
45	112	160	Mulyani	agus sudarwanto	Agus Sudarwanto	Gelatik 402	BD 009/010			1		
46	91	161	Surono	surono	Surono	Merpati 402	BD 009/010					1
47	109	163	Kusnen H.	khbabib	Khabib	Gelatik 506	BD 008/010			1		
48	60	164	Sukardi/Ari	agus purwanto	Agus Purwanto	Merpati 206	BD 008/010			1		
49	71	165	Prihadiman	prihadiatman	Prihadi Atman	Merpati 303	BD 008/010					1
50	70	166	Darmo	darmo	Darmo S.	Merpati 109	BD 008/010					1
51	107	167	Sandio	sarwoto	Widi Tri Purnomo	Gelatik 414	BD 008/010			1		
52	69	168	Pariyem	pariyem	Pariyem	Merpati 220	BD 008/010					1

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN					
								TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAM PAK YG SESUAI DG PB	
53	68	169	Sarmi	sarmi	Sarmi	Merpati 305	BD 008/010						1
54	82	170	Nardi	sugeng widodo	Sugeng Widodo	Merpati 209	BD 008/010			1			
55	65	171	Sugiman/Tri Widodo/Igus	tri widodo	Tri Widodo	Merpati 101	BD 008/010						1
56	64	172	Eby Ismoyo (Tino)	mujaeni budiharto	Mujaeni Budihartono	Merpati 106	BD 008/010			1			
57	84	173	Djumiati	djumiati	Djumiati	Gelatik 115	BD 008/010						1
58	110	174	Tatang	suyatno	Suyatno	Gelatik 308	BD 008/010			1			
59	83	175	Isah	siti rohana	Siti Rohana	Merpati 215	BD 008/010			1			
60	85	176	Andre	andri maulana	Andri Maulana	Merpati 420	BD 008/010						1
61	67	177	Acim	acim	Acim	Merpati 418	BD 008/010						1
62	146	178	Agus Rizal	sarmin	Sarmin	Merpati 517	BD 009/010				1		
63	73	179	Saimih	yunita sari	Yunita Sari	Merpati 218	BD 008/010			1			
64	72	180	Sapei cs.	muhammad sayefudin	M. Syaefudin	Merpati 506	BD 008/010			1			
65	66	181	Maesaroh/Budiman	maesaroh	Siswali	Merpati 110	BD 008/010			1			
66	61	182	Asham	agung djayadi	Agung Djayadi	Merpati 217	BD 008/010			1			
67	63	183	Didik	didi nurdian abadi	Didi Nurdin Abadi	Merpati 208	BD 008/010						1
68	62	184	Cicik	aryadi	Aryadi	Merpati 510	BD 008/010			1			
69	75	185	Nurjanah	nurzainah	Nurjanah	Merak 516	BD 008/010						1
70	74	186	Mugeni	mugeni	A. Mugeni	Gelatik 311	BD 008/010						1
71	145	187	Deden	lina rosalina	Lina Rosalina	Gelatik 216	BD 008/010			1			
72	154	189	Marjuki	reza aditia	Reza Aditia	Gelatik 203	BD 006/010			1			
73	244	190	Mulyadi	mulyadi	Mulyadi	Merak 112	BD 006/010						1
74	161	191	Nurhayati	nurhayati	Nurhayati	Cendrawasih 310	BD 006/012						1
75	89	194	Rohatun, Sumarno, Hidayat	sumarno	Sumarno	Gelatik 105	BD 006/010						1
76	319	195	Subur	sri lestari	Sri Lestari	Gelatik 403	BD 006/010			1			
77	121	196	Endang	endang bin andi	Endang Bin Andi	Gelatik 104	BD 006/010						1
78	337	199	Nurlaela	siti nurlaila			BD 003/010					1	
79	162	201	Husen	tri buana tungga dewi	Tri Buana Tungga Dewi	Cendrawasih 120	BD 003/010			1			
80	88	202	Faher	sa fakhar shatry	SA. Fakhbar Shorty	Gelatik 113	BD 003/010			1			
81	130	206	Ida Dianingsih	dudy sukmana	Dody Sukmana	Gelatik 206	BD 003/010			1			
82	123	208	Mudehir cs	mudehir	Mudehir	Cendrawasih 104	BD 003/010						1
83	313	209	Sulis Dyah	tatok wahyuono adhy	Tatok Wahyuono Adhy	Merak 116	BD 003/010			1			
84	172	211	Muslim	muslim	Muslim	Gelatik 205	BD 003/010						1
85	170	212	Muslim	ibnu syaiful huda	Ibnu Syaiful Huda	Gelatik 209	BD 003/010			1			
86	173	213	Samsinar	hamzah	Hamzah	Gelatik 411	BD 003/010		1				
87	245	213	Samsinar	syafiril	Syafiril	Gelatik 401	BD 003/010			1			
88	126	215	Saripudin	m. irwan syarifudin-Irin Yanuar	Irin Yanhar S. Sos	Cendrawasih 105	BD 003/010			1			
89	128	216	Rosnah	erwin p. hutagalung	Erwin P. Hutagalung	Cendrawasih 106	BD 003/010			1			
90	149	217	Ibnu Sina/Kh. Nanang Kurnia Wahab	KH Nanang Kurnia Wahab	KH. Nanang Kurnia Wahab	Cendrawasih 119	BD 003/010						1
91	87	219	Ella	r. jamilah	R. Jamilah	Gelatik 116	BD 002/010		1				
92	125	219	Ella	unang subadi-Rini Anggraini	Rini Anggraini	Cendrawasih 101	BD 002/010			1			
93	293	234	Joko	djoko sulistiyoputro	Djoko Sulistyo Putro	Merak 201	BD 006/010						1
94	301	235	Didik	husni	Husni	Merak 420	BD 008/010			1			
95	269	237	Siti Maryam	nuraini	Nenny Ratna Sari	Merak 318	BD 008/010			1			
96	224	238	Oly Muliya	sri hartanti	Sri Hartanti	Merak 119	BD 008/010			1			
97	310	239	D. Suparta	pariah			BD 008/010					1	
98	270	240	Lispih	achmad fauzi	Achmad Fauzi	Gelatik 520	BD 008/010			1			
99	76	241	Acim	suprihatin	Suprihatin	Merpati 202	BD 008/010			1			
100	305	242	Esah/Lena	rudi firmansyah	Rudi Firmansyah	Gelatik 406	BD 008/010			1			

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	K E T E R A N G A N					
								TANPA PETA BIDANG	1 P B UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAM PAK YG SESUAI DG PB	
101	295	251	Abdul Rasyid	abdul rosyid	Abdul Rasyid	Gelatik 405	BD 009/009						1
102	332	254	Hasnah	hasanah	Hasnah	Merak 307	BD 009/009						1
103	86	255	Ruslan Effendi	drs. Ruslan effendi			BD 002/010				1		
104	96	259	Muhamad	solichin	Solichin	Merpati 406	BD 010/012		1				
105	318	259	Muhammad	syafick hermawan	Syafick Hermawan	Merpati 518	BD 002/010			1			
106	294	260	Suryadi	misriyani	Misriyani	Cendrawasih 515	BD 010/012				1		
107	100	261	Tolip	saadi	Sa adi	Merpati 520	BD 010/012				1		
108	177	262	Asmuni	bambang	Bambang	Gelatik 408	BD 010/012				1		
109	1	263	Asmat Boy	Asmat Suaip	Asmat Sueip	Merpati 308	BD 010 / 012				1		
110	139	264	Nurhalim	nurlaela bt. Misbah	Nurlaela Bin Misbah	Gelatik 317	BD 010/012				1		
111	167	265	Abd. Hamid	abd. Hamid	ABD. Hamid	Gelatik 201	BD 010/012						1
112	103	267	Haimi	barkah	Siti Barkah	Merpati 511	BD 010/012				1		
113	32	268	Sapuaana/Boy	Sutrisno	Sutrisno	Merpati 307	BD 010 / 012				1		
114	98	269	Cecep Samsudin	cecep samsudin	Cecep Samsudin	Gelatik 114	BD 010/012						1
115	38	270	Slamet	Ahmad Fuad	Ahmad Fuad	Merpati 210	BD 010 / 012		1				
116	115	270	Slamet	irawan hr	Irawan HR.	Gelatik 511	BD 010/012				1		
117	2	271	Salim, Suparman, Sofiah,Nisa, Neneng, Jarkasih, Darmawati, Joni, Saman, Ade Suhaya	Tuti	Tuti	Merpati 213	BD 010/012				1		
118	19	272	Hj. Muryati	Muryati	Muryati	Merpati 104	BD 010/012						1
119	42	273	Kurnaen, Holillah	Kurnaen	Kurnaen	Merpati 310	BD 010 / 012						1
120	41	274	Djamilah	Djamilah	Djamilah	Merpati 108	BD 010 / 012						1
121	222	275	H. Ramdani, Mulki	kaharudin misbah	Iwan Dermawan	Cendrawasih 404	BD 010/012				1		
122	53	276	Usni Rojali, Ceminah, Hanapi, Salam, Tara	usni rojali	Usni Rojali	Merpati 212	BD 010/012						1
123	52	277	Royana/Tuti	haerul harun	Haerul Harun	Merpati 408	BD 010/012				1		
124	27	278	Mastun	Nisah	Nisah	Merpati 120	BD 010 / 012				1		
125	33	279	M. Yasin	MuharnrnadYasin	Yasin	Merpati 319	BD 010 / 012						1
126	296	280	Kimah/Badi	jefri	Jefri	Merak 306	BD 010/012				1		
127	39	281	Sakinah	Sakinah			BD 010 / 012					1	
128	22	282	Abd. Rahman	Abdul Rahman	Abdul Rahman	Merpati 219	BD 010 / 012						1
129	21	283	Maryati, Anis	Anis Maulida	Anis Maulida	Merpati 313	BD 010/012		1				
130	93	283	Maryati, Anis	maryati	Maryati	Cendrawasih 211	BD 010/012						1
131	20	284	Syarif Maulana, Embeh	Syarif Maulana	Syarif Maulana	Merpati 111	BD 010/012						1
132	18	285	M. Iqbal-Hairini	Muhamad Iqbal	Muhamad Iqbal	Merpati 113	BD 010/012						1
133	35	286	Firdaningsih	Firda Ningsih	Firdah Ningsih	Merpati 507	BD 010 / 012						1
134	29	287	Dimiyati	Hairani	Hairani	Merpati 407	BD 010 / 012				1		
135	142	288	Arsat	komar rudin	Komarudin	Gelatik 314	BD 010/012				1		
136	30	289	Suhana, Budiman, Nu	suhana	Suhana	Merpati 414	BD 010 / 012						1
137	55	290	Marhasan, Zaenal Abidin	siti nurbaya	Achmad Nasochah	Merpati 315	BD 010/012				1		
138	153	292	Sugiarti	sugiarti	Sugiarti	Gelatik 310	BD 010/012						1
139	43	293	Katmia Edi Susanto	Ahmad Yosep	Achmad Yosep	Merpati 503	BD 010 / 012				1		
140	51	294	Mail	ismail	Ismail	Merpati 411	BD 010/012						1
141	37	295	Umar	Muhamad Umar	M. Umar	Merpati 107	BD 010 / 012						1
142	137	296	Sofyan Hadi	sofyan hadi	Sopyan Hadi	Gelatik 417	BD 010/012						1
143	36	297	Sain	Saih	Saih	Merpati 301	BD 010 / 012						1
144	17	298	Rudi Maridi	Rudi	Rudi	Merpati 116	BD 010 /012						1
145	34	299	Hayati Alamiah	Alamiyah	Alamiyah	Merpati 205	BD 010 / 012						1
146	152	300	Amril	amril	Amril	Gelatik 307	BD 010/012						1

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN					
								TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAM PAK YG SESUAI DG PB	
147	140	301	Arpin	arpin	Aripin	Gelatik 312	BD 010/012						1
148	148	302	Slamet Sutejo	arpe	Arpe	Gelatik 302	BD 010/012			1			
149	23	303	Abd. Rahman Gani	Abd Rachman Gani	ABD. Rachman	Merpati 117	BD 010 / 012						1
150	119	304	Kocen	murdjiyo	Murdjiyo	Gelatik 109	BD 010/012			1			
151	117	305	Rozikin	rozikin	Rozikin	Gelatik 416	BD 010/012						1
152	236	313	Asep Rahmat	sarman	Sarman	Cendrawasih 406	BD 006/012			1			
153	166	318	Kurdi Kurniawan	achmad saripudin	Achmad Saripudin	Gelatik 318	BD 006/012			1			
154	336	320	Hanapi bin Ambit	suderadjat	Sudrajat	Gelatik 410	BD 006/012			1			
155	178	324	Saodah	yuli yanti	Yuli Yanti	Cendrawasih 117	BD 006/012			1			
156	262	324	Saodah	saodah bt. Saadih-178	Saodah Bt. Saadih	Merak 114	BD 006/012		1				
157	133	325	Adjie Zubaer	adjie zubaer	Adjie Zubaer	Cendrawasih 102	BD 006/012						1
158	340	327	Marnih	mardani	Mardani	Merak 519	BD 006/012			1			
159	263	330	Badriah cs	badriah			BD 006/012					1	
160	344	332	Koko	irlani	Irlani	Cendrawasih 417	BD 006/012			1			
161	264	333	Rusmawati	rusmawati	Rusmawati S.	Merak 102	BD 006/012						1
162	260	342	Ismail Hasan	ismail hasan	Ismail Hasan	Merak 103	BD 006/012						1
163	325	343	Sumitro	suripto	Suripto	Cendrawasih 504	BD 006/012			1			
164	339	344	Ahmad Mulyana	ahmad mulyana	Achmad Mulyana	Cendrawasih 514	BD 006/012						1
165	250	346	Drs. Kadira	lukman nur hakim-	-	Cendrawasih 401	BD 006/012					1	
166	232	347	Hj. Tuti, Hj Euis, Rizal, Ilansyah	muhammad rizaliansyah st.	Muhammad Rizaliansyah	Merak 205	BD 005/012						1
167	276	349	Narti	ramlan	Ramlan	Merak 510	BD 005/012			1			
168	241	350	Sarju	sarju	Sarju	Merak 113	BD 005/012						1
169	179	352	Jeffri Widodo	jeffri widodo	Jeffri Widodo	Cendrawasih 419	BD 005/012						1
170	248	353	Mursinah	madi	Madi	Merak 206	BD 005/012			1			
171	229	354	Sumarsih	asmani	Asmani	Cendrawasih 318	BD 005/012			1			
172	189	355	Sukoto	sukoyo	Sukoyo	Cendrawasih 213	BD 005/012						1
173	201	356	Mail	ismail	Ismail	Cendrawasih 204	BD 005/012						1
174	132	357	Zaenal Abidin	zaenal abidin	Zaenal Abidin	Cendrawasih 416	BD 005/012						1
175	217	358	Edi K.	edi kurniawan	Edy Kurniawan	Cendrawasih 212	BD 005/012						1
176	208	359	Munir	munir	Munir	Cendrawasih 206	BD 005/012						1
177	212	360	Yohan	yohan arifyansah	Yohan Arifyansyah	Cendrawasih 301	BD 005/012						1
178	228	361	Ratib	mulyono	Mulyono	Cendrawasih 303	BD 005/012			1			
179	211	362	Tedi	tedi feriyansyah	Tedi Feriyansyah	Cendrawasih 512	BD 005/012						1
180	210	363	Sobari	sobari	Sobari	Cendrawasih 402	BD 005/012						1
181	6	364	Wardi	Alfian Wardi	Alfian Wardi	Merpati 204	BD 005 /012		1				
182	218	364	Wardi	wardi	Anih	Cendrawasih 313	BD 005/012			1			
183	188	365	Maimun	Makmun	Makmun	Cendrawasih 111	BD 005/012						1
184	185	366	Ngatjem	abu bakar	Abu bakar	Cendrawasih 217	BD 005/012			1			
185	196	367	Musiyem/Sahroni	mujiyem	Mujiyem/ Mujiem	Cendrawasih 201	BD 005/012						1
186	230	368	Jasandi	rosyati	Rosyati	Cendrawasih 207	BD 005/012			1			
187	203	369	Maryati Ramin	maryati	Maryati	Gelatik 103	BD 005/012						1
188	204	370	Yati S.	yati sutaryah	Yati Sutaryah	Cendrawasih 205	BD 005/012						1
189	213	371	Iwan	erlan setiawan	Erlan Setiawan	Cendrawasih 408	BD 005/012			1			
190	9	372	M. Jusuf	Mohamad Jusuf	Muhamad Jusuf	Merpati 102	BD 005/ 012						1
191	192	373	Oman	oman	Mela Adelia	Gelatik 508	BD 005/012			1			
192	277	374	Dedeh Soidah	agus halim	Agus Halim	Merak 302	BD 005/012			1			
193	215	375	Andri Kurniawan	hakim paton	Hakim Paton	Cendrawasih 317	BD 005/012			1			
194	190	376	Nur Salam	nur salam	Nur salam	Cendrawasih 202	BD 005/012						1

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN					
								TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAM PAK YG SESUAI DG PB	
195	200	377	Yati Cutaryati	hadijah	Hadijah	Cendrawasih 320	BD 005/012				1		
196	242	378	Jarudin	ahmad najarudin	Ahmad Najarudin	Merak 309	BD 005/012						1
197	182	379	Nari	nari	Nari	Cendrawasih 214	BD 005/012						1
198	44	380	Irwanto	Irwanto	Irwanto	Merpati 501	BD 005/012						1
199	249	381	Aryani/Lukman	yati rohayati, s. pd.	-	Merak 305	BD 005/012					1	
200	191	382	Asubana/Firdaus R	ajeng purnamasari	Ajeng Purnamasari	Cendrawasih 302	BD 005/012				1		
201	10	383	M. Teguh/Irfan	M Teguh	M. Teguh	Merpati 316	BD 005/ 012						1
202	184	384	Ishak	ishak	Ishak	Cendrawasih 118	BD 005/012						1
203	181	385	Efendi	effendi	Effendi	Cendrawasih 113	BD 005/012						1
204	45	387	Sam Suwardi	Sam Suwardi	Sam Suwardi	Merpati 403	BD 005/012						1
205	238	388	Hasan Basri	wahyuni	Wahyuni	Cendrawasih 319	BD 005/012				1		
206	194	389	Farman	suparman	suparman	Cendrawasih 218	BD 005/012				1		
207	206	390	Marlis Yanuar	marlis yanuar	Marlia Yanuar	Cendrawasih 314	BD 005/012						1
208	193	391	Ismat Ican	ismat ican	Ismat Ican	Cendrawasih 306	BD 005/012						1
209	214	392	Emi S.	surya shandy	Surya Shandy	Cendrawasih 307	BD 005/012				1		
210	187	393	Inem	inem	Inen	Gelatik 303	BD 005/012						1
211	199	394	Rohiman	rohiman			BD 005/012					1	
212	197	395	Achmad Demiyati	achmad demiyati	Achmad Demiyati	Cendrawasih 216	BD 005/012						1
213	186	396	Ngatjem	ngatjem	Ngatjem	Cendrawasih 203	BD 005/012						1
214	205	397	Yanti	sri suyanti	Sri Suyanti	Cendrawasih 209	BD 005/012						1
215	198	398	Asep Supriyana	asep supriyatna	Asep Supriyatna	Cendrawasih 215	BD 005/012						1
216	180	399	Jalyar	zalyar	Zaiyar	Gelatik 214	BD 005/012						1
217	246	400	Mamad	romlah			BD 005/012					1	
218	164	401	Wono	tarwono	Tarwono	Gelatik 319	BD 005/012						1
219	216	402	Rahman Hakim	sudrajat	Sudrajat	Cendrawasih 305	BD 005/012				1		
220	174	403	Marsono	marsono	Marsono	Gelatik 313	BD 005/012						1
221	8	404	Sumini/Dadang	Sumini	Sumini	Gelatik 211	BD 005/ 012						1
222	15	405	Haji Sopiah/Ruri	Rury Firmansyah	Rury Firmansyah	Merpati 309	BD 005/ 012						1
223	54	406	Muhammad	muhamad	Muhammad	Merpati 118	BD 005 /012						1
224	183	407	Zaenah	zaenah	Zaenah	Cendrawasih 112	BD 005/012						1
225	13	408	Gunawan	Gunawan	Gunawan	Merpati 509	BD 005/ 012						1
226	12	409	Bambang S./Hasim	Bambang Supriyanto	Bambang Supriyanto	Merpati 112	BD 005/ 012						1
227	275	411	Prayitno	ridwan	Ridwan	Gelatik 513	BD 005/012				1		
228	155	412	Manto	irma suyanto	Irma Suyanto	Gelatik 309	BD 005/012				1		
229	209	413	Edy Sulistiyono	edy sulistiyono	Edy Sulistiono	Cendrawasih 420	BD 005/012						1
230	243	414	Syarifudin	syarifudin	Armelia Rosdiana	Merak 202	BD 005/012				1		
231	160	415	Alex	irwan	Irwan	Gelatik 215	BD 005/012				1		
232	11	416	Ajat Sudrajat	Jajat Sudrajat	Jajat Sudrajat	Merpati 103	BD 005/ 012						1
233	14	418	Nur Ali	NurAlii	Nur Alii	Merpati 304	BD 005/ 012						1
234	104	419	Rachmat	rachmat	Rachmat	Gelatik 118	BD 005/012						1
235	231	420	Azisman	rumiyati	Rumiyati	Cendrawasih 308	BD 005/012				1		
236	207	421	Hasanah	hasanah	Hasanah	Cendrawasih 220	BD 005/012						1
237	202	422	Husnah	usnah b. yunus	Usnah B. Yunus	Gelatik 102	BD 005/012						1
238	343	430	H. Rosikin	nur rachmah			BD 007/012					1	
239	302	432	Wismar	fatmah	Fatimah	Gelatik 117	BD 007/012				1		
240	159	433	H.Hidayat, Heni Siti R/Nurharyanto/Yuni Arsanti/Siti Muslikah, Lingga Tanudjadja	marliana suhandi	Marliana Suhandi	Gelatik 208	BD 009/012				1		

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN				
								TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAMPAK YG SESUAI DG PB
241	168	433	H.Hidayat, Heni Siti R/Nurharyanto/Yuni Arsanti/Siti Muslikah, Lingga Tanudjadja	lingga tanudjaja	Lingga Tanudjaja	Gelatik 503	BD 009/012		1			
242	158	434	Daryati, Wahyudi	daryati	Daryati	Gelatik 306	BD 009/012		1			
243	272	434	Daryati, Wahyudi	wahyudi	Wahyudi	Merak 410	BD 009/012					1
244	157	435	Rustadi	rustadi	Purnawati	Gelatik 218	BD 009/012			1		
245	156	436	Nurmali	nurmali	Nurmali	Gelatik 207	BD 009/012					1
246	251	437	Hanifah	hanifah	Hanifah	Merak 512	BD 009/012					1
247	253	438	Budi Asmarajaya	hanifah	Hanifah	Merak 402	BD 009/012			1		
248	169	439	Susmiari	dadat hendarin	Dadat Hendarin	Cendrawasih 114	BD 009/012			1		
249	309	440	Rina	rina	Rina	Merak 219	BD 009/012					1
250	271	441	Hj. Komariah	hj. Komariah	Hj. Komariah	Merak 106	BD 009/012					1
251	314	442	H. Dimiati	vazar	Vazar	Merak 413	BD 009/012			1		
252	252	443	Mamat, Agus Arisman	mamat	Mamat	Merak 104	BD 009/012					1
253	254	444	Maryanih	maryani	Maryani	Merak 207	BD 009/012					1
254	323	445	Ardiansyah	dadang	Dadang	Merak 506	BD 009/012			1		
255	328	448	Muhamad Iqbal	siti waridah	Siti Waridah	Merak 313	BD 009/012			1		
256	308	450	Iwan	rachmad kurniawan			BD 009/012					1
257	265	451	Makenun	makenun	Achmad Fadilah	Merak 111	BD 012/012			1		
258	227	456	Yunus	m. Yustadi	M. Yustadi	Cendrawasih 315	BD 013/012			1		
259	219	457	Abd. Hakim	moh. Sidik bin syukur	Moh. Sidik Bin Syukur	Cendrawasih 316	BD 013/012			1		
260	225	458	Jemmy	tumini-Melly Kusmaini	Melly Kusmaini	Cendrawasih 311	BD 013/012			1		
261	3			Jarkasih	Jarkasih	Merpati 413	BD 010/ 012	1				
262	4			M. Sa'im	M. Salim	Gelatik 106	BD 010/012	1				
263	5			Saman	Saman	Merpati 311	BD 010/012	1				
264	7			Reky Ardian	Reky Ardian	Merpati 513	BD 005/ 012	1				
265	24			Sumiyati			BD 010 / 012					1
266	25			Indra	Indra	Merpati 515	BD 010 / 012	1				
267	26			Sanaiyah	Sanaiyah	Merpati 119	BD 010 / 012	1				
268	40			martinus	Martinus	Merpati 401	BD 010 / 012	1				
269	99			mukayah	Mukayah	Gelatik 108	BD 005/012	1				
270	105			zainal abidin	Zaenal Abidin	Gelatik 120	BD 010/012	1				
271	106			dina maryani	Dina Maryani	Gelatik 202	BD 010/012	1				
272	108			tedi gunawan	Tedi Gunawan	Gelatik 404	BD 010/012	1				
273	111			nuryani	Nuryani	Gelatik 516	BD 010/012	1				
274	113			suparman	Suparman	Gelatik 204	BD 010/012	1				
275	116			achyani	Achyani	Gelatik 107	BD 010/012	1				
276	118			suja	Suja	Gelatik 212	BD 010/012	1				
277	120			yuli	Suhartati	Gelatik 111	BD 010/012	1				
278	122			tara	Tara	Gelatik 220	BD 010/012	1				
279	124			salam	Salam	Gelatik 316	BD 010/012	1				
280	127			h. syafrudin wahab	H. Syafrudin Wahab	Cendrawasih 107	BD 003/010	1				
281	129			minah	Jali	Gelatik 101	BD 010/012	1				
282	131			ade suhaya	Ade Suhaya	Gelatik 413	BD 010/012	1				
283	134			dedi mulyadi	Dedi Mulyadi	Gelatik 304	BD 010/012	1				
284	136			lismawati-Johan	Johan	Cendrawasih 103	BD 010/012	1				
285	138			achmad taufik	Achmad Taufik	Gelatik 502	BD 010/012	1				
286	141			abdul rohim	Abdul Rohim	Gelatik 301	BD 010/012	1				
287	150			ahmad zikrilah	Wulandari	Gelatik 320	BD 003/010	1				

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN				
								TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAM PAK YG SESUAI DG PB
288	165			munarta	Munarta	Gelatik 219	BD 010/012	1				
289	176			r. h. khomaini	RH. Khomaini	Gelatik 213	BD 015/012	1				
290	220			abdul mutholib	Abdul Mutholib	Cendrawasih 304	BD 014/012	1				
291	223			agsu rizal	Agus Rizal	Gelatik 315	BD 008/010	1				
292	226			mardjuki	Mardjuki	Cendrawasih 219	BD 013/012	1				
293	233			hj. Tuti turyati	Hj. Tuti Turyati	Merak 115	BD 005/012	1				
294	234			teguh ikhwanul karim	Teguh Ikhwanul Karim	Merpati 417	BD 006/012	1				
295	235			hj. Euis komaningsih	HJ. Euis Komaningsih	Cendrawasih 403	BD 006/012	1				
296	237			m. yunus			BD 013/012				1	
297	239			muhammad ridzal	Muhammad Ridzal SH.	Cendrawasih 410	BD 006/012	1				
298	240			suhelda ayuningsih	Suhelda Ayuningsih	Merpati 405	BD 006/012	1				
299	247			mulyanto	Mulyanto	Merak 317	BD 009/012	1				
300	255			suhailah	Suhailah	Merak 107	BD 014/012	1				
301	256			abd rachman bin syukur	ABD. Rahman Bin Syukur	Merak 308	BD 014/012	1				
302	257			muhamad nafis	Muhamad Napis	Gelatik 415	BD 014/012	1				
303	261			ade firdaus hasan	Ade Firdaus Hasan	Cendrawasih 409	BD 006/012	1				
304	267			rasimun	Rasimun	Merak 218	BD 013/012	1				
305	273			hidayat	Hidayat	Merak 411	BD 006/012	1				
306	274			liu kim khiun	Liu Kim Khiun	Merak 109	BD 013/012	1				
307	278			saimah			BD 005/012				1	
308	279			amin	Amin	Merak 108	BD 005/012	1				
309	280			sabar	Sabar	Gelatik 407	BD 005/012	1				
310	281			nurhayati	Nurhayati	Merak 418	BD 005/012	1				
311	282			danu	Danu	Cendrawasih 505	BD 004/012	1				
312	283			taam			BD 005/012				1	
313	284			andi yos sudarso	Andi Yos Sudarso	Gelatik 412	BD 005/012	1				
314	285			abd. Rohim	Suci Wulandari	Gelatik 419	BD 004/012	1				
315	286			madinah	Madinah	Gelatik 514	BD 004/012	1				
316	287			iin	Ida Wati	Merak 101	BD 005/012	1				
317	288			marhaya	Marhaya	Merak 105	BD 005/012	1				
318	289			kusnadi	Kusnadi	Merak 412	BD 005/012	1				
319	290			yetnatety	Yetnatety	Merak 208	BD 005/012	1				
320	291			a. rojak	A Rojak	Merak 416	BD 006/012	1				
321	297			nurdiana	Nardiana	Merpati 508	BD 009/009	1				
322	299			pandu pribadi	Pandu Pribadi	Merak 209	BD 008/010	1				
323	300			sagita maya	Sagita Maya	Merak 405	BD 008/010	1				
324	303			kamilan	Kamilah	Merak 507	BD 006/012	1				
325	304			darmiyati	Darmiyati	Merak 319	BD 007/012	1				
326	306			muhammad ikhsan			BD 005/012				1	
327	307			ridwan arifin-	Ridwan Arifin	Cendrawasih 411	BD 005/012	1				
328	311			maimunah	Maimunah	Merak 213	BD 005/012	1				
329	312			mulyono	Mulyono	Merpati 505	BD 009/009	1				
330	315			eldi maqfira	Eldi Maqfira	Merak 504	BD 009/009	1				
331	316			herry supriyanto	Herry Supriyanto	Merpati 519	BD 015/012	1				
332	317			irma nur fazriah	Irma Nur Fazriah	Merak 503	BD 003/010	1				
333	320			cahyana	Cahyana	Merak 314	BD 006/012	1				
334	321			husin	Husin	Merak 415	BD 006/012	1				
335	322			cecep	Cecep	Merak 501	BD 006/012	1				

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
MENURUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016**

NO. URUT	NO. URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA DI LAPORAN LURAH BUKIT DURI TERTANGGAL 21 OKTOBER 2016	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN				
								TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	TAK ADA DATA DI RUSUNAWA	WARGA TERDAMPAK YG SESUAI DG PB
336	326			syarifudin	Syariffudin	Merak 502	BD 005/012	1				
337	327			ratnawati-	Ratnawati	Cendrawasih 518	BD 006/012	1				
338	329			mohamad gunawan	Mohamad Gunawan	Merak 311	BD 005/012	1				
339	330			Dede Sumarna	Dede Sumarna	Merak 520	BD 005/012	1				
340	331			linda	Linda	Merak 513	BD 006/012	1				
341	333			farah	Farah	Merak 310	BD 009/009	1				
342	334			siti yusliah	Siti Yusliah	Cendrawasih 510	BD 013/012	1				
343	338			nuryati	Nuryati	Merak 417	BD 006/012	1				
344	341			basri	Basri	Merpati 516	BD 010/012	1				
345	345			henny siti rochaeni-	Henny Siti Rochaeni	Cendrawasih 413	BD 009/012	1				
346	346			h. hidayat	Hasan Hidayat	Merpati 504	BD 009/012	1				
J U M L A H								81	11	117	16	121
KETERANGAN:												
Jumlah warga yang ambil rusunawa menurut laporan Lurah Bukit Duri tertanggal 21 Oktober 2016									346			
Yang tidak memiliki peta bidang								81		23.41	%	
1 Peta Bidang memperoleh 2 unit rusunawa								11		3.18	%	
Nama penerima rusunawa tidak sama dengan nama pemilik peta bidang								117		33.82	%	
Nama yang dilaporkan tidak termasuk sebagai penghuni rusunawa								16		4.62	%	
Penerima rusunawa yang dilaporkan yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki								121		34.97	%	

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK MERPATI
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
1	65	171	Sugiman/Tri Widodo/Igus	Tri Widodo	Merpati 101	BD 008/010							1
2	9	372	M. Jusuf	Muhamad Jusuf	Merpati 102	BD 005/ 012							1
3	11	416	Ajat Sudrajat	Jajat Sudrajat	Merpati 103	BD 005/ 012							1
4	19	272	Hj. Muryati	Muryati	Merpati 104	BD 010/012							1
5	58	9	A.M. Suyatin	A. M. Suyatin	Merpati 105	BD 015 /012							1
6	64	172	Eby Ismoyo (Tino)	Mujaeni Budihartono	Merpati 106	BD 008/010			1				
7	37	295	Umar	M. Umar	Merpati 107	BD 010 / 012							1
8	41	274	Djamilah	Djamilah	Merpati 108	BD 010 / 012							1
9	70	166	Darmo	Darmo S.	Merpati 109	BD 008/010							1
10	66	181	Maesaroh/Budiman	Siswali	Merpati 110	BD 008/010			1				
11	20	284	Syarif Maulana, Embeh	Syarif Maulana	Merpati 111	BD 010/012							1
12	12	409	Bambang S./Hasim	Bambang Supriyanto	Merpati 112	BD 005/ 012							1
13	18	285	M. Iqbal-Hairini	Muhamad Iqbal	Merpati 113	BD 010/012							1
14	56	1	Sulaiman/Makah	M. Makah	Merpati 114	BD 010/012			1				
15	31	6	Sukirno	Sukirno	Merpati 115	BD 010 / 012							1
16	17	298	Rudi Maridi	Rudi	Merpati 116	BD 010 /012							1
17	23	303	Abd. Rahman Gani	ABD. Rachman	Merpati 117	BD 010 / 012							1
18	54	406	Muhammad	Muhammad	Merpati 118	BD 005 /012							1
19	26			Sanaiyah	Merpati 119	BD 010 / 012			1				
20	27	278	Mastun	Nisah	Merpati 120	BD 010 / 012				1			
21	92	154	Mulyanto	Suwarno	Merpati 201	BD 009/010				1			
22	76	241	Acim	Suprihatin	Merpati 202	BD 008/010				1			
23	47	8	Saamah	Abdul Rojak	Merpati 203	BD 015 /012				1			
24	6	364	Wardi	Alfian Wardi	Merpati 204	BD 005 /012			1				
25	34	299	Hayati Alamiah	Alamiyah	Merpati 205	BD 010 / 012							1
26	60	164	Sukardi/Ari	Agus Purwanto	Merpati 206	BD 008/010				1			
27	80	150	Asnah	Asnah Thahar	Merpati 207	BD 009/010			1				
28	63	183	Didik	Didi Nurdin Abadi	Merpati 208	BD 008/010							1
29	82	170	Nardi	Sugeng Widodo	Merpati 209	BD 008/010				1			
30	38	270	Slamet	Ahmad Fuad	Merpati 210	BD 010 / 012			1				
31	77	159	Bawon Sutijah	Bawon Sutidjah	Merpati 211	BD 008/010							1
32	53	276	Usni Rojali, Ceminah, Hanapi, Salam, Tara	Usni Rojali	Merpati 212	BD 010/012							1
33	2	271	Salim, Suparman, Sofiah,Nisa, Neneng, Jarkasih, Darmawati, Joni, Saman, Ade Suhaya	Tuti	Merpati 213	BD 010/012				1			
34				Abidin	Merpati 214	BD			1				1
35	83	175	Isah	Siti Rohana	Merpati 215	BD 008/010				1			
36				Sukamah	Merpati 216	BD			1				1
37	61	182	Asham	Agung Djayadi	Merpati 217	BD 008/010				1			
38	73	179	Saimih	Yunita Sari	Merpati 218	BD 008/010				1			
39	22	282	Abd. Rahman	Abdul Rahman	Merpati 219	BD 010 / 012							1
40	69	168	Pariyem	Pariyem	Merpati 220	BD 008/010							1
41	36	297	Sain	Saih	Merpati 301	BD 010 / 012							1
42	94	25	Halimah	Rusli	Merpati 302	BD 015/012				1			
43	71	165	Prihadiman	Prihad Atman	Merpati 303	BD 008/010							1
44	14	418	Nur Ali	Nur Ali	Merpati 304	BD 005/ 012							1
45	68	169	Sarmi	Sarmi	Merpati 305	BD 008/010							1
46				Esti Limawati	Merpati 306	BD			1				1
47	32	268	Sapuana/Boy	Sutrisno	Merpati 307	BD 010 / 012				1			
48	1	263	Asmat Boy	Asmat Sueip	Merpati 308	BD 010 / 012				1			
49	15	405	Haji Sopiiah/Ruri	Rury Firmansyah	Merpati 309	BD 005/ 012							1
50	42	273	Kurnaen, Holilah	Kurnaen	Merpati 310	BD 010 / 012							1
51	5			Saman	Merpati 311	BD 010/012			1				
52	78	155	Titin Suherni	Riyanto	Merpati 312	BD 009/010				1			
53	21	283	Maryati, Anis	Anis Maulida	Merpati 313	BD 010/012			1				
54	79	153	Sunarno	Sunarno	Merpati 314	BD 009/010							1
55	55	290	Marhasan, Zaenal Abidin	Achmad Nasochah	Merpati 315	BD 010/012				1			
56	10	383	M. Teguh/Irfan	M. Teguh	Merpati 316	BD 005/ 012							1
57				Ely Dahlia	Merpati 317	BD			1				1
58	50	11	Enah	Jumingan	Merpati 318	BD 015 /012				1			
59	33	279	M. Yasin	Yasin	Merpati 319	BD 010 / 012							1
60	46	5	Jeфри	Jeef Henry	Merpati 320	BD 010/012							1
61	40			Martinus	Merpati 401	BD 010 / 012			1				
62	91	161	Surono	Surono	Merpati 402	BD 009/010							1
63	45	387	Sam Suwardi	Sam Suwardi	Merpati 403	BD 005/012							1
64	97	16	Apendi	Apendi	Merpati 404	BD 015/012							1
65	240			Suheida Ayuningsih	Merpati 405	BD 006/012			1				
66	96	259	Muhamad	Solichin	Merpati 406	BD 010/012				1			
67	29	287	Dimiyati	Hairani	Merpati 407	BD 010 / 012					1		
68	52	277	Royana/Tuti	Haerul Harun	Merpati 408	BD 010/012				1			
69	81	157	Ahmad Mustakim	Ahmad Mustakim	Merpati 409	BD 009/010							1
70	28	3	Muhajirin	Muhajirin	Merpati 410	BD 010 / 012							1
71	51	294	Mail	Ismail	Merpati 411	BD 010/012							1
72	95	14	Ella	Usman	Merpati 412	BD 015/012				1			
73	3			Jarkasih	Merpati 413	BD 010/ 012			1				
74	30	289	Suhana, Budiman, Nuryani	Suhana	Merpati 414	BD 010 / 012							1

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK MERPATI
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERASAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
75	59	48	Husen	Nana	Merpati 415	BD 004 /011			1				
76	48	15	Kartikah	Kartikah	Merpati 416	BD 015 /012					1		
77	234			Teguh Ikhwanul Karim	Merpati 417	BD 006/012	1						
78	67	177	Acim	Acim	Merpati 418	BD 008/010					1		
79	49	7	Sumarni	Waris	Merpati 419	BD 015 /012			1				
80	85	176	Andre	Andri Maulana	Merpati 420	BD 008/010					1		
81	44	380	Irwanto	Irwanto	Merpati 501	BD 005/012					1		
82	16	4	Nining	Sumardiningsih	Merpati 502	BD 009 /012			1				
83	43	293	Katmia Edi Susanto	Achmad Yosep	Merpati 503	BD 010 / 012			1				
84	346			Hasan Hidayat	Merpati 504	BD 009/012	1						
85	312			Mulyono	Merpati 505	BD 009/009	1						
86	72	180	Sapei cs.	M. Syaefudin	Merpati 506	BD 008/010			1				
87	35	286	Firdaningsih	Firdah Ningsih	Merpati 507	BD 010 / 012					1		
88	297			Nardiana	Merpati 508	BD 009/009	1						
89	13	408	Gunawan	Gunawan	Merpati 509	BD 005/ 012					1		
90	62	184	Ciclih	Aryadi	Merpati 510	BD 008/010			1				
91	103	267	Haimi	Siti Barkah	Merpati 511	BD 010/012			1				
92	57	2	Mansyur	Mansur	Merpati 512	BD 010/012					1		
93	7			Reky Ardian	Merpati 513	BD 005/ 012	1						
94				Khotimah	Merpati 514	BD	1					1	
95	25			Indra	Merpati 515	BD 010 / 012	1						
96	341			Basri	Merpati 516	BD 010/012	1						
97	146	178	Agus Rizal	Sarmin	Merpati 517	BD 009/010			1				
98	318	259	Muhammad	Syafick Hermawan	Merpati 518	BD 002/010			1				
99	316			Herry Supriyanto	Merpati 519	BD 015/012	1						
100	100	261	Tolip	Sa adi	Merpati 520	BD 010/012			1				
J U M L A H							18	6	31	0	0	45	5

KETERANGAN:

Dibandingkan dengan jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek

Jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek-Blok Merpati		100			
Yang tidak memiliki peta bidang	18	18.00	%		
1 Peta Bidang memperoleh 2 unit rusunawa	6	6.00	%		
Nama penerima rusunawa tidak sama dengan nama pemilik peta bidang	31	31.00	%		
Penghuni yang berasal dari luar Bukit Duri	0	-	%		
Unit yang kosong	0	-	%		
Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki	45	45.00	%		
Unit yang tidak termasuk dalam laporan Lurah Bukit Duri	5				

Dibandingkan dengan jumlah Peta Bidang

Jumlah Peta Bidang (dikurangi korban pengusuran pada bulan Januari 2016): 460 - 97 =

Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki

	363	
45	12	%

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK MERAK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
1	287			Ida Wati	Merak 101	BD 005/012	1						
2	264	333	Rusmawati	Rusmawati S.	Merak 102	BD 006/012							1
3	260	342	Ismail Hasan	Ismail Hasan	Merak 103	BD 006/012							1
4	252	443	Mamat, Agus Arisma	Mamat	Merak 104	BD 009/012							1
5	288			Marhaya	Merak 105	BD 005/012	1						
6	271	441	Hj. Komariah	Hj. Komariah	Merak 106	BD 009/012							1
7	255			Suhailah	Merak 107	BD 014/012	1						
8	279			Amin	Merak 108	BD 005/012	1						
9	274			Liu Kim Khiun	Merak 109	BD 013/012	1						
10				Solha Sri Wirtati	Merak 110	Gg Arus				1			1
11	265	451	Makenun	Achmad Fadilah	Merak 111	BD 012/012			1				
12	244	190	Mulyadi	Mulyadi	Merak 112	BD 006/010							1
13	241	350	Sarju	Sarju	Merak 113	BD 005/012							1
14	262	324	Saodah	Saodah Bt. Saadiah	Merak 114	BD 006/012		1					
15	233			Hj. Tuti Turyati	Merak 115	BD 005/012	1						
16	313	209	Sulis Dyah	Tatok Wahyuono Adhy	Merak 116	BD 003/010				1			
17				Ramlah	Merak 117	BD	1						1
18				Intan Hanggar Kusuma	Merak 118	Gg Arus				1			1
19	224	238	Oly Muliya	Sri Hartanti	Merak 119	BD 008/010				1			
20				Salmah	Merak 120	BD	1						1
21	293	234	Joko	Djoko Sulistyio Putro	Merak 201	Gg 006/010							1
22	243	414	Syarifudin	Armelia Rosdiana	Merak 202	BD 005/012				1			
23				Ratnawati	Merak 203	BD	1						1
24				HJ. Tuti Turyati	Merak 204	BD	1						1
25	232	347	Hj. Tuti, Hj Euis, Rizal, Ilansyah	Muhammad Rizaliansyah	Merak 205	BD 005/012							1
26	248	353	Mursinah	Madi	Merak 206	BD 005/012				1			
27	254	444	Maryanih	Maryani	Merak 207	BD 009/012							1
28	290			Yetnatety	Merak 208	BD 005/012	1						
29	299			Pandu Pribadi	Merak 209	BD 008/010	1						
30	143	40	Patimah	Fatimah	Merak 210	BD 003/011							1
31				Kharudin Misbah	Merak 211	BD	1						1
32	258	22	Thamrin	M. Thamrin	Merak 212	BD 015/012							1
33	311			Maimunah	Merak 213	BD 005/012	1						
34				Komariah	Merak 214	BD	1						1
35				Sinta Pertiwi	Merak 215	Gg Arus				1			1
36				Endang Hartuti Ningsih	Merak 216	Gg Arus				1			1
37				Ria Mulia Agustien	Merak 217	BD	1						1
38	267			Rasimun	Merak 218	BD 013/012	1						
39	309	440	Rina	Rina	Merak 219	BD 009/012							1
40				Puri Septiani	Merak 220	BD	1						1
41				GKI	Merak 301	GKI				1			1
42	277	374	Dedeh Soidah	Agus Halim	Merak 302	BD 005/012				1			
43				Muhasyim	Merak 303	BD	1						1
44				Sari	Merak 304	Gg Arus				1			1
45	249	381	Aryani/Lukman	-	Merak 305	BD 005/012					1		
46	296	280	Kimah/Badi	Jefri	Merak 306	BD 010/012				1			
47	332	254	Hasnah	Hasnah	Merak 307	BD 009/009							1
48	256			ABD. Rahman Bin Syukur	Merak 308	BD 014/012	1						
49	242	378	Jarudin	Ahmad Najarudin	Merak 309	BD 005/012							1
50	333			Farah	Merak 310	BD 009/009	1						
51	329			Mohamad Gunawan	Merak 311	BD 005/012	1						
52	259	20	Purnama Petra	Purnama Petra Tambunan	Merak 312	BD 015/012							1
53	328	448	Muhamad Iqbal	Siti Waridah	Merak 313	BD 009/012				1			
54	320			Cahyana	Merak 314	BD 006/012	1						
55				Epon	Merak 315	Gg Arus				1			1
56	298	47	Hj. Dijah/Dayat	Siti Jamilah	Merak 316	BD 004/011				1			
57	247			Mulyanto	Merak 317	BD 009/012	1						
58	269	237	Siti Maryam	Nenny Ratna Sari	Merak 318	BD 008/010				1			
59	304			Darmiyati	Merak 319	BD 007/012	1						
60	292	44	Kurnain	Susiana	Merak 320	BD 003/011				1			
61				Sri Sentani Iriani	Merak 401	BD	1						1
62	253	438	Budi Asmarajaya	Hanifah	Merak 402	BD 009/012				1			
63				Atin Sutini	Merak 403	Gg Arus				1			1
64				Mukibin	Merak 404	Gg Arus				1			1
65	300			Sagita Maya	Merak 405	BD 008/010	1						
66				(-)	Merak 406	BD					1		
67				Samsuri	Merak 407	Gg Arus				1			1
68	266	34	Mukmin	Mu Min	Merak 408	BD 003/011							1
69	335	24	Teti Emawati	Agus Jauhari	Merak 409	BD 015/012				1			
70	272	434	Daryati, Wahyudi	Wahyudi	Merak 410	BD 009/012							1
71	273			Hidayat	Merak 411	BD 006/012	1						
72	289			Kusnadi	Merak 412	BD 005/012	1						
73	314	442	H. Dimiati	Vazar	Merak 413	BD 009/012				1			
74				Misbah Al R Abdullah	Merak 414	BD	1						1
75	321			Husin	Merak 415	BD 006/012	1						
76	291			A Rojak	Merak 416	BD 006/012	1						
77	338			Nuryati	Merak 417	BD 006/012	1						
78	281			Nurhayati	Merak 418	BD 005/012	1						
79				Salwati	Merak 419	BD	1						1
80	301	235	Didik	Husni	Merak 420	BD 008/010				1			

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK MERAK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN							
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERASAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD	
81	322			Cecep	Merak 501	BD 006/012	1							
82	326			Syariffudin	Merak 502	BD 005/012	1							
83	317			Irma Nur Fazriah	Merak 503	BD 003/010	1							
84	315			Eldi Maqfira	Merak 504	BD 009/009	1							
85				Sunandar	Merak 505	Gg Arus				1			1	
86	323	445	Ardiansyah	Dadang	Merak 506	BD 009/012			1					
87	303			Kamilah	Merak 507	BD 006/012	1							
88				Syafruddin	Merak 508	Gg Arus				1			1	
89				Edi Gunawan	Merak 509	BD	1						1	
90	276	349	Narti	Ramlan	Merak 510	BD 005/012			1					
91				Lukman Nur Hakim	Merak 511	BD	1						1	
92	251	437	Hanifah	Hanifah	Merak 512	BD 009/012						1		
93	331			Linda	Merak 513	BD 006/012	1							
94				Iin Indah Rinjani	Merak 514	BD	1						1	
95				Susanah	Merak 515	BD	1						1	
96	75	185	Nurjanah	Nurjanah	Merak 516	BD 008/010						1		
97				(-)	Merak 517	BD					1			
98				(-)	Merak 518	BD					1			
99	340	327	Marnih	Mardani	Merak 519	BD 006/012			1					
100	330			Dede Sumarna	Merak 520	BD 005/012	1							
JUMLAH							46	1	18	12	4	19	28	
KETERANGAN:														
Dibandingkan dengan jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek														
Jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek-Blok Merak								100						
Yang tidak memiliki peta bidang							46		46.00	%				
1 Peta Bidang memperoleh 2 unit rusunawa							1		1.00	%				
Nama penerima rusunawa tidak sama dengan nama pemilik peta bidang							18		18.00	%				
Penghuni yang berasal dari luar Bukit Duri							12		12.00	%				
Unit yang kosong							4		4.00	%				
Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki							19		19.00	%				
Unit yang tidak termasuk dalam laporan Lurah Bukit Duri														
Dibandingkan dengan jumlah Peta Bidang														
Jumlah Peta Bidang (dikurangi korban pengrusakan pada bulan Januari 2016): 460 - 97 =									363					
Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki							19		5	%				

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK GELATIK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERSAL DARI LURAH BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
1	129			Jali	Gelatik 101	BD 010/012	1						
2	202	422	Husnah	Usnah B. Yunus	Gelatik 102	BD 005/012							1
3	203	369	Maryati Ramin	Maryati	Gelatik 103	BD 005/012							1
4	121	196	Endang	Endang Bin Andi	Gelatik 104	BD 006/010							1
5	89	194	Rohatun, Sumarno, Hidayat	Sumarno	Gelatik 105	BD 006/010							1
6	4			M. Salim	Gelatik 106	BD 010/012	1						
7	116			Achyani	Gelatik 107	BD 010/012	1						
8	99			Mukayah	Gelatik 108	BD 005/012	1						
9	119	304	Kocen	Murdjiyo	Gelatik 109	BD 010/012			1				
10	101	13	Andang	Andang	Gelatik 110	BD 015/012							1
11	120			Suhartati	Gelatik 111	BD 010/012	1						
12	90	152	Darmi	Hj. Sudarmi	Gelatik 112	BD 009/010							1
13	88	202	Faher	SA. Fakhbar Shorty	Gelatik 113	BD 003/010			1				
14	98	269	Cecep Samsudin	Cecep Samsudin	Gelatik 114	BD 010/012							1
15	84	173	Djumiat	Djumiat	Gelatik 115	BD 008/010							1
16	87	219	Ella	R. Jamilah	Gelatik 116	BD 002/010			1				
17	302	432	Wismar	Fatimah	Gelatik 117	BD 007/012			1				
18	104	419	Rachmat	Rachmat	Gelatik 118	BD 005/012							1
19	102	10	Sumitra	Sumirta	Gelatik 119	BD 015/012							1
20	105			Zaenal Abidin	Gelatik 120	BD 010/012	1						
21	167	265	Abd. Hamid	ABD. Hamid	Gelatik 201	BD 010/012							1
22	106			Dina Maryani	Gelatik 202	BD 010/012	1						
23	154	189	Marjuki	Reza Aditia	Gelatik 203	BD 006/010			1				
24	113			Suparman	Gelatik 204	BD 010/012	1						
25	172	211	Muslim	Muslim	Gelatik 205	BD 003/010							1
26	130	206	Ida Dianingsih	Dody Sukmana	Gelatik 206	BD 003/010			1				
27	156	436	Nurmali	Nurmali	Gelatik 207	BD 009/012							1
28	159	433	H.Hidayat, Heni Siti R/Nurharyanto/Yuni Arsanti/Siti Muslikah, Lingga Tanudjadja	Marliana Suhandi	Gelatik 208	BD 009/012			1				
29	170	212	Muslim	Ibnu Syaiful Huda	Gelatik 209	BD 003/010			1				
30	144	17	Darlis	Darlis	Gelatik 210	BD 015/012							1
31	8	404	Sumini/Dadang	Sumini	Gelatik 211	BD 005/ 012							1
32	118			Suja	Gelatik 212	BD 010/012	1						
33	176			RH. Khomaini	Gelatik 213	BD 015/012	1						
34	180	399	Jalyar	Zaiyar	Gelatik 214	BD 005/012							1
35	160	415	Alex	Irwan	Gelatik 215	BD 005/012			1				
36	145	187	Deden	Lina Rosalina	Gelatik 216	BD 008/010			1				
37	114	147	Rojali	Agus Supriyanto	Gelatik 217	BD 009/010			1				
38	157	435	Rustadi	Purnawati	Gelatik 218	BD 009/012			1				
39	165			Munarta	Gelatik 219	BD 010/012	1						
40	122			Tara	Gelatik 220	BD 010/012	1						
41	141			Abdul Rohim	Gelatik 301	BD 010/012	1						
42	148	302	Slamet Sutejo	Arpe	Gelatik 302	BD 010/012			1				
43	187	393	Inem	Inem	Gelatik 303	BD 005/012							1
44	134			Dedi Mulyadi	Gelatik 304	BD 010/012			1				
45	135	12	Sujak	Akhwan Rifqi	Gelatik 305	BD 010/012			1				
46	158	434	Daryati, Wahyudi	Daryati	Gelatik 306	BD 009/012			1				
47	152	300	Amril	Amril	Gelatik 307	BD 010/012							1
48	110	174	Tatang	Suyatno	Gelatik 308	BD 008/010			1				
49	155	412	Manto	Irma Suyanto	Gelatik 309	BD 005/012			1				
50	153	292	Sugiarti	Sugiarti	Gelatik 310	BD 010/012							1
51	74	186	Mugeni	A. Mugeni	Gelatik 311	BD 008/010							1
52	140	301	Arpin	Aripin	Gelatik 312	BD 010/012							1
53	174	403	Marsono	Marsono	Gelatik 313	BD 005/012							1
54	142	288	Arsat	Komarudin	Gelatik 314	BD 010/012			1				
55	223			Agus Rizal	Gelatik 315	BD 008/010	1						
56	124			Salam	Gelatik 316	BD 010/012	1						
57	139	264	Nurhalim	Nurlaela Bin Misbah	Gelatik 317	BD 010/012			1				
58	166	318	Kurdi Kurniawan	Achmad Saripudin	Gelatik 318	BD 006/012			1				
59	164	401	Wono	Tarwono	Gelatik 319	BD 005/012							1
60	150			Wulandari	Gelatik 320	BD 003/010	1						
61	245	213	Samsinar	Syafril	Gelatik 401	BD 003/010			1				
62	112	160	Mulyani	Agus Sudarwanto	Gelatik 402	BD 009/010			1				
63	319	195	Subur	Sri Lestari	Gelatik 403	BD 006/010			1				
64	108			Tedi Gunawan	Gelatik 404	BD 010/012	1						
65	295	251	Abdul Rasyid	Abdul Rasyid	Gelatik 405	BD 009/009							1
66	305	242	Esah/Lena	Rudi Firmansyah	Gelatik 406	BD 008/010			1				
67	280			Sabar	Gelatik 407	BD 005/012	1						
68	177	262	Asmuni	Bambang	Gelatik 408	BD 010/012			1				
69				Nawiyah	Gelatik 409	BD	1						1
70	336	320	Hanapi bin Ambit	Sudrajat	Gelatik 410	BD 006/012			1				
71	173	213	Samsinar	Hamzah	Gelatik 411	BD 003/010			1				
72	284			Andi Yos Sudarso	Gelatik 412	BD 005/012	1						
73	131			Ade Suhaya	Gelatik 413	BD 010/012	1						
74	107	167	Sandio	Widi Tri Purnomo	Gelatik 414	BD 008/010			1				
75	257			Muhamad Napis	Gelatik 415	BD 014/012	1						
76	117	305	Rozikin	Rozikin	Gelatik 416	BD 010/012							1
77	137	296	Sofyan Hadi	Sopyan Hadi	Gelatik 417	BD 010/012							1
78				Nilam Anggraini	Gelatik 418	BD	1						1
79	285			Suci Wulandari	Gelatik 419	BD 004/012	1						
80				Antonius Grahono Suryo	Gelatik 420	Gg Arus				1			1

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK GELATIK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERASAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
81	342	33	Rajwat	Warno	Gelatik 501	BD 003/011			1				
82	138			Achmad Taufik	Gelatik 502	BD 010/012	1						
83	168	433	H.Hidayat, Heni Siti R/Nurharyanto/Yuni Arsanti/Siti Muslikah, Lingga Tanudjadja	Lingga Tanudjaja	Gelatik 503	BD 009/012		1					
84				Ade Supriatna	Gelatik 504	Gg Arus				1			1
85				Mariam	Gelatik 505	Gg Arus				1			1
86	109	163	Kusnen H.	Khabib	Gelatik 506	BD 008/010			1				
87				Eni Sri Wandari	Gelatik 507	Gg Arus				1			1
88	192	373	Oman	Mela Adelia	Gelatik 508	BD 005/012			1				
89				Syufi Irwani	Gelatik 509	BD	1						1
90				Saidah	Gelatik 510	BD	1						1
91	115	270	Slamet	Irawan HR.	Gelatik 511	BD 010/012			1				
92				Acep	Gelatik 512	BD	1						1
93	275	411	Prayitno	Ridwan	Gelatik 513	BD 005/012			1				
94	286			Madinah	Gelatik 514	BD 004/012	1						
95				Fauzen	Gelatik 515	Gg Arus				1			1
96	111			Nuryani	Gelatik 516	BD 010/012	1						
97				Noormandana	Gelatik 517	BD	1						1
98				Iskandar	Gelatik 518	BD	1						1
99				Thomas Bartimo Gunadi	Gelatik 519	BD	1						1
100	270	240	Lispipih	Achmad Fauzi	Gelatik 520	BD 008/010			1				
J U M L A H							34	3	32	5	0	26	13

KETERANGAN:

Dibandingkan dengan jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek

Jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek-Blok Gelatik		100				
Yang tidak memiliki peta bidang	34		34.00	%		
1 Peta Bidang memperoleh 2 unit rusunawa	3		3.00	%		
Nama penerima rusunawa tidak sama dengan nama pemilik peta bidang	32		32.00	%		
Penghuni yang berasal dari luar Bukit Duri	5		5.00	%		
Unit yang kosong	0		-	%		
Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki	26		26.00	%		
Unit yang tidak termasuk dalam laporan Lurah Bukit Duri	13					

Dibandingkan dengan jumlah Peta Bidang

Jumlah Peta Bidang (dikurangi korban penggusuran pada bulan Januari 2016): 460 - 97 =

Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki

	363	
26	7	%

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK CENDRAWASIH
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
1	125	219	Ella	Rini Anggraini	Cendrawasih 101	BD 002/010			1				
2	133	325	Adjie Zubaer	Adjie Zubaer	Cendrawasih 102	BD 006/012						1	
3	136			Johan	Cendrawasih 103	BD 010/012	1						
4	123	208	Mudehir cs	Mudehir	Cendrawasih 104	BD 003/010						1	
5	126	215	Saripudin	Irin Yanhar S. Sos	Cendrawasih 105	BD 003/010			1				
6	128	216	Rosnah	Erwin P. Hutagalung	Cendrawasih 106	BD 003/010			1				
7	127			H. Syafrudin Wahab	Cendrawasih 107	BD 003/010	1						
8	151	1	Makah/Sulaiman	Usnawati	Cendrawasih 108	BD 010/012			1				
9	147	149	Muhani	Siti Hadjah	Cendrawasih 109	BD 009/010			1				
10	171	50	Ida Mufida	Ida Hafidah	Cendrawasih 110	BD 004/011			1				
11	188	365	Maimun	Makmun	Cendrawasih 111	BD 005/012						1	
12	183	407	Zaenah	Zaenah	Cendrawasih 112	BD 005/012						1	
13	181	385	Effendi	Effendi	Cendrawasih 113	BD 005/012						1	
14	169	439	Susmiari	Dadat Hendarin	Cendrawasih 114	BD 009/012			1				
15	175	18	Abdullah	Samsia/ Khuriah	Cendrawasih 115	BD 015/012			1				
16	163	158	MCK/Mulyani	Eko Mardiyanto	Cendrawasih 116	BD 009/012			1				
17	178	324	Saodah	Yuli Yanti	Cendrawasih 117	BD 006/012			1				
18	184	384	Ishak	Ishak	Cendrawasih 118	BD 005/012						1	
19	149	217	Ibnu Sina/Kh. Nanang Kurnia Wahab	KH. Nanang Kurnia Wahab	Cendrawasih 119	BD 003/010						1	
20	162	201	Husen	Tri Buana Tungga Dewi	Cendrawasih 120	BD 003/010			1				
21	196	367	Musiyem/Sahroni	Mujiyem/ Mujiem	Cendrawasih 201	BD 005/012						1	
22	190	376	Nur Salam	Nur salam	Cendrawasih 202	BD 005/012						1	
23	186	396	Ngatjem	Ngatjem	Cendrawasih 203	BD 005/012						1	
24	201	356	Mail	Ismail	Cendrawasih 204	BD 005/012						1	
25	204	370	Yati S.	Yati Sutaryah	Cendrawasih 205	BD 005/012						1	
26	208	359	Munir	Munir	Cendrawasih 206	BD 005/012						1	
27	230	368	Jasandi	Rosyati	Cendrawasih 207	BD 005/012			1				
28	195	32	H. Munir	Siti Zubaedah	Cendrawasih 208	BD 003/011			1				
29	205	397	Yanti	Sri Suyanti	Cendrawasih 209	BD 005/012						1	
30				Yusniarti	Cendrawasih 210	BD	1						1
31	93	283	Maryati, Anis	Maryati	Cendrawasih 211	BD 010/012						1	
32	217	358	Edi K.	Edy Kurniawan	Cendrawasih 212	BD 005/012						1	
33	189	355	Sukoto	Sukoyo	Cendrawasih 213	BD 005/012						1	
34	182	379	Nari	Nari	Cendrawasih 214	BD 005/012						1	
35	198	398	Asep Supriyana	Asep Supriyatna	Cendrawasih 215	BD 005/012						1	
36	197	395	Achmad Demiyati	Achmad Demiyati	Cendrawasih 216	BD 005/012						1	
37	185	366	Ngatjem	Abu bakar	Cendrawasih 217	BD 005/012			1				
38	194	389	Farman	suparman	Cendrawasih 218	BD 005/012			1				
39	226			Mardjuki	Cendrawasih 219	BD 013/012	1						
40	207	421	Hasanah	Hasanah	Cendrawasih 220	BD 005/012						1	
41	212	360	Yohan	Yohan Arifyansyah	Cendrawasih 301	BD 005/012						1	
42	191	382	Asubana/Firdaus R	Ajeng Purnamasari	Cendrawasih 302	BD 005/012			1				
43	228	361	Ratib	Mulyono	Cendrawasih 303	BD 005/012			1				
44	220			Abdul Mutholib	Cendrawasih 304	BD 014/012	1						
45	216	402	Rahman Hakim	Sudrajat	Cendrawasih 305	BD 005/012			1				
46	193	391	Ismat Ican	Ismat Ican	Cendrawasih 306	BD 005/012						1	
47	214	392	Emi S.	Surya Shandy	Cendrawasih 307	BD 005/012			1				
48	231	420	Azisman	Rumiyati	Cendrawasih 308	BD 005/012			1				
49				Roihman	Cendrawasih 309	BD	1						1
50	161	191	Nurhayati	Nurhayati	Cendrawasih 310	BD 006/012						1	
51	225	458	Jemmy	Melly Kusmaini	Cendrawasih 311	BD 013/012			1				
52	324	49	Encang S	Tirta Jaya Anggara	Cendrawasih 312	BD 004/011			1				
53	218	364	Wardi	Anih	Cendrawasih 313	BD 005/012			1				
54	206	390	Marlis Yanuar	Marlia Yanuar	Cendrawasih 314	BD 005/012						1	
55	227	456	M. Yustadi	M. Yustadi	Cendrawasih 315	BD 013/012			1				
56	219	457	Abd. Hakim	Moh. Sidik Bin Syukur	Cendrawasih 316	BD 013/012			1				
57	215	375	Andri Kurniawan	Hakim Paton	Cendrawasih 317	BD 005/012			1				
58	229	354	Sumarsih	Asmani	Cendrawasih 318	BD 005/012			1				
59	238	388	Hasan Basri	Wahyuni	Cendrawasih 319	BD 005/012			1				
60	200	377	Yati Cutaryati	Hadijah	Cendrawasih 320	BD 005/012			1				
61	250	346	Drs. Kadira	-	Cendrawasih 401	BD 006/012						1	
62	210	363	Sobari	Sobari	Cendrawasih 402	BD 005/012						1	
63	235			HJ. Euis Komaningsih	Cendrawasih 403	BD 006/012	1						
64	222	275	H. Ramdani, Mulki	Iwan Dermawan	Cendrawasih 404	BD 010/012			1				
65				Apit Maulana	Cendrawasih 405	BD	1						1
66	236	313	Asep Rahmat	Sarman	Cendrawasih 406	BD 006/012			1				
67	221	150	Asnah	Daemy Tanjung	Cendrawasih 407	BD 009/010			1				
68	213	371	Iwan	Erlan Setiawan	Cendrawasih 408	BD 005/012			1				
69	261			Ade Firdaus Hasan	Cendrawasih 409	BD 006/012	1						
70	239			Muhammad Ridzal SH.	Cendrawasih 410	BD 006/012	1						
71	307			Ridwan Arifin	Cendrawasih 411	BD 005/012	1						
72				Rosita	Cendrawasih 412	BD	1						1
73	345			Henny Siti Rochaeni	Cendrawasih 413	BD 009/012	1						
74				Taty Haryati	Cendrawasih 414	BD	1						1
75				Rina Sirega	Cendrawasih 415	BD	1						1
76	132	357	Zaenal Abidin	Zaenal Abidin	Cendrawasih 416	BD 005/012						1	
77	344	332	Koko	Irlani	Cendrawasih 417	BD 006/012			1				
78				Maliki	Cendrawasih 418	BD	1						1
79	179	352	Jefri Widodo	Jefri Widodo	Cendrawasih 419	BD 005/012						1	
80	209	413	Edy Sulistiyono	Edy Sulistiono	Cendrawasih 420	BD 005/012						1	
81				Lipenter Sinaga	Cendrawasih 501	Gg Arus				1			1

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK DI BLOK CENDRAWASIH
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN							
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERASAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KOSONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD	
82				Sanitah Binti Wasid	Cendrawasih 502	BD	1						1	
83				-	Cendrawasih 503	BD					1			
84	325	343	Sumitro	Suripto	Cendrawasih 504	BD 006/012			1					
85	282			Danu	Cendrawasih 505	BD 004/012	1							
86				-	Cendrawasih 506	BD					1			
87				-	Cendrawasih 507	BD					1			
88				-	Cendrawasih 508	BD					1			
89				-	Cendrawasih 509	BD					1			
90	334			Siti Yusliah	Cendrawasih 510	BD 013/012	1							
91	268	19	Djumeli	Andri Kurniawan	Cendrawasih 511	BD 015/012			1					
92	211	362	Tedi	Tedi Feriyansyah	Cendrawasih 512	BD 005/012						1		
93				-	Cendrawasih 513	BD					1			
94	339	344	Ahmad Mulyana	Achmad Mulyana	Cendrawasih 514	BD 006/012						1		
95	294	260	Suryadi	Misriyani	Cendrawasih 515	BD 010/012			1					
96				Toni Panjaitan	Cendrawasih 516	Gg Arus				1			1	
97				-	Cendrawasih 517	BD					1			
98	327			Ratnawati	Cendrawasih 518	BD 006/012	1							
99				Bandi Irawan	Cendrawasih 519	Gg Arus				1			1	
100				Samsidik	Cendrawasih 520	BD	1						1	
J U M L A H							21	1	36	3	8	31	12	
KETERANGAN:														
Dibandingkan dengan jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek														
Jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek-Blok Cendrawasih								100						
Yang tidak memiliki peta bidang							21		21.00	%				
1 Peta Bidang memperoleh 2 unit rusunawa							1		1.00	%				
Nama penerima rusunawa tidak sama dengan nama pemilik peta bidang							36		36.00	%				
Penghuni yang berasal dari luar Bukit Duri							3		3.00	%				
Unit yang kosong							8		8.00	%				
Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki							31		31.00	%				
Unit yang tidak termasuk dalam laporan Lurah Bukit Duri												12		
Dibandingkan dengan jumlah Peta Bidang														
Jumlah Peta Bidang (dikurangi korban penggusuran pada bulan Januari 2016): 460 - 97 =								363						
Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki							31	9	%					

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
1	125	219	Ella	Rini Anggraini	Cendrawasih 101	BD 002/010			1				
2	133	325	Adjie Zubaer	Adjie Zubaer	Cendrawasih 102	BD 006/012						1	
3	136			Johan	Cendrawasih 103	BD 010/012	1						
4	123	208	Mudehir cs	Mudehir	Cendrawasih 104	BD 003/010						1	
5	126	215	Saripudin	Irin Yanhar S. Sos	Cendrawasih 105	BD 003/010			1				
6	128	216	Rosnah	Erwin P. Hutagalung	Cendrawasih 106	BD 003/010			1				
7	127			H. Syafrudin Wahab	Cendrawasih 107	BD 003/010	1						
8	151	1	Makah/Sulaiman	Usnawati	Cendrawasih 108	BD 010/012			1				
9	147	149	Muhani	Siti Hadijah	Cendrawasih 109	BD 009/010			1				
10	171	50	Ida Mufida	Ida Hafidah	Cendrawasih 110	BD 004/011			1				
11	188	365	Maimun	Makmun	Cendrawasih 111	BD 005/012						1	
12	183	407	Zaenah	Zaenah	Cendrawasih 112	BD 005/012						1	
13	181	385	Efendi	Effendi	Cendrawasih 113	BD 005/012						1	
14	169	439	Susmiari	Dadat Hendarin	Cendrawasih 114	BD 009/012			1				
15	175	18	Abdullah	Samsia/ Khuriah	Cendrawasih 115	BD 015/012			1				
16	163	158	MCK/Mulyani	Eko Mardiyanto	Cendrawasih 116	BD 009/012			1				
17	178	324	Saodah	Yuli Yanti	Cendrawasih 117	BD 006/012			1				
18	184	384	Ishak	Ishak	Cendrawasih 118	BD 005/012						1	
19	149	217	Ibnu Sina/Kh. Nanang Kurnia Wahab	KH. Nanang Kurnia Wahab	Cendrawasih 119	BD 003/010						1	
20	162	201	Husen	Tri Buana Tungga Dewi	Cendrawasih 120	BD 003/010			1				
21	196	367	Musiyem/Sahroni	Mujiyem/ Mujiem	Cendrawasih 201	BD 005/012						1	
22	190	376	Nur Salam	Nur salam	Cendrawasih 202	BD 005/012						1	
23	186	396	Ngatjem	Ngatjem	Cendrawasih 203	BD 005/012						1	
24	201	356	Mail	Ismail	Cendrawasih 204	BD 005/012						1	
25	204	370	Yati S.	Yati Sutaryah	Cendrawasih 205	BD 005/012						1	
26	208	359	Munir	Munir	Cendrawasih 206	BD 005/012						1	
27	230	368	Jasandi	Rosyati	Cendrawasih 207	BD 005/012			1				
28	195	32	H. Munir	Siti Zubaedah	Cendrawasih 208	BD 003/011			1				
29	205	397	Yanti	Sri Suyanti	Cendrawasih 209	BD 005/012						1	
30				Yusniarti	Cendrawasih 210	BD	1						1
31	93	283	Maryati, Anis	Maryati	Cendrawasih 211	BD 010/012						1	
32	217	358	Edi K.	Edy Kurniawan	Cendrawasih 212	BD 005/012						1	
33	189	355	Sukoto	Sukoyo	Cendrawasih 213	BD 005/012						1	
34	182	379	Nari	Nari	Cendrawasih 214	BD 005/012						1	
35	198	398	Asep Supriyana	Asep Supriyatna	Cendrawasih 215	BD 005/012						1	
36	197	395	Achmad Demiyati	Achmad Demiyati	Cendrawasih 216	BD 005/012						1	
37	185	366	Ngatjem	Abu bakar	Cendrawasih 217	BD 005/012			1				
38	194	389	Farman	suparman	Cendrawasih 218	BD 005/012			1				
39	226			Mardjuki	Cendrawasih 219	BD 013/012	1						
40	207	421	Hasanah	Hasanah	Cendrawasih 220	BD 005/012						1	
41	212	360	Yohan	Yohan Arifyansyah	Cendrawasih 301	BD 005/012						1	
42	191	382	Asubana/Firdaus R	Ajeng Purnamasari	Cendrawasih 302	BD 005/012			1				
43	228	361	Ratib	Mulyono	Cendrawasih 303	BD 005/012			1				
44	220			Abdul Mutholib	Cendrawasih 304	BD 014/012	1						
45	216	402	Rahman Hakim	Sudrajat	Cendrawasih 305	BD 005/012			1				
46	193	391	Ismat Ican	Ismat Ican	Cendrawasih 306	BD 005/012						1	
47	214	392	Emi S.	Surya Shandy	Cendrawasih 307	BD 005/012			1				
48	231	420	Azisman	Rumiyati	Cendrawasih 308	BD 005/012			1				
49				Roihman	Cendrawasih 309	BD	1						1
50	161	191	Nurhayati	Nurhayati	Cendrawasih 310	BD 006/012						1	
51	225	458	Jemmy	Melly Kusmaini	Cendrawasih 311	BD 013/012			1				
52	324	49	Encang S	Tirta Jaya Anggara	Cendrawasih 312	BD 004/011			1				
53	218	364	Wardi	Anih	Cendrawasih 313	BD 005/012			1				
54	206	390	Marlia Yanuar	Marlia Yanuar	Cendrawasih 314	BD 005/012						1	
55	227	456	M. Yustadi	M. Yustadi	Cendrawasih 315	BD 013/012			1				
56	219	457	Abd. Hakim	Moh. Sidik Bin Syukur	Cendrawasih 316	BD 013/012			1				
57	215	375	Andri Kurniawan	Hakim Paton	Cendrawasih 317	BD 005/012			1				
58	229	354	Sumarsih	Asmani	Cendrawasih 318	BD 005/012			1				
59	238	388	Hasan Basri	Wahyuni	Cendrawasih 319	BD 005/012			1				
60	200	377	Yati Cutaryati	Hadijah	Cendrawasih 320	BD 005/012			1				
61	250	346	Drs. Kadira	-	Cendrawasih 401	BD 006/012						1	
62	210	363	Sobari	Sobari	Cendrawasih 402	BD 005/012						1	
63	235			HJ. Euis Komaningsih	Cendrawasih 403	BD 006/012	1						
64	222	275	H. Ramdani, Mulki	Iwan Dermawan	Cendrawasih 404	BD 010/012			1				
65				Apit Maulana	Cendrawasih 405	BD	1						1
66	236	313	Asep Rahmat	Sarman	Cendrawasih 406	BD 006/012			1				
67	221	150	Asnah	Daemy Tanjung	Cendrawasih 407	BD 009/010			1				
68	213	371	Iwan	Erlan Setiawan	Cendrawasih 408	BD 005/012			1				
69	261			Ade Firdaus Hasan	Cendrawasih 409	BD 006/012	1						
70	239			Muhammad Ridzal SH.	Cendrawasih 410	BD 006/012	1						
71	307			Ridwan Arifin	Cendrawasih 411	BD 005/012	1						
72				Rosita	Cendrawasih 412	BD	1						1
73	345			Henny Siti Rochaeni	Cendrawasih 413	BD 009/012	1						
74				Taty Haryati	Cendrawasih 414	BD	1						1
75				Rina Sirega	Cendrawasih 415	BD	1						1
76	132	357	Zaenal Abidin	Zaenal Abidin	Cendrawasih 416	BD 005/012						1	
77	344	332	Koko	Irlani	Cendrawasih 417	BD 006/012			1				
78				Maliki	Cendrawasih 418	BD	1						1
79	179	352	Jefri Widodo	Jefri Widodo	Cendrawasih 419	BD 005/012						1	
80	209	413	Edy Sulistiyono	Edy Sulistiono	Cendrawasih 420	BD 005/012						1	
81				Lipenter Sinaga	Cendrawasih 501	Gg Arus				1			1

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
82				Sanitah Binti Wasid	Cendrawasih 502	BD	1						1
83				-	Cendrawasih 503	BD					1		
84	325	343	Sumitro	Suripto	Cendrawasih 504	BD 006/012			1				
85	282			Danu	Cendrawasih 505	BD 004/012	1						
86				-	Cendrawasih 506	BD					1		
87				-	Cendrawasih 507	BD					1		
88				-	Cendrawasih 508	BD					1		
89				-	Cendrawasih 509	BD					1		
90	334			Siti Yusliah	Cendrawasih 510	BD 013/012	1						
91	268	19	Djasmeli	Andri Kurniawan	Cendrawasih 511	BD 015/012			1				
92	211	362	Tedi	Tedi Feriyansyah	Cendrawasih 512	BD 005/012						1	
93				-	Cendrawasih 513	BD					1		
94	339	344	Ahmad Mulyana	Achmad Mulyana	Cendrawasih 514	BD 006/012							1
95	294	260	Suryadi	Misriyani	Cendrawasih 515	BD 010/012			1				
96				Toni Panjaitan	Cendrawasih 516	Gg Arus				1			1
97				-	Cendrawasih 517	BD					1		
98	327			Ratnawati	Cendrawasih 518	BD 006/012	1						
99				Bandi Irawan	Cendrawasih 519	Gg Arus				1			1
100				Samsidik	Cendrawasih 520	BD	1						1
101	129			Jali	Gelatik 101	BD 010/012	1						
102	202	422	Husnah	Usnah B. Yunus	Gelatik 102	BD 005/012							1
103	203	369	Maryati Ramin	Maryati	Gelatik 103	BD 005/012							1
104	121	196	Endang	Endang Bin Andi	Gelatik 104	BD 006/010							1
105	89	194	Rohatun, Sumarno, Hidayat	Sumarno	Gelatik 105	BD 006/010							1
106	4			M. Salim	Gelatik 106	BD 010/012	1						
107	116			Achyani	Gelatik 107	BD 010/012	1						
108	99			Mukayah	Gelatik 108	BD 005/012	1						
109	119	304	Kocen	Murdjiyo	Gelatik 109	BD 010/012				1			
110	101	13	Andang	Andang	Gelatik 110	BD 015/012							1
111	120			Suharrtati	Gelatik 111	BD 010/012	1						
112	90	152	Darmi	Hj. Sudarmi	Gelatik 112	BD 009/010							1
113	88	202	Faher	SA. Fakhbar Shorty	Gelatik 113	BD 003/010				1			
114	98	269	Cecep Samsudin	Cecep Samsudin	Gelatik 114	BD 010/012							1
115	84	173	Djumiaty	Djumiaty	Gelatik 115	BD 008/010							1
116	87	219	Ella	R. Jamilah	Gelatik 116	BD 002/010				1			
117	302	432	Wismar	Fatimah	Gelatik 117	BD 007/012				1			
118	104	419	Rachmat	Rachmat	Gelatik 118	BD 005/012							1
119	102	10	Sumitra	Sumirta	Gelatik 119	BD 015/012							1
120	105			Zaenal Abidin	Gelatik 120	BD 010/012	1						
121	167	265	Abd. Hamid	ABD. Hamid	Gelatik 201	BD 010/012							1
122	106			Dina Maryani	Gelatik 202	BD 010/012	1						
123	154	189	Marjuki	Reza Aditia	Gelatik 203	BD 006/010				1			
124	113			Suparman	Gelatik 204	BD 010/012	1						
125	172	211	Muslim	Muslim	Gelatik 205	BD 003/010							1
126	130	206	Ida Dianingsih	Dody Sukmana	Gelatik 206	BD 003/010				1			
127	156	436	Nurmal	Nurmal	Gelatik 207	BD 009/012							1
128	159	433	H.Hidayat, Heni Siti R/Nurharyanto/Yuni Arsanti/Siti Muslikah, Lingga Tanudjadja	Marliana Suhandi	Gelatik 208	BD 009/012				1			
129	170	212	Muslim	Ibnu Syaiful Huda	Gelatik 209	BD 003/010				1			
130	144	17	Darlis	Darlis	Gelatik 210	BD 015/012							1
131	8	404	Sumini/Dadang	Sumini	Gelatik 211	BD 005/ 012							1
132	118			Suja	Gelatik 212	BD 010/012	1						
133	176			RH. Khomaini	Gelatik 213	BD 015/012	1						
134	180	399	Jalyar	Zaiyar	Gelatik 214	BD 005/012							1
135	160	415	Alex	Irwan	Gelatik 215	BD 005/012				1			
136	145	187	Deden	Lina Rosalina	Gelatik 216	BD 008/010				1			
137	114	147	Rojali	Agus Supriyanto	Gelatik 217	BD 009/010				1			
138	157	435	Rustadi	Purnawati	Gelatik 218	BD 009/012				1			
139	165			Munarta	Gelatik 219	BD 010/012	1						
140	122			Tara	Gelatik 220	BD 010/012	1						
141	141			Abdul Rohim	Gelatik 301	BD 010/012	1						
142	148	302	Slamet Sutejo	Arpe	Gelatik 302	BD 010/012				1			
143	187	393	Inem	Inem	Gelatik 303	BD 005/012							1
144	134			Dedi Mulyadi	Gelatik 304	BD 010/012	1						
145	135	12	Sujak	Akhwan Rifqi	Gelatik 305	BD 010/012							
146	158	434	Daryati, Wahyudi	Daryati	Gelatik 306	BD 009/012				1			
147	152	300	Amril	Amril	Gelatik 307	BD 010/012							1
148	110	174	Tatang	Suyatno	Gelatik 308	BD 008/010				1			
149	155	412	Manto	Irma Suyanto	Gelatik 309	BD 005/012				1			
150	153	292	Sugiarti	Sugiarti	Gelatik 310	BD 010/012							1
151	74	186	Mugeni	A. Mugeni	Gelatik 311	BD 008/010							1
152	140	301	Arpin	Aripin	Gelatik 312	BD 010/012							1
153	174	403	Marsono	Marsono	Gelatik 313	BD 005/012							1
154	142	288	Arsat	Komarudin	Gelatik 314	BD 010/012				1			
155	223			Agus Rizal	Gelatik 315	BD 008/010	1						
156	124			Salam	Gelatik 316	BD 010/012	1						
157	139	264	Nurhalim	Nurlaela Bin Misbah	Gelatik 317	BD 010/012				1			
158	166	318	Kurdi Kurniawan	Achmad Saripudin	Gelatik 318	BD 006/012				1			
159	164	401	Wono	Tarwono	Gelatik 319	BD 005/012							1
160	150			Wulandari	Gelatik 320	BD 003/10	1						
161	245	213	Samsinar	Syafri	Gelatik 401	BD 003/010				1			
162	112	160	Mulyani	Agus Sudarwanto	Gelatik 402	BD 009/010				1			

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
163	319	195	Subur	Sri Lestari	Gelatik 403	BD 006/010			1				
164	108			Tedi Gunawan	Gelatik 404	BD 010/012	1						
165	295	251	Abdul Rasyid	Abdul Rasyid	Gelatik 405	BD 009/009						1	
166	305	242	Esah/Lena	Rudi Firmansyah	Gelatik 406	BD 008/010			1				
167	280			Sabar	Gelatik 407	BD 005/012	1						
168	177	262	Asmuni	Bambang	Gelatik 408	BD 010/012			1				
169				Nawiyah	Gelatik 409	BD	1						1
170	336	320	Hanapi bin Ambit	Sudrajat	Gelatik 410	BD 006/012			1				
171	173	213	Samsinar	Hamzah	Gelatik 411	BD 003/010		1					
172	284			Andi Yos Sudarso	Gelatik 412	BD 005/012	1						
173	131			Ade Suhaya	Gelatik 413	BD 010/012	1						
174	107	167	Sandio	Widi Tri Purnomo	Gelatik 414	BD 008/010			1				
175	257			Muhamad Napis	Gelatik 415	BD 014/012	1						
176	117	305	Rozikin	Rozikin	Gelatik 416	BD 010/012						1	
177	137	296	Sofyan Hadi	Sopyan Hadi	Gelatik 417	BD 010/012						1	
178				Nilam Anggraini	Gelatik 418	BD	1						1
179	285			Suci Wulandari	Gelatik 419	BD 004/012	1						
180				Antonius Grahono Suryo	Gelatik 420	Gg Arus				1			1
181	342	33	Rajwat	Warno	Gelatik 501	BD 003/011			1				
182	138			Achmad Taufik	Gelatik 502	BD 010/012	1						
183	168	433	H.Hidayat, Heni Siti R/Nurharyanto/Yuni Arsanti/Siti Muslikah, Lingga Tanudjadja	Lingga Tanudjaja	Gelatik 503	BD 009/012		1					
184				Ade Supriatna	Gelatik 504	Gg Arus				1			1
185				Mariam	Gelatik 505	Gg Arus				1			1
186	109	163	Kusnen H.	Khبيب	Gelatik 506	BD 008/010			1				
187				Eni Sri Wandari	Gelatik 507	Gg Arus				1			1
188	192	373	Oman	Mela Adelia	Gelatik 508	BD 005/012			1				
189				Syufi Irwani	Gelatik 509	BD	1						1
190				Saidah	Gelatik 510	BD	1						1
191	115	270	Slamet	Irawan HR.	Gelatik 511	BD 010/012			1				
192				Acep	Gelatik 512	BD	1						1
193	275	411	Prayitno	Ridwan	Gelatik 513	BD 005/012			1				
194	286			Madinah	Gelatik 514	BD 004/012	1						
195				Fauzen	Gelatik 515	Gg Arus				1			1
196	111			Nuryani	Gelatik 516	BD 010/012	1						
197				Noormandana	Gelatik 517	BD	1						1
198				Iskandar	Gelatik 518	BD	1						1
199				Thomas Bartimo Gunadi	Gelatik 519	BD	1						1
200	270	240	Lispipih	Achmad Fauzi	Gelatik 520	BD 008/010			1				
201	287			Ida Wati	Merak 101	BD 005/012	1						
202	264	333	Rusmawati	Rusmawati S.	Merak 102	BD 006/012						1	
203	260	342	Ismail Hasan	Ismail Hasan	Merak 103	BD 006/012						1	
204	252	443	Mamat, Agus Arisman	Mamat	Merak 104	BD 009/012						1	
205	288			Marhaya	Merak 105	BD 005/012	1						
206	271	441	Hj. Komariah	Hj. Komariah	Merak 106	BD 009/012						1	
207	255			Suhailah	Merak 107	BD 014/012	1						
208	279			Amin	Merak 108	BD 005/012	1						
209	274			Liu Kim Khiun	Merak 109	BD 013/012	1						
210				Solha Sri Wirtati	Merak 110	Gg Arus				1			1
211	265	451	Makenun	Achmad Fadilah	Merak 111	BD 012/012			1				
212	244	190	Mulyadi	Mulyadi	Merak 112	BD 006/010						1	
213	241	350	Sarju	Sarju	Merak 113	BD 005/012						1	
214	262	324	Saodah	Saodah Bt. Saadih	Merak 114	BD 006/012		1					
215	233			Hj. Tuti Turyati	Merak 115	BD 005/012	1						
216	313	209	Sulis Dyah	Tatok Wahyuono Adhy	Merak 116	BD 003/010			1				
217				Ramlah	Merak 117	BD	1						1
218				Intan Hanggar Kusuma	Merak 118	Gg Arus				1			1
219	224	238	Oly Muliya	Sri Hartanti	Merak 119	BD 008/010			1				
220				Salmah	Merak 120	BD	1						1
221	293	234	Joko	Djoko Sulisty Putro	Merak 201	BD 006/010						1	
222	243	414	Syarifudin	Armelia Rosdiana	Merak 202	BD 005/012			1				
223				Ratnawati	Merak 203	BD	1						1
224				HJ. Tuti Turyati	Merak 204	BD	1						1
225	232	347	Hj. Tuti, Hj Euis, Rizal, Ilansyah	Muhammad Rizaliansyah	Merak 205	BD 005/012						1	
226	248	353	Mursinah	Madi	Merak 206	BD 005/012			1				
227	254	444	Maryanih	Maryani	Merak 207	BD 009/012						1	
228	290			Yetnatety	Merak 208	BD 005/012	1						
229	299			Pandu Pribadi	Merak 209	BD 008/010	1						
230	143	40	Patimah	Fatimah	Merak 210	BD 003/011						1	
231				Kharudin Misbah	Merak 211	BD	1						1
232	258	22	Thamrin	M. Thamrin	Merak 212	BD 015/012						1	
233	311			Maimunah	Merak 213	BD 005/012	1						
234				Komariah	Merak 214	BD	1						1
235				Sinta Pertiwi	Merak 215	Gg Arus				1			1
236				Endang Hartuti Ningsih	Merak 216	Gg Arus				1			1
237				Ria Mulia Agustien	Merak 217	BD	1						1
238	267			Rasimun	Merak 218	BD 013/012	1						
239	309	440	Rina	Rina	Merak 219	BD 009/012						1	

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
240				Puri Septiani	Merak 220	BD	1						1
241				GKI	Merak 301	GKI				1			1
242	277	374	Dedeh Soidah	Agus Halim	Merak 302	BD 005/012			1				
243				Muhasyim	Merak 303	BD	1						1
244				Sari	Merak 304	Gg Arus			1				1
245	249	381	Aryani/Lukman	-	Merak 305	BD 005/012					1		
246	296	280	Kimah/Badi	Jefri	Merak 306	BD 010/012			1				
247	332	254	Hasnah	Hasnah	Merak 307	BD 009/009						1	
248	256			ABD. Rahman Bin Syukur	Merak 308	BD 014/012	1						
249	242	378	Jarudin	Ahmad Najarudin	Merak 309	BD 005/012						1	
250	333			Farah	Merak 310	BD 009/009	1						
251	329			Mohamad Gunawan	Merak 311	BD 005/012	1						
252	259	20	Purnama Petra	Purnama Petra Tambunan	Merak 312	BD 015/012						1	
253	328	448	Muhamad Iqbal	Siti Waridah	Merak 313	BD 009/012			1				
254	320			Cahyana	Merak 314	BD 006/012	1						
255				Epon	Merak 315	Gg Arus				1			1
256	298	47	Hj. Dijah/Dayat	Siti Jamilah	Merak 316	BD 004/011			1				
257	247			Mulyanto	Merak 317	BD 009/012	1						
258	269	237	Siti Maryam	Nenny Ratna Sari	Merak 318	BD 008/010			1				
259	304			Darmiyati	Merak 319	BD 007/012	1						
260	292	44	Kumain	Susiana	Merak 320	BD 003/011			1				
261				Sri Sentani Iriani	Merak 401	BD	1						1
262	253	438	Budi Asmarajaya	Hanifah	Merak 402	BD 009/012			1				
263				Atin Sutini	Merak 403	Gg Arus				1			1
264				Mukibin	Merak 404	Gg Arus				1			1
265	300			Sagita Maya	Merak 405	BD 008/010	1						
266				(-)	Merak 406	BD					1		
267				Samsuri	Merak 407	Gg Arus				1			1
268	266	34	Mukmin	Mu Min	Merak 408	BD 003/011						1	
269	335	24	Teti Emawati	Agus Jauhari	Merak 409	BD 015/012				1			
270	272	434	Daryati, Wahyudi	Wahyudi	Merak 410	BD 009/012						1	
271	273			Hidayat	Merak 411	BD 006/012	1						
272	289			Kusnadi	Merak 412	BD 005/012	1						
273	314	442	H. Dimiati	Vazar	Merak 413	BD 009/012			1				
274				Misbah Al R. Abdullah	Merak 414	BD	1						1
275	321			Husin	Merak 415	BD 006/012	1						
276	291			A Rojak	Merak 416	BD 006/012	1						
277	338			Nuryati	Merak 417	BD 006/012	1						
278	281			Nurhayati	Merak 418	BD 005/012	1						
279				Salwati	Merak 419	BD	1						1
280	301	235	Didik	Husni	Merak 420	BD 008/010				1			
281	322			Cecep	Merak 501	BD 006/012	1						
282	326			Syariffudin	Merak 502	BD 005/012	1						
283	317			Irma Nur Fazriah	Merak 503	BD 003/010	1						
284	315			Eldi Maqfira	Merak 504	BD 009/009	1						
285				Sunandar	Merak 505	Gg Arus				1			1
286	323	445	Ardiansyah	Dadang	Merak 506	BD 009/012				1			
287	303			Kamilah	Merak 507	BD 006/012	1						
288				Syafruddin	Merak 508	Gg Arus				1			1
289				Edi Gunawan	Merak 509	BD	1						1
290	276	349	Narti	Ramlan	Merak 510	BD 005/012				1			
291				Lukman Nur Hakim	Merak 511	BD	1						1
292	251	437	Hanifah	Hanifah	Merak 512	BD 009/012						1	
293	331			Linda	Merak 513	BD 006/012	1						
294				Iin Indah Rinjani	Merak 514	BD	1						1
295				Susanah	Merak 515	BD	1						1
296	75	185	Nurjanah	Nurjanah	Merak 516	BD 008/010						1	
297				(-)	Merak 517	BD					1		
298				(-)	Merak 518	BD					1		
299	340	327	Marnih	Mardani	Merak 519	BD 006/012				1			
300	330			Dede Sumarna	Merak 520	BD 005/012	1						
301	65	171	Sugiman/Tri Widodo/Igus	Tri Widodo	Merpati 101	BD 008/010						1	
302	9	372	M. Jusuf	Muhamad Jusuf	Merpati 102	BD 005/ 012						1	
303	11	416	Ajat Sudrajat	Jajat Sudrajat	Merpati 103	BD 005/ 012						1	
304	19	272	Hj. Muryati	Muryati	Merpati 104	BD 010/012						1	
305	58	9	A.M. Suyatin	A. M. Suyatin	Merpati 105	BD 015 /012						1	
306	64	172	Eby Ismoyo (Tino)	Mujaeni Budihartono	Merpati 106	BD 008/010				1			
307	37	295	Umar	M. Umar	Merpati 107	BD 010 / 012						1	
308	41	274	Djamilah	Djamilah	Merpati 108	BD 010 / 012						1	
309	70	166	Darmo	Darmo S.	Merpati 109	BD 008/010						1	
310	66	181	Maesaroh/Budiman	Siswali	Merpati 110	BD 008/010				1			
311	20	284	Syarif Maulana, Embeh	Syarif Maulana	Merpati 111	BD 010/012						1	
312	12	409	Bambang S./Hasim	Bambang Supriyanto	Merpati 112	BD 005/ 012						1	
313	18	285	M. Iqbal-Hairini	Muhamad Iqbal	Merpati 113	BD 010/012						1	
314	56	1	Sulaiman/Makah	M. Makah	Merpati 114	BD 010/012			1				
315	31	6	Sukirno	Sukirno	Merpati 115	BD 010 / 012						1	
316	17	298	Rudi Maridi	Rudi	Merpati 116	BD 010 /012						1	
317	23	303	Abd. Rahman Gani	ABD. Rachman	Merpati 117	BD 010 / 012						1	
318	54	406	Muhammad	Muhammad	Merpati 118	BD 005 /012						1	
319	26			Sanaiyah	Merpati 119	BD 010 / 012	1						

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERA SAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KO SONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
320	27	278	Mastun	Nisah	Merpati 120	BD 010 / 012			1				
321	92	154	Mulyanto	Suwarno	Merpati 201	BD 009/010			1				
322	76	241	Acim	Suprihatin	Merpati 202	BD 008/010			1				
323	47	8	Saamah	Abdul Rojak	Merpati 203	BD 015 /012			1				
324	6	364	Wardi	Alfian Wardi	Merpati 204	BD 005 /012		1					
325	34	299	Hayati Alamiah	Alamiyah	Merpati 205	BD 010 / 012						1	
326	60	164	Sukardi/Ari	Agus Purwanto	Merpati 206	BD 008/010			1				
327	80	150	Asnah	Asnah Thahar	Merpati 207	BD 009/010		1					
328	63	183	Didik	Didi Nurdin Abadi	Merpati 208	BD 008/010						1	
329	82	170	Nardi	Sugeng Widodo	Merpati 209	BD 008/010			1				
330	38	270	Slamet	Ahmad Fuad	Merpati 210	BD 010 / 012		1					
331	77	159	Bawon Sutidjah	Bawon Sutidjah	Merpati 211	BD 008/010						1	
332	53	276	Usni Rojali, Ceminah, Hanapi, Salam, Tara	Usni Rojali	Merpati 212	BD 010/012							1
333	2	271	Salim, Suparman, Sofiah,Nisa, Neneng, Jarkasih, Darmawati, Joni, Saman, Ade Suhaya	Tuti	Merpati 213	BD 010/012				1			
334				Abidin	Merpati 214	BD	1						1
335	83	175	Isah	Siti Rohana	Merpati 215	BD 008/010			1				
336				Sukamah	Merpati 216	BD	1						1
337	61	182	Asham	Agung Djayadi	Merpati 217	BD 008/010			1				
338	73	179	Saimih	Yunita Sari	Merpati 218	BD 008/010			1				
339	22	282	Abd. Rahman	Abdul Rahman	Merpati 219	BD 010 / 012						1	
340	69	168	Pariyem	Pariyem	Merpati 220	BD 008/010						1	
341	36	297	Sain	Saih	Merpati 301	BD 010 / 012						1	
342	94	25	Halimah	Rusli	Merpati 302	BD 015/012			1				
343	71	165	Prihadiman	Prihadi Atman	Merpati 303	BD 008/010						1	
344	14	418	Nur Ali	Nur Ali	Merpati 304	BD 005/ 012						1	
345	68	169	Sarmi	Sarmi	Merpati 305	BD 008/010						1	
346				Esti Limawati	Merpati 306	BD	1						1
347	32	268	Sapuaana/Boy	Sutrisno	Merpati 307	BD 010 / 012			1				
348	1	263	Asmat Boy	Asmat Sueip	Merpati 308	BD 010 / 012			1				
349	15	405	Haji Sopiah/Ruri	Rury Firmansyah	Merpati 309	BD 005/ 012						1	
350	42	273	Kurnaen, Holillah	Kurnaen	Merpati 310	BD 010 / 012						1	
351	5			Saman	Merpati 311	BD 010/012	1						
352	78	155	Titin Suherni	Riyanto	Merpati 312	BD 009/010			1				
353	21	283	Maryati, Anis	Anis Maulida	Merpati 313	BD 010/012		1					
354	79	153	Sunarno	Sunarno	Merpati 314	BD 009/010						1	
355	55	290	Marhasan, Zaenal Abidin	Achmad Nasochah	Merpati 315	BD 010/012			1				
356	10	383	M. Teguh/Irfan	M. Teguh	Merpati 316	BD 005/ 012						1	
357				Ely Dahlia	Merpati 317	BD	1						1
358	50	11	Enah	Jumingan	Merpati 318	BD 015 /012			1				
359	33	279	M. Yasin	Yasin	Merpati 319	BD 010 / 012						1	
360	46	5	Jeфри	Jeef Henry	Merpati 320	BD 010/012						1	
361	40			Martinus	Merpati 401	BD 010 / 012	1						
362	91	161	Surono	Surono	Merpati 402	BD 009/010						1	
363	45	387	Sam Suwardi	Sam Suwardi	Merpati 403	BD 005/012						1	
364	97	16	Apendi	Apendi	Merpati 404	BD 015/012						1	
365	240			Suhelda Ayuningsih	Merpati 405	BD 006/012	1						
366	96	259	Muhamad	Solichin	Merpati 406	BD 010/012		1					
367	29	287	Dimiyati	Hairani	Merpati 407	BD 010 / 012			1				
368	52	277	Royana/Tuti	Haerul Harun	Merpati 408	BD 010/012			1				
369	81	157	Ahmad Mustakim	Ahmad Mustakim	Merpati 409	BD 009/010						1	
370	28	3	Muhajirin	Muhajirin	Merpati 410	BD 010 / 012						1	
371	51	294	Mail	Ismail	Merpati 411	BD 010/012						1	
372	95	14	Ella	Usman	Merpati 412	BD 015/012			1				
373	3			Jarkasih	Merpati 413	BD 010/ 012	1						
374	30	289	Suhana, Budiman, Nuryani	Suhana	Merpati 414	BD 010 / 012							1
375	59	48	Husen	Nana	Merpati 415	BD 004 /011			1				
376	48	15	Kartikah	Kartikah	Merpati 416	BD 015 /012							1
377	234			Teguh Ikhwaniul Karim	Merpati 417	BD 006/012	1						
378	67	177	Acim	Acim	Merpati 418	BD 008/010						1	
379	49	7	Sumarni	Waris	Merpati 419	BD 015 /012			1				
380	85	176	Andre	Andri Maulana	Merpati 420	BD 008/010						1	
381	44	380	Irwanto	Irwanto	Merpati 501	BD 005/012						1	
382	16	4	Nining	Sumardinarsih	Merpati 502	BD 009 /012			1				
383	43	293	Katmia Edi Susanto	Achmad Yosep	Merpati 503	BD 010 / 012			1				
384	346			Hasan Hidayat	Merpati 504	BD 009/012	1						
385	312			Mulyono	Merpati 505	BD 009/009	1						
386	72	180	Sapei cs.	M. Syaefudin	Merpati 506	BD 008/010			1				
387	35	286	Firdaningsih	Firdah Ningsih	Merpati 507	BD 010 / 012						1	
388	297			Nardiana	Merpati 508	BD 009/009	1						
389	13	408	Gunawan	Gunawan	Merpati 509	BD 005/ 012						1	
390	62	184	Cicik	Aryadi	Merpati 510	BD 008/010			1				
391	103	267	Haimi	Siti Barkah	Merpati 511	BD 010/012			1				
392	57	2	Mansyur	Mansur	Merpati 512	BD 010/012						1	
393	7			Reky Ardian	Merpati 513	BD 005/ 012	1						
394				Khotimah	Merpati 514	BD	1						1
395	25			Indra	Merpati 515	BD 010 / 012	1						

**DATA WARGA YANG AMBIL RUSUNAWA RAWA BEBEK
PER FEBRUARI 2017**

NO. URUT	NO.URUT LAPORAN LURAH BUKIT DURI	NO. PETA BIDANG	NAMA PADA PETA BIDANG	NAMA TERDAFTAR DI RUSUNAWA PER TANGGAL 1 NOVEMBER 2016	LOKASI DI RUSUNAWA	LOKASI ASAL	KETERANGAN						
							TANPA PETA BIDANG	1 PB UTK 2 UNIT	NAMA DI RUSUNAWA BUKAN NAMA DI PB	BERASAL DARI LUAR BUKIT DURI	UNIT YANG KOSONG	WARGA TERDAMP AK YG SESUAI DG PB	UNIT YG TIDAK TERMA SUK DI LAP LURAH BD
396	341			Basri	Merpati 516	BD 010/012	1						
397	146	178	Agus Rizal	Sarmin	Merpati 517	BD 009/010			1				
398	318	259	Muhammad	Syafick Hermawan	Merpati 518	BD 002/010			1				
399	316			Herry Supriyanto	Merpati 519	BD 015/012	1						
400	100	261	Tolip	Sa adi	Merpati 520	BD 010/012			1				
J U M L A H							119	11	117	20	12	121	58

KETERANGAN:

Dibandingkan dengan jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek

Jumlah unit di Rusunawa Rawa Bebek		400					
Yang tidak memiliki peta bidang	119		29.75	%			
1 Peta Bidang memperoleh 2 unit rusunawa	11		2.75	%			
Nama penerima rusunawa tidak sama dengan nama pemilik peta bidang	117		29.25	%			
Penghuni yang berasal dari luar Bukit Duri	20		5.00	%			
Unit yang kosong	12		3.00	%			
Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki	121		30.25	%			
Unit yang tidak termasuk dalam laporan Lurah Bukit Duri						58	

Dibandingkan dengan jumlah Peta Bidang

Jumlah Peta Bidang (dikurangi korban penggusuran pada bulan Januari 2016): 460 - 97 =

Penerima rusunawa yang merupakan warga terdampak sesuai dengan peta bidang yang dimiliki

	363	
121	33	%



Yayasan Ciliwung Merdeka

Jalan Matraman No.19C

Kelurahan Kebon Manggis,

Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 13150

www.ciliwungmerdeka.org

ciliwungmerdekajakarta@gmail.com

ISBN 978-602-19548-0-5

